

365.42  
WID  
- u e1



**KINERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK  
DALAM RESOSIALISASI NAPI ANAK**

**Thesis**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh**

**WAHYU WIDODO, S.H.  
B4A.097.019**

**PEMBIMBING :**

**Prof. DR. LOEBBY LOQMAN, S.H., M.H.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2003**



KINERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK  
DALAM RESOSIALISASI NAPI ANAK

UPT-PUSTAK-UNDIP
No. Daft: 2098/T/MH/et
Tgl. : 20 Sept' 23

Disusun oleh :

WAHYU WIDODO, S.H.  
B4A.097.019

Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal :

Thesis ini telah diterima  
sebagai persyaratan untuk memperoleh  
gelar Magister Ilmu Hukum

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Loebby Loqman, SH. MH.

Mengetahui Ketua Program

Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH

## **ABSTRAK**

### **KINERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK DALAM KERANGKA RESOSIALISASI NAPI ANAK**

Oleh : Wahyu Widodo, S.H.

Dimanapun, yang namanya anak, adalah sosok manusia yang tidak hanya merupakan harapan orang tua yang melahirkannya, tetapi juga merupakan generasi muda, yang peran sertanya sangat diharapkan dalam kelanjutan pembangunan bangsa dan negara. Bertitik tolak dari eksistensi anak yang sedemikian, maka pertumbuhan dan perkembangan anak patut untuk dijaga dan diperhatikan.

Dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, tidak sedikit lubang-lubang yang potensial menjebak anak untuk masuk ke dalam suasana kehidupan yang "suram". Tidak sedikit contoh yang ditunjukkan terhadap hal ini. Meningkatnya frekuensi tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan gambaran nyata tidak sedikit anak-anak yang terjerumus ke dalam kehidupan yang suram.

Terhadap anak-anak yang sudah terlanjur melakukan tindak pidana ini, tidak jarang selanjutnya mengalami depresi, karena frustrasi dan adanya penolakan dari masyarakat terhadap keberadaannya. Oleh karenanya dibutuhkan suatu upaya komprehensif untuk mengembalikan anak-anak yang sudah terlanjur melakukan tindak pidana (kejahatan) ke dalam kehidupannya semula.

Anak yang melakukan kejahatan bukan karena ia memiliki sifat jahat, tetapi karena keadaan anak tersebut yang tidak stabil akibat keadaan yang datang dari anak maupun lingkungan sekitarnya. Bagi anak yang melewati sistem peradilan pidana, ia mendapat perlakuan khusus mulai tahap pendidikan sampai dengan tahap pelaksanaan pidana. Khususnya pada tahap pelaksanaan pidana, perhatian terhadap hal ini tidak pernah berhenti walaupun sampai saat ini.

Pada pelaksanaannya pembinaan narapidana anak belum sepenuhnya dilakukan secara terpadu oleh sistem peradilan pidana, penanganan pembinaan narapidana anak masih terkesan merupakan tanggungjawab lembaga pemasyarakatan saja. Dan pelaksanaan pembinaan narapidana anak pada prakteknya masih sering mengabaikan hak-hak anak.

Untuk masa yang akan datang perlu adanya kerjasama pihak lembaga pemasyarakatan dengan pihak swasta, setelah anak keluar dari lembaga pemasyarakatan dengan bekal ketrampilan dan keahlian, pihak swasta telah menerima anak sebagai tenaga sesuai dengan keahliannya.

Bertitik tolak dari uraian di atas dengan mengambil Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) sebagai obyek yang pantas dan memegang peranan penting dalam melakukan resosialisasi napi anak, tulisan ini akan menguraikan dan mendeskripsikan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) di dalam melakukan pembinaan untuk tujuan resosialisasi napi anak.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas perkenannya penulis dapat menyelesaikan thesis yang berjudul Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam Resosialisasi Napi Anak, sebagai syarat akhir studi Pasca Sarjana Bidang Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari thesis ini masih ada kekurangan, akan tetapi penulis tetap berharap semoga thesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Loebby Loqman, S.H. M.H., selaku pembimbing yang telah memberikan arahan dalam penulisan thesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arif, S.H., selaku Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum dan selaku Tim Review Proposal.
3. Bapak Prof. Ronny Hantijo, S.H., selaku Tim Review Proposal.
4. Bapak Prof. Dr. I. S. Susanto, S.H., selaku Tim Review Proposal.
5. Kakanwil Departemen Kehakiman Jawa Tengah yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
6. Kakanwil Departemen Kehakiman DKI Jakarta yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Kalapas Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo yang telah membantu dalam melakukan penelitian.
8. Kalapas Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang yang telah membantu dalam melakukan penelitian.

9. Kepala BAPAS Jawa Tengah yang telah membantu dalam melakukan penelitian.

10. Kepada Istriku dan anak-anakku tersayang yang telah memberi semangat dalam penulisan thesis ini.

11. Kepada Ibunda tersayang yang telah memberi semangat dalam penulisan thesis ini.

Akhir kata, mudah-mudahan thesis ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Semarang, 2003

Penulis

WAHYU WIDODO, S.H.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR RAGAAAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kontribusi Penelitian .....	11
E. Kerangka Berpikir.....	12
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Penulisan .....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	24
A. Pengantar .....	24
B. Istilah dan Pengertian .....	24
C. Gambaran Umum tentang Lembaga Pemasyarakatan .....	48
D. eksistensi LPA dalam Sistem Peradilan Pidana.....	58
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	68
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	68

B. Konstruksi Hukum Kinerja LPA dalam Kerangka Resosialisasi Napi Anak .....	80
C. Pola Pembinaan Napi Anak oleh LPA.....	113
D. Pola Interaksi LPA dalam Upaya Resosialisasi Napi Anak.....	133
BAB IV PENUTUP.....	142
A. Kesimpulan .....	142
B. Saran .....	144
DAFTAR PUSTAKA.....	145
LAMPIRAN	

## DAFTAR RAGAAAN

1. Perbandingan Kelengkapan LPA yang Menjadi Lokasi Penelitian .....	80
2. Data Narapidana Anak berdasarkan Kelompok Umur.....	120
3. Data Narapidana Anak didasarkan Pekerjaan Orang Tua .....	122
4. Tanggapan Napi Anak terhadap Menu Makanan dan Minuman yang diberikan dalam LPA.....	125
5. Persepsi Napi Anak terhadap Aktivitas di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Anak .....	127
6. Pandangan terhadap Pelajaran Kesehatan Napi Anak oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak .....	129
7. Interaksi antara Pengembalian dan Penerimaan .....	136



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana (*offender*) bukanlah semata-mata sebagai suatu tindakan balasan atas kejahatan yang telah dilakukan si pelaku,<sup>1</sup> tetapi lebih dari itu, adalah untuk menimbulkan ataupun menumbuhkan kesadaran si pelaku akan sifat berbahaya dan merugikan yang diakibatkan oleh kejahatan tertentu yang dilakukannya. Sehingga pada akhirnya si pelaku dapat insyaf dan tidak mengulangi atau melakukan kejahatan (*offence*) yang lain, setelah ianya bebas dari hukuman yang dijatuhkan kepadanya.

Sehubungan dengan uraian tersebut, maka untuk melihat apakah penghukuman yang dijatuhkan kepada si pelaku berorientasi kepada proses pembalasan ataukah pembinaan, di samping dapat dilihat dari bentuk kualitas hukuman yang dijatuhkan oleh hakim (*vonnis*), dapat juga diamati dari metode ataupun pola yang diterapkan di dalam melaksanakan hukuman terhadap si pelaku tersebut. Terhadap persoalan yang disebutkan terakhir ini, maka Lembaga Pemasyarakatan (LP) mempunyai peranan dan kedudukan yang strategi di dalam “menterjemahkan” hukuman yang telah ditetapkan atau diputuskan oleh hakim.

---

<sup>1</sup> Perkembangan teori pemidanaan, menempatkan bahwa tujuan penjatuhan pidana tidak hanya berorientasi kepada upaya penjerahan, tetapi juga berorientasi kepada upaya pembinaan si pelaku.

Urgensi dan kesetategisan LP, tidak lain adalah dikarenakan metode yang diterapkan LP dapat mempengaruhi bahkan menentukan “warna” dari hukuman yang dijalankan. Metode-metode pelaksanaan hukuman (penghukuman) yang diterapkan LP, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sifat penghukuman yang dijatuhkan bernuansa pembalasan ataupun sebaliknya bernuansa pembinaan.

Masalah dan usaha perlindungan anak tampaknya tidak akan pernah berhenti dibicarakan sebagaimana dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif<sup>2</sup>.

“Masalah dan usaha terhadap perlindungan anak telah lama dibicarakan baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Pembicaraan masalah ini tidak akan pernah berhenti, karena di samping masalah universal juga karena dunia selalu diisi oleh anak-anak. Sepanjang dunia tidak pernah sepi dari anak-anak, selama itu pula masalah anak akan selalu dibicarakan. Pembicaraan masalah anak ini akan menandakan adanya kasih sayang atau cinta kasih diantara umat manusia”.

Oleh karena itu merupakan tugas kita bersama untuk selalu mencari upaya-upaya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak dalam segala bidang. Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional, karena melindungi anak berarti manusia dan membangun manusia seutuhnya.

Di dalam pasal 2 ayat 3 dan 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1976 tentang kesejahteraan Anak dikatakan :

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar”.

<sup>2</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, **Bunga Rampai Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1992, hal. 106.

Kedua ayat ini dengan jelas menyatakan dan mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.

Perlindungan anak suatu masyarakat bangsa merupakan tolak ukur peradaban masyarakat bangsa tertentu, maka kita wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan demi kepentingan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan kegiatan anak tersebut. Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.<sup>3</sup>

Di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang kesejahteraan anak dinyatakan :<sup>4</sup>

Di samping anak-anak yang kesejahteraannya terpenuhi secara wajar, di dalam masyarakat terdapat pula anak yang mengalami hambatan rohani, jasmani dan sosial ekonomi yang merupakan pelayanan secara khusus, yaitu :

1. Anak-anak yang tidak mampu ;
2. Anak-anak terlantar ;
3. Anak-anak yang mengalami masalah kelakuan ;
4. Anak-anak yang cacat rohani dan atau jasmani.

---

<sup>3</sup> Arif Gosita, **Masalah Korban Kejahatan**, Akademika Presindo, Jakarta, 1993, hal. 222.

<sup>4</sup> Penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Kesejahteraan Anak.

Dengan demikian perlindungan terhadap anak ditujukan juga terhadap anak yang mengalami masalah kelakuan (pelanggaran-pelanggaran usia muda), karena anak yang melakukan kejahatan bukan karena ia memiliki sifat jahat, tapi karena keadaan anak tersebut tidak stabil akibat keadaan yang datang dari anak itu sendiri maupun yang berasal dari luar, yaitu lingkungan yang mengelilingi.<sup>5</sup>

Satu dari karakteristik kejahatan sebagai fenomena sosial (*Social Phenomenon*), adalah bahwa kejahatan tersebut bukanlah merupakan bentuk dari perilaku menyimpang yang hanya dapat dilakukan oleh manusia dewasa. Tetapi sebaliknya, anak-anak juga memiliki potensi untuk melakukannya. Terlebih lagi di tengah-tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini. Dengan sikap dan sifat anak yang senantiasa gemar meniru apa dan segala sesuatu yang baru dan diamatinya, baik yang diperoleh dari pengamatan sosial anak terhadap lingkungan sekitarnya maupun apa saja yang disajikan oleh media elektronik dan media cetak, sementara si anak belum mempunyai kualitas kemampuan yang memadai untuk atau di dalam menilai baik-buruk dari apa yang diamatinya tersebut, maka anak akan cenderung mempraktekkan di dalam pergaulan hidupnya, seperti : berkelahi, merokok, dan meminum minuman keras.

Dalam hal anak sudah terlanjut melakukan kejahatan atau tindak pidana, maka satu hal mendasar yang patut dipertanyakan adalah si anak tersebut

---

<sup>5</sup> Lobby Logman, *Makalah Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi*, UNDIP, 1995, hal. 1-2.

harus diperlakukan sama dengan manusia dewasa yang melakukan kejahatan (baik dalam prosedur peradilan maupun metode pelaksanaan hukuman) ?.

Terhadap permasalahan mendasar di atas, dengan memperhatikan karakteristik fisik dan psikis manusia dewasa, maka diperoleh jawaban, bahwa tidak seharusnya sama prosedur dan proses penghukuman anak dengan manusia dewasa. Ditambah lagi dengan sosok anak, sebagai insane kecil yang mempunyai cita-cita dan masa depan. Oleh karenanya penghukuman terhadap anak yang disamakan dengan manusia dewasa, dapat dikatakan sebagai upaya “mematikan” masa depan dan cita-cita anak. Ditambah lagi dengan perspektif negatif sebagian besar masyarakat yang berasumsi, bahwa penjahat tanpa terkecuali anak-anak, adalah sosok manusia yang harus disisihkan dari lingkungan, walaupun mereka-mereka ini telah bebas dari menjalani hukuman.

Bertitik tolak dari gambaran di atas, maka peran, tugas, dan tanggung jawab LP dalam konteks pembinaan narapidana anak di dalam kerangka resosialisasi napi anak, seharusnya memuat dua unsur, yaitu :

1. Unsur perubahan sikap, mental, dan perilaku anak ke arah yang lebih baik, dan ;
2. Unsur perubahan perspektif negatif masyarakat terhadap ex napi anak, sehingga masyarakat secara normal dapat menerima ex napi anak dalam lingkungan pergaulannya.

Oleh karenanya program pembinaan yang dilakukan LP, seharusnya dilakukan dengan berorientasi kepada individu (napi anak) dan sosial (masyarakat).

Bagi anak yang terpaksa harus memasuki gerbang sistem peradilan pidana, ia harus mendapat perlakuan khusus mulai dari tahap awal sampai dengan tahap akhir dari sistem peradilan pidana. Hal ini sesuai dengan sifat dan ciri-ciri khusus yang terdapat pada diri anak, sebagaimana juga yang disebutkan dalam konsideran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyatakan ; bahwa anak adalah bagian dari generasi muda. Sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang.

Perhatian terhadap pemikiran dan pengembangan tentang perlakuan dan pembinaan anak yang harus menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan tampaknya tidak pernah berhenti. Hal ini mungkin saja disebabkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang besarnya peran dan tanggung jawab lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga pelaksana pembinaan narapidana anak di dalam lembaga. Akan tetapi pada kenyataannya pembinaan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan masih disamakan dengan narapidana dewasa. Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Mardjono :<sup>6</sup>

“Meskipun konsep pemasyarakatan terpidana kita sudah berukur lebih dari (30) tahun, namun belum jelas apakah dalam konsepsi pengembangan dan perincian tersebut sudah ada pula pemikirannya yang membedakan secara konsepsional pembinaan orang dewasa dengan anak dan antara orang dewasa pria dari orang dewasa wanita”.

<sup>6</sup> Mardjono Reksodiputro, **Masa Depan Lembaga Pemasyarakatan Anak dan Lembaga Pemasyarakatan Wanita**. Makalah Pada seminar Terpidana III, UI – Masumoto Foundation Japan, 1995, hal. 1.

Hal senada dikemukakan oleh pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang mengatakan :<sup>7</sup>

“Apakah pelanggar-pelanggar hukum muda usia yang ada di lembaga-lembaga untuk orang dewasa itu mendapat pembinaan yang khusus sebagaimana diharapkan dalam pelaksanaan kebijakan penokoreksional menurut apa yang telah digariskan dalam konsepsi sistem pemasyarakatan (1964) dan surat-surat edaran sebelumnya”.

Pembinaan terhadap anak yang menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan selakny mendapat perhatian dan perlakuan khusus sesuai dengan ide dasar perlindungan terhadap anak, yaitu dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak, sebagaimana juga yang dikemukakan oleh Mardjaman :<sup>8</sup>

“Sebenarnya upaya pembinaan pelanggar usia muda dan anak bermasalah yang ditempatkan untuk dibina di lembaga pemasyarakatan anak menyimpan berbagai masalah mendesak untuk segera dipecahkan. Kebelumampuan anak melaksanakan pemeliharaan yang sempit di tengah usia pembentukan pribadinya dan memenuhi identitas dirinya sendiri untuk tumbuh dan berkembang secara wajar ke arah kedewasaannya di sisi lain, menuntut dilakukannya berbagai ragam kegiatan pembinaan yang intensif bagi anak didik di lembaga pemasyarakatan”.

Pembinaan terhadap narapidana anak bukan merupakan tanggung jawab lembaga pemasyarakatan anak semata, melainkan merupakan tugas bersama dari sistem peradilan pidana terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.<sup>9</sup>

“Sebagai suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau sub sistem yang seharusnya bekerja secara koheren,

<sup>7</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman, *Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Anak dan Pemuda serta Pembinaan Anak Didik*, 1986, hal. 92-93.

<sup>8</sup> Mardjaman, *Dimensi Objektif Lembaga Pemasyarakatan Anak di Indonesia*, Makalah pada Seminar Nasional Terpidana III, UI – Masumoto Foundation Japan, 1995, hal. 1.

<sup>9</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hal. 119.

koordinatif dan integral agar dapat mencapai efisiensi dan efektifitas yang maksimal. Berbagai sub sistem ini berupa Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi. Mengingat peranannya yang semakin besar maka para penasehat hukum dapat pula dikategorikan sebagai sub sistem. Inilah yang dinamakan struktur hukum (*legal structure*).

Oleh karena itu masalah pembinaan anak, bukan saja tanggung jawab lembaga pemasyarakatan, karena disini lembaga pemasyarakatan hanya merupakan salah satu unsur dari sistem peradilan pidana.

R.M. Jackson mengemukakan :<sup>10</sup>

“Pidana penjara merupakan termasuk jenis pidana yang relatif kurang efektif. Berdasarkan hasil studi perbandingan efektifitas pidana, dikemukakan olehnya, bahwa angka perbandingan rata-rata pengulangan atau penghukuman kembali (*reconviction rate*) bagi orang yang pertama kali melakukan kejahatan berbanding terbalik dengan usia pelaku. *Reconviction rate* yang tertinggi, terlihat pada anak-anak yaitu mencapai 50% untuk mereka yang pernah dipidana, angka tertinggi terlihat pada mereka yang berumur 21 tahun ke bawah, yaitu mencapai 70%. Lebih ditegaskan lagi oleh Jackson, bahwa *reconviction rate* tersebut lebih tinggi lagi setelah orang dijatuhi pidana penjara daripada pidana bukan penjara”.

Hal ini tentu tidak berarti bahwa munculnya residivis anak berarti kegagalan dari lembaga pemasyarakatan sebagai tempat menjalankan pidana dan tempat melaksanakan pembinaan narapidana, karena banyak faktor yang ikut menentukan berhasil tidaknya pembinaan narapidana anak di dalam lembaga.

Lembaga pemasyarakatan anak sebagai lembaga pendidikan dan lembaga pembangunan mengemban fungsi yang spesifik dan perlu penajaman atas orientasi pembinaannya. Dan yang perlu mendapat perhatian adalah,

<sup>10</sup> R.M. Jackson dalam Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, C.V. Ananta, Semarang, 1994, hal. 9.



bahwa anak-anak nakal yang dibina di lembaga pemasyarakatan anak adalah juga bagian dari anak Indonesia yang memiliki potensi dan memikul tanggung jawab masa depannya. Maka iapun perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, secara rohani, jasmani maupun sosial.<sup>11</sup>

Realitas dari fenomena kejahatan anak yang terjadi dewasa ini, menunjukkan tendensi peningkatan. Kenaikan tendensi ini, di samping disebabkan tidak sedikitnya anak-anak yang harus atau terpaksa menjalani suasana kehidupan yang seharusnya belum patut mereka jalani (seperti : keterpurukan ekonomi dan pergaulan (interaksi) yang sarat akan nilai-nilai), juga disebabkan tidak efektifnya kinerja (*performance*) lembaga-lembaga yang terkait dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), khususnya Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) di dalam melakukan pembinaan napi anak. Kondisi ini digambarkan oleh tidak sedikitnya anak-anak yang melakukan kejahatan, adalah anak-anak yang sebelumnya pernah mendapatkan pembinaan di LPA, dengan kata lain anak-anak yang sudah pernah dijatuhi dan menjalani hukuman.

Bertitik tolak dari pemikiran di atas, dengan menempatkan LPA sebagai komponen peradilan pidana (*criminal justice*) yang mempunyai peranan penting dalam kerangka pembinaan napi anak, penulis coba menguraikan kinerja LPA dalam kerangka resosialisasi napi anak.

---

<sup>11</sup> Mardjaman, *Loc. Cit.* Hal. 2.

## B. Perumusan Masalah

Masalah dalam sebuah penelitian merupakan salah satu komponen yang *urgent* dan menempati posisi yang strategis. Urgensi dan kestrategisan peranan dan posisi masalah tidak hanya dilatarbelakangi oleh hakikatnya yang menuntut dilakukan pembahasan, tetapi dikarenakan masalah juga berfungsi sebagai “rel” ataupun “alur” dalam menghasilkan pembahasan yang bersifat terfokus, dalam arti tidak terlalu melebar maupun menyempit, sehingga lari dari pembahasan yang seharusnya.<sup>12</sup>

Bertitik tolak dari urgensi dan kestrategisan masalah dalam sebuah penelitian (*research*), sebagaimana dirumuskan di atas, maka masalah yang dibahas dalam penelitian ataupun tulisan ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana konstruksi hukum yang ada mengatur pola pembinaan napi anak oleh LPA ?
2. Apakah pola pembinaan napi anak yang dilakukan oleh LPA telah menyahuti upaya resosialisasi napi anak ?
3. Bagaimana pola interaksi yang seharusnya diterapkan oleh LPA sehubungan dengan upaya resosialisasi napi anak ?

## C. Tujuan Penelitian

Mendasar pada permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini, adalah :

---

<sup>12</sup> Makna dari Masalah, lihat Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Rajawali-Press, Jakarta, 1992, hal., 60.

1. Menganalisis dan menggambarkan konstruksi hukum yang ada, yang menjadi landasan bagi kinerja LPA di dalam melakukan resosialisasi napi anak ;
2. Menganalisis dan menguraikan kesesuaian kinerja LPA dengan konsep dan tujuan resosialisasi napi anak, dan ;
3. Menggambarkan rumusan pola pembinaan napi anak yang “layak” untuk diterapkan sehubungan dengan upaya resosialisasi napi anak.

#### **D. Kontribusi Penelitian**

Melalui hasil-hasil yang diperoleh dalam penelitian, yang kemudian dijadikan dasar pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi :

1. Sebagai salah satu dasar bagi pengambil kebijakan (*policy makers*), khususnya di bidang perundang-undangan untuk melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kinerja LPA ;
2. Menjadi dasar bagi LPA di dalam merumuskan pola pembinaan napi anak yang sesuai dengan prinsip-prinsip resosialisasi napi anak, dan ;
3. Merupakan sumbangsih pemikiran penulis, untuk menambah ataupun melengkapi literatur yang membahas tentang kinerja LPA sehubungan dengan upaya resosialisasi napi anak.

### E. Kerangka Teori

Melakukan analisis dan pembahasan terhadap kinerja LPA sehubungan dengan upaya resosialisasi napi anak, maka eksistensi LPA ini dapat diklasifikasikan berdasarkan dua sudut pandangan yang berbeda, yaitu :

1. LPA sebagai satu lembaga (institusi) yang merupakan bagian dari Sistem Peradilan Pidana (SPP). Oleh karenanya studi yang dilakukan terhadapnya, adalah studi kelembagaan, dan ;
2. LPA merupakan tempat berkumpulnya individu-individu (aparatur LPA), yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan resosialisasi.

Dua pandangan yang menempatkan LPA pada posisi yang berbeda tersebut, selanjutnya memberikan pengarahannya, bahwa untuk melihat keberadaan LPA dalam perwujudan peran, fungsi, dan tanggung jawab yang diembannya, terdapat beberapa kelompok teori yang dapat dipergunakan, yaitu :

**Pertama**, adalah kelompok "teori organisasi". Teori organisasi ini dipergunakan untuk melakukan pembahasan terhadap karakteristik-karakteristik LPA sebagai salah satu bentuk organisasi yang mempunyai perbedaan dan persamaan dengan organisasi lainnya.

Kedua teori aliran struktural modern, yang berakar dari pemikiran Max Weber, dirumuskan beberapa asumsi dasar yang menjadi karakteristik umum dari tiap-tiap organisasi termasuk LPA, yaitu :<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Muftah Thoha, *Perspektif Perilaku Birokrasi (Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara Jilid II)*, Jakarta, Rajawali, 1991, hal., 18.

1. Organisasi merupakan suatu institusi yang bersifat rasional, yang mempunyai maksud dan tujuan yang telah ditetapkan. Perilaku organisasi yang rasional dapat dicapai dengan baik melalui suatu sistem aturan yang jelas dan otoritas yang formal. Koordinasi dan pengendalian merupakan kunci tercapainya rasionalitas dalam organisasi ;
2. Struktur organisasi dikatakan baik atau paling sedikit sesuai dengan hakikat organisasi, jika struktur organisasi tersebut dirancang sesuai dengan :
  - a. Tujuan yang hendak dicapai ;
  - b. Kondisi lingkungan yang mengelilingi organisasi ;
  - c. Sifat produksi atau pelayanan yang dihasilkan, dan ;
  - d. Teknologi yang dipergunakan dalam proses produksi dalam pelayanan tersebut.
3. Spesialisasi dan pembagian kerja akan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi atau pelayanan, apalagi kalau diimbangi dengan kecakapan dan profesionalisme yang tinggi, dan ;
4. Hampir semua persoalan dalam organisasi diakibatkan oleh struktur organisasi. Oleh karenanya cara mengatasinya adalah dengan menyempurnakan struktur tersebut.

Sehubungan dengan upaya organisasi di dalam mencapai ataupun mewujudkan tujuan, Peter M. Blau dan W. Richard Scott, mengemukakan

bahwa terdapat dua macam hubungan, yaitu : <sup>14</sup> hubungan yang bersifat formal dan hubungan yang bersifat informal.

Hubungan informal pada dasarnya bersumber dari struktur organisasi formal dan sangat membantu organisasi formal dalam menetapkan norma dan aturan kerja. Argumentasinya, bahwa tidak mungkin bisa mengetahui dan memahami kebenaran struktur organisasi formal tanpa mengetahui dan memahami organisasi informal.

Teori sosial organisasi berkepentingan mengamati tata cara birokrasi di struktur (eksistensi LPA), seperti : hubungan-hubungan atau unsur-unsur yang bersifat sistematis, baik unsur-unsur yang dirumuskan sebagai peranan di dalam pembagian tugas yang bersifat hierarkhis, maupun ciri-ciri yang saling terkait satu sama lain (peraturan, impersonalitas, dan spesialisasi) atau sebagai dimensi-dimensi interaksi yang berbeda dari totalitas yang sangat kompleks (sistem formal dan informal). <sup>15</sup>

Mendasarkan pada model analisis dan pendekatan untuk memahami organisasi birokrasi yang dikemukakan Peter M. Blau, <sup>16</sup> maka diperoleh 3 (tiga) dimensi yang bisa dianalisis dari sebuah organisasi, tanpa terkecuali LPA, yaitu : dimensi peranan (*role dimention*), dimensi kelompok (*group dimention*), dan dimensi organisasi (*organization dimention*).

Sehubungan dengan penganalisisan organisasi birokrasi Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia, khususnya organisasi birokrasi dari LPA,

<sup>14</sup> Ibid., hal., 21-22

<sup>15</sup> David Beetham, *Birokrasi*, Terjemahan oleh Saikat Simamora, Jakarta, Bumi Aksara, 1990, hal., 18

<sup>16</sup> Loc.Cit.

akan sulit dilakukan bila tidak mengkaitkannya dengan keberadaan birokrasi pemerintah. Kondisi sedemikian dikarenakan, walaupun LPA tersebut merupakan salah satu sub sistem birokrasi SPP, namun secara structural LPA merupakan bagian dari struktur pemerintahan.

Terhadap organisasi birokrasi pemerintahan di Indonesia, Affan Gaffar mengemukakan karakteristik-karakteristik sebagai berikut :

1. Bersifat *self image* (citra diri), bahwa pejabat itu sangat tahu, sangat pintar, sementara rakyat berada pada posisi tidak tahu apa-apa atau bodoh ;
2. Tugasnya bukan lagi untuk melayani masyarakat, akan tetapi harus dilayani, dan ;
3. Fungsi pelayanan bukan sebagai tugas dan kewajiban yang timbal balik untuk masyarakat, tetapi pelayanan merupakan hadiah dari birokrasi.<sup>17</sup>

Karakteristik birokrasi organisasi di Indonesia tersebut, bila disandingkan dengan karakteristik organisasi birokrasi yang ideal, sebagaimana yang dikemukakan oleh Max Weber, yaitu :

1. Kegiatan sehari-hari yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi didistribusikan melalui cara yang telah ditentukan dan dianggap sebagai tugas resmi ;
2. Pengorganisasian kantor mengikuti prinsip hierarkhis, yaitu unit yang rendah berada di bawah pengawasan unit yang lebih tinggi ;
3. Pelaksanaan tugas diatur oleh suatu sistem peraturan-peraturan abstrak yang konsisten ;
4. Pelaksanaan tugas bersifat formal, bukan pribadi ;
5. Adanya jenjang karier atau suatu sistem kenaikan pangkat, dan ;
6. Adanya efisiensi organisasi.<sup>18</sup>

Maka kita melihat adanya pergeseran-pergeseran, khususnya dalam hal pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, serta landasan yang dijadikan dasar

<sup>17</sup> Benny K. Harman, *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta, Elsam, 1997, hal., 171-173.

<sup>18</sup> Peter M. Blau & Marshal W Meyer, *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*, (terjemahan) Gary R. Yusuf, UI-Press, Jakarta, 1987, hal. 27-32.

untuk mewujudkan tujuan.

Pergeseran fungsi, peranan, dan tanggung jawab dari LP, khususnya LPA, dalam kenyataannya terlihat dari aktivitas yang berorientasi prosedural dan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan, dengan mengabaikan kondisi objektif dari fenomena yang ada di lapangan. Di samping itu juga disebabkan prosedur yang tidak sesuai dengan proses operasional pembinaan napi anak yang dilakukan.

LPA sebagai salah satu contoh dari organisasi birokrasi, merupakan lembaga atau institusi yang bersifat statis dan tidak dapat bekerja sendiri. Kedinamisan dari LPA baru terlihat pada saat ianya dioperasionalkan melalui kerja-kerja manusia, yang notabenenya adalah aparat LPA itu sendiri. Oleh karenanya, di samping teori-teori sosial organisasi birokrasi yang dipergunakan untuk melihat kinerja LPA, juga dipergunakan teori-teori sosial yang berkaitan dengan sikap dan perilaku manusia (aparat LPA).

Penempatan teori-teori sosial tentang sikap dan perilaku manusia, dirasa penting dikarenakan terkadang wujud dari perilaku yang ditunjukkan oleh aparat LPA, bukanlah merupakan perilaku yang berdiri sendiri, melainkan keberadaannya dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berlaku bagi aparat LPA, tetapi nilai-nilai tersebut berada atau berasal dari luar dirinya sebagai individu. Kondisi ini sebagaimana tergambar dalam pandangan Max Weber pada saat mengklasifikasikan tindakan manusia dalam kehidupan sosial, yaitu :

1. Tindakan yang menurut si aktor mengandung makna yang subyektif, yang meliputi berbagai tindakan nyata ;
2. Tindakan nyata yang bersifat membatin sepenuhnya serta bersifat subyektif ;



3. Tindakan yang meliputi pengaruh positif dari suatu situasi, tindakan yang sengaja diulang serta tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam ;
4. Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau beberapa individu, dan ;
5. Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain itu.<sup>19</sup>

Mendasarkan pada pandangan Weber di atas, maka teori sosial tentang sikap dan perilaku yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah teori penomenologi (*phenomenology theory*), yaitu suatu teori tentang persepsi-persepsi dari pengalaman-pengalaman subyektif dari individu-individu yang ada di dalam suatu sistem sosial.<sup>20</sup> Berkaitan dengan hal ini, juga dipergunakan teori yang melihat perwujudan tingkah laku manusia berdasarkan untung-rugi, yaitu *exchange theory*, yang dikemukakan oleh Habermas.<sup>21</sup>

Di dalam konsep Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) tahun 1997/1998, dikatakan bahwa anak yang dikenakan pidana maupun tindakan adalah mereka yang berumur antara 12 sampai 18 tahun. Suatu hal yang sangat maju dalam rancangan ini adalah bahwa anak yang belum berumur 12 tahun bukan merupakan subjek rancangan ini, atau dengan perkataan lain mereka tidak dapat diminta pertanggung jawaban menurut hukum pidana.

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan

<sup>19</sup> George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (terjemahan) Alimandan, Rajawali-Press, Jakarta, 1992, hal., 45.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal., 72.

<sup>21</sup> Ian Craib, *Teori-teori Ilmu Sosial Modern dari Parson sampai Habermas*, (terjemahan), Rajawali-Press, Jakarta, 1986, hal., 60-61.

Anak, Pasal 4 dikatakan : batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

Dengan demikian dilihat dari pengaturan mengenai batas usia anak dari beberapa perundang-undangan tidak ada keseragaman. Dan perlu diingat pula bahwa penentuan batas usia anak sangat tergantung pada sistem hukum negara masing-masing pada satu pihak dan kondisi ekonomi sosial, politik dan kebudayaan pada pihak lain, jadi batas umur anak ditentukan secara relatif.

Berbicara mengenai anak yang dibina di dalam lembaga pemasyarakatan, khususnya bagi narapidana anak, perlu juga diperhatikan mengenai tujuan pidana dan sistem pemidanaannya dalam kaitannya dengan konsep pemasyarakatan.

Sedangkan tujuan pidana yang berkembang dari dulu sampai sekarang telah menjurus ke arah yang lebih rasional. Dahulu tujuan pidana adalah pembalasan (*revenge*) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan. Hal ini bersifat primitif akan tetapi masih terasa pengaruhnya di zaman modern ini. Unsur-unsur primitif dari hukum pidana sulit dihilangkan, berbeda dengan cabang-cabang hukum yang lain.

Sarjana-sarjana Jerman seperti Kart dan Hegel adalah tokoh yang terkenal dalam mengemukakan teori pembalasan. Mereka beranggapan bahwa hukuman adalah konsekuensi dilakukannya suatu kegiatan.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Karni, **Ringkasan tentang Hukum Pidana**, Balai Pustaka Indonesia, hal. 11.

Sedangkan penganut teori pembalasan lainnya misalnya Leo Polak, ia mengatakan :

“Penjahat diberi suatu penderitaan yang *verdied* karena sesuai dengan kesalahannya”.<sup>23</sup>

Tujuan yang dipandang kuno adalah penghapusan dosa (*expiation*) atau retribusi (*retribution*), yaitu melepaskan pelanggar hukum dari perbuatan jahat atau menciptakan barang antara yang baik dengan yang bathil.<sup>24</sup>

Sedangkan secara tradisional teori-teori tentang tujuan pidana pada umumnya dapat dibagi dua kelompok teori, yaitu :<sup>25</sup>

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive vergeldings theorien*) ;
2. Teori relatif atau tujuan (*utilitarian/doltheorieen*).

Menurut teori absolut, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

Menurut Johanes A. Saparti yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif, dikatakan :

“Tujuan utama (*primer*) dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder.”<sup>26</sup>

<sup>23</sup> Utrecht, **Rangkaian Sari Kuliah, Hukum Pidana I**, Universitas Jakarta, hal. 168-169. Selanjutnya Leo Polak mengatakan bahwa : hukuman itu menjadi suatu pembalasan kesalahan (*schulder gelding*), justru karena penjahat bersalah (*schuldhebben*), maka ia harus mengalami suatu penderitaan.

<sup>24</sup> Andi Hamzah, **Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia**, Pradnya Pramita, Jakarta, 1985, hal. 16.

<sup>25</sup> Muladi dan Badar Nawawi Arif, **Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1993, hal. 10.

<sup>26</sup> Ibid, hal. 11.

yang menjadi landasan kinerja LPA (realitas konseptual), dan **kedua** adalah proses yang diterapkan sebagai pelaksanaan dari realitas konseptual, yaitu realitas fenomena.

Dua komponen dasar yang dijadikan pedoman untuk melihat kinerja LPA, selanjutnya mengarahkan pada adanya dua pendekatan yang dipergunakan di dalam penelitian, yaitu :

**Pertama**, pendekatan yuridis normatif,<sup>29</sup> yaitu analisis yang disandarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi LPA, dan kedua pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis,<sup>30</sup> yaitu analisis yang disandarkan kepada fakta empiris dari kinerja LPA.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Dua bentuk pendekatan yang diterapkan di dalam menganalisis kinerja LPA sebagaimana disebutkan di atas, selanjutnya berpengaruh terhadap jenis dan sumber data yang diperlukan.

Melalui pendekatan yuridis dogmatis diperoleh data yang bersifat sekunder, yang diambil dari bahan hukum yang primer, dan bahan hukum yang bersifat sekunder. Sedangkan melalui pendekatan yang empiris diperoleh data yang bersifat primer, yang diambil dari fakta yang ditemukan di lapangan.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tinjauan Singkat**, Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hal., 13.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UII-Press, Jakarta, 1986, hal., 3.

<sup>31</sup> Lihat Ronny Hanitijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal., 57-61.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Perolehan data primer, dilakukan melalui observasi, penyebaran kuesioner, dan wawancara yang bersifat terstruktur maupun tidak terstruktur,<sup>32</sup> yang dilakukan secara mendalam (*depth interview*).<sup>33</sup> Sedangkan data sekunder, diperoleh dengan melakukan studi dokumen dan melalui langkah-langkah penelitian hukum normatif.

### 4. Lokasi dan Sampel

Lokasi penelitian, adalah LPA Tangerang, Kutoardjo, dan Plantungan. Sementara sampel penelitian, di samping aparat LPA, juga napi anak yang terdapat di ketiga LPA.

### 5. Analisis Data

Guna membangun konsep pemikiran yang didasarkan kepada alur pemikiran yang bersifat induksi konseptualisasi,<sup>34</sup> maka analisis data bersifat empiris kualitatif, yang bertumpu pada penunjukkan simbol atau makna.<sup>35</sup>

Sebagai upaya penemuan keabsahan ataupun kevalidan data, dan agar data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan, maka teknis analisis data dilakukan dengan mengikuti tahapan-tahapan analisis data, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sanafiah Faisal, yaitu :

- a. Analisis domain ;
- b. Analisis taksonomi ;

<sup>32</sup> Lihat Sanafiah Fasila, **Penelitian Kualitatif ; Dasar-dasar dan Aplikasi**, YA3, Malang, 1990, hal., 62.

<sup>33</sup> **Op.Cit.**, hal., 61.

<sup>34</sup> **Op.Cit.**, hal. 90.

<sup>35</sup> Lihat Matthew B. Miles & Michael Huberman, **Analisis Data Kualitatif**, (terjemahan), Tjetjep Rohondi Rohodi, UI-Press, Jakarta, 1992, hal., 15-16.

- c. Analisis komponensial ;
- d. Analisis tema cultural, dan ;
- e. Analisis komparasi konstan. <sup>36</sup>

#### 6. Uji Validitas Data

Uji validitas data, yang bertujuan untuk mengetahui sejauhmana kevalidan dan keabsahan data yang diperoleh dapat mendukung pembahasan terhadap objek yang diteliti, dilakukan dengan mempergunakan teknik triangulasi data, yaitu dengan jalan memperbandingkan data yang diperoleh dari sumber yang satu dengan sumber yang lainnya. <sup>37</sup>

#### G. Sistematika Penulisan

Sebagai upaya untuk menghasilkan dan kemudian menyajikan hasil dari sebuah penelitian yang dengan mudah dapat dipahami dan dimengerti oleh pembaca, maka rumusan hasil penelitian ini disusun secara sistematis dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan uraian pembuka dari penelitian, yang terdiri atas 7 (tujuh) sub bab, dan berisikan uraian-uraian yang berkaitan dengan dasar penulisan. Bab II, tentang Tinjauan Pustaka, yang terdiri atas 4 (empat) sub bab, berisikan uraian-uraian istilah dan pengertian penegasan permasalahan. Bab III, mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang terdiri atas 4 (empat) sub. Dan bab IV, Penutup yang terdiri atas Kesimpulan dan Saran.

<sup>36</sup> Op.Cit., hal., 90-112.

<sup>37</sup> Ibid., hal., 20.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengantar**

Mengawali pembahasan terhadap ruang lingkup permasalahan yang melekat pada topik ataupun judul tulisan ini (sebagaimana telah dirumuskan pada Bab I), terlebih dahulu penulis menguraikan makna dari istilah-istilah yang terdapat dalam rangkaian judul. Urgensi penguraian makna dari istilah-istilah dimaksud, adalah :

1. Bahwa secara etimologis, dimungkinkan satu istilah memiliki lebih dari satu makna atau arti ;
2. Bahwa kemungkinan di atas menuntut diadakannya pembatasan makna dari istilah, yang tentunya disesuaikan dengan maksud dan tujuan yang hendak dicapai ;
3. Bahwa pembatasan makna terhadap istilah, dimaksudkan untuk menciptakan persepsi yang sama antara penulis dan pembaca, di dalam menafsirkan dan memahami substansi tulisan.

Mendasarkan pada pemikiran di atas, maka setelah sub bab pengantar ini, penguraian dilanjutkan kepada penjelasan makna judul, yang dituangkan dalam sub bab-sub bab sebagai berikut :

#### **B. Istilah dan Pengertian**

Sebagai sebuah kalimat, makna judul tulisan ini, yaitu “Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam Kerangka Resosialisasi Napi Anak”,

adalah rangkaian dari “kata-kata” yang masing-masing mempunyai arti atau makna tersendiri.

Upaya untuk memahami judul tersebut, minimal terdapat 6 (enam) istilah yang patut dimengerti dan dipahami maknanya, yaitu :

1. Kinerja

Kata “kinerja” merupakan derivasi (turunan) dari kata “kerja”, yang dalam Kamus Bahasa Indonesia, diartikan sebagai segala bentuk kegiatan atau aktivitas untuk melakukan sesuatu dalam mewujudkan tujuan tertentu.<sup>38</sup>

Bila kata “kerja” merupakan kata benda (*noun*), maka kata “kinerja” menunjukkan sifat (*adjective*) dari pekerjaan ataupun kerja yang dilakukan.

Bertitik tolak dari makna atau pengertian “kerja” di atas, selanjutnya dikemukakan, bahwa yang dimaksudkan dengan “kinerja (*performance*)” dalam tulisan ini, adalah sifat dari aktivitas Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA).

2. Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA)

Memahami hakikat dari LPA, maka yang terlebih dahulu dipahami, adalah istilah dan pengertian dari “pemasyarakatan”, baru kemudian istilah “lembaga”. Sementara kata “anak” yang dilekatkan pada Lembaga Pemasyarakatan (LP) hanyalah menunjukkan suatu pengkhususan, yang membedakannya dengan Lembaga Pemasyarakatan Dewasa (LPD).

<sup>38</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, Cetakan ke-3, 1990, hal., 428.



Dalam pasal 1 butir 1 UU. No. 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan, disebutkan :

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan, berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Sementara dalam Pasal 2 butir 3 UU. No. 12 Tahun 1995, dirumuskan, bahwa :

Lembaga Pemasyarakatan, yang selanjutnya disebut LAPAS, adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Bertitik tolak dari kedua pengertian yuridis di atas, selanjutnya dikemukakan, bahwa LPA merupakan wadah atau tempat berjalannya sistem, kelembagaan, dan tata cara pembinaan terhadap anak-anak yang dijatuhi hukuman pidana perampasan kemerdekaan.

Seorang anak yang terpaksa harus melewati gerbang "Sistem Peradilan Pidana", maka setiap tahap dalam sistem peradilan pidana tersebut, anak harus mendapat perlakuan khusus, dimulai dari tahap pendidikan sampai dengan tahap pelaksanaan pidana. Seorang anak yang diputus oleh hakim berupa penjatuan pidana, maka ia harus menjalaninya di lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan adalah tempat seseorang yang dijatuhi putusan pidana oleh hakim untuk dibina agar ia dapat kembali ke masyarakat dengan baik.

Apa yang dewasa ini disebut sebagai lembaga pemasyarakatan itu sebenarnya ialah suatu lembaga, yang dahulu juga dikenal sebagai rumah

penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim.<sup>39</sup>

Penjara atau istilah masa kini "pemasyarakatan" merupakan penemuan baru yang mulai berkembang secara luas 300 tahun terakhir ini. Ia merupakan perkembangan sistem pemidanaan dari masa ke masa. Ia merupakan perkembangan sistem pemidanaan dari masa ke masa. Dewasa ini, pemenjaraan dipandang sebagai bentuk pidana yang bertujuan memperbaiki penjahat dan disebut reformis sistem pemidanaan yang berjalan ke arah yang lebih rasional. Berbeda dari pandangan lama yang bertujuan menyingkirkan penjahat dari masyarakat.<sup>40</sup>

Dengan mengganti istilah penjara menjadi "pemasyarakatan" tentu terkandung maksud baik, yaitu bahwa pembinaan narapidana berorientasi pada tindakan-tindakan yang lebih manusiawi disesuaikan dengan kondisi narapidana itu.<sup>41</sup>

Sebagaimana halnya terjadi di negara-negara yang sedang berkembang, kegemilangan suatu negara telah mengakibatkan pula Indonesia sangat berkehendak menciptakan suatu sistem baru di segala bidang termasuk pula di bidang kepenjaraan. Munculnya sistem pemasyarakatan pada tahun 1964 tiada lain adalah juga disebabkan karena

<sup>39</sup> Lamintang, *Hukum Renintesier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hal. 180.

<sup>40</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia : dari Retribusi ke Reformasi*, Op. Cit., hal. 81.

<sup>41</sup> Djisman Samsir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992, hal. 70.

keadaan tersebut di atas dan bahkan merupakan pencerminan dari hal tersebut.<sup>42</sup>

Dalam pidana penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa di Universitas Indonesia pada tahun 1963, Sahardjo mengemukakan bahwa penghukuman bukanlah hanya untuk melindungi masyarakat semata-mata, melainkan harus pula berusaha membina si pelanggar hukum.

Pelanggar hukum tidak lagi disebut penjahat, melainkan ia adalah orang yang tersesat. Seorang yang tersesat akan selalu dapat bertobat dan ada harapan dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari sistem pembinaan yang diterapkan kepadanya.<sup>43</sup>

Menurut Djisman Samosir,<sup>44</sup> kesepuluh prinsip yang dihasilkan dalam konferensi tersebut sangat baik sebagai pedoman untuk pembinaan dan narapidana dan anak didik. Oleh karena itu, sebaiknya para petugas lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan hasil konferensi tersebut. Dengan demikian perlakuan terhadap narapidana dan anak didik, tiada lain ialah melakukan pembinaan, agar narapidana itu menjadi manusia yang berguna di masa datang. Lembaga pemasyarakatan yang bertugas membina narapidana secara teratur dan terencana harus memperhatikan latar belakang narapidana itu, misalnya tingkat pendidikannya, agar tujuan yang

---

<sup>42</sup> Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, hal. 9.

<sup>43</sup> *Ibid*, hal. 12

<sup>44</sup> Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Op. Cit., hal. 71

diharapkan dapat terwujud, dengan demikian program pembinaan narapidana itu harus ditangani secara khusus agar sesuai dengan tingkat pendidikan dan kemampuan narapidana itu sendiri.

Narapidana sebagai bagian dari masyarakat Indonesia perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari berbagai lapisan masyarakat, agar narapidana itu dapat menikmati hidup masyarakat tentram.<sup>45</sup>

Sebelum lahirnya Undang-undang Pemasyarakatan terdapat beberapa surat edaran yang mendukung eksistensi sistem pemasyarakatan, baik mengenai pelaksanaan pembinaan di dalam lembaga maupun di luar lembaga.

Berdasarkan Surat Edaran No : KP.10.13/3/1 tanggal 8 Pebruari 1985 tentang : Pemasyarakatan sebagai proses, maka dapat dikemukakan bahwa pembinaan narapidana dilaksanakan melalui empat tahap, yaitu :

- a. Tahap pertama ; terhadap setiap narapidana yang masuk dalam lembaga pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal tentang dirinya, termasuk sebab-sebab ia melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, si korban dari perbuatannya, serta petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya.

---

<sup>45</sup> Ibid, hal. 74.

- b. Tahap kedua ; jika proses pembinaan narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama-lama 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Dewan Pembina Pemasyarakatan sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan yang lebih banyak dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan pada medium security.
- c. Tahap ketiga ; jika proses pembinaan narapidana telah dijalani ½ dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Dewan Pembina Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik maupun mental dan juga segi ketrampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan diperbolehkannya mengadakan asimilasi dengan pihak luar.
- d. Tahap keempat ; jika proses pembinaannya telah dijalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan, maka kepada narapidana yang bersangkutan dapat diberikan lepas bersyarat yang diusulkan oleh Dewan Pembina Pemasyarakatan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Saroso,<sup>46</sup> bahwa seluruh proses pembinaan narapidana selama proses pemasyarakatan merupakan satu kesatuan yang integral menuju ketujuan mengembalikan narapidana ke masyarakat bebas dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian,

---

<sup>46</sup> Saroso, **Sistem Pemasyarakatan, ceramah pada lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan**, 1975, BPHN, Bina Cipta, Bandung, hal. 67.

ketrampilan sedapat mungkin juga finansial dan materiil) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna.

Dengan demikian proses pemasyarakatan menyangkut tata perlakuan terhadap narapidana dan anak didik yang diberi pembinaan di “dalam tembok” (intramural) dan “di luar tembok” (ekstramural). Baik proses pemasyarakatan di dalam lembaga maupun di luar lembaga mempunyai tujuan yang sama, yaitu reintegrasi sehat para narapidana dan anak didik masyarakat.<sup>47</sup>

Apabila kita hubungkan antara sistem pemasyarakatan dengan teori-teori tentang tujuan pidana, maka sistem ini sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat, jadi jelas tidak dapat digolongkan dalam teori pembalasan. Oleh karena itu peranan hakim disini menjadi penting. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto<sup>48</sup> bahwa hakim dalam menjatuhkan (pen) penghukuman yang berupa penjatuhan pidana harus menyadari apa makna pembedaan itu, harus menyadari apa yang hendak dicapai dengan yang ia kenakan kepada sesama manusia yang telah melanggar ketentuan Undang-undang. Dalam menetapkan hukum, hakim tidak semata-mata hanya menegakkan hukum demi hukum itu sendiri, melainkan harus mengejar kemanfaatan sosial.

Oleh karena itu keputusan hakim tidak boleh lepas dari politik kriminal, karena pengadilan pun merupakan aparat politik kriminal. Maka dalam hal ini hakim harus menentukan posisinya.

<sup>47</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Op.Cit, hal. 100.

<sup>48</sup> *Ibid*, hal. 101.

Sistem pemasyarakatan memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat dengan mengadakan pembinaan terhadap narapidana dan mengembalikan kesatuan hidup dari narapidana. Jadi lebih dititikberatkan kepada prevensi spesial. Oleh karena itu telah merupakan kenyataan bahwa gagasan pemasyarakatan telah menjadi dasar pembinaan para narapidana yang dijatuhi pencabutan kemerdekaan, maka mau tidak mau hakim harus memperhitungkan hal tersebut dalam penghukuman.<sup>49</sup>

Di dalam konsep Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 1997/1998 ada pedoman mengenai pemidanaan, pidana dan tindakan.

Di dalam pasal 54 mengenai tujuan pemidanaan dinyatakan sebagai berikut :

(1) Pemidanaan bertujuan untuk :

- Ke – 1 Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat ;
- Ke – 2 Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna ;
- Ke – 3 Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat ;
- Ke – 4 Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

---

<sup>49</sup> Ibid, hal. 101.

(2) Pidana tidak dimaksudkan dengan memenderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Di dalam pasal 55 mengenai pedoman pidana dinyatakan sebagai berikut :

(1) Dalam pidana hakim wajib mempertimbangkan :

- Ke – 1 Kesalahan pembuat ;
- Ke – 2 Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana ;
- Ke – 3 Cara melakukan tindak pidana ;
- Ke – 4 Sikap bathin pembuat ;
- Ke – 5 Riwayat hidup dan kesadaran sosial pembuat ;
- Ke – 6 Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana ;
- Ke – 7 Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat ;
- Ke – 8 Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan ;
- Ke – 9 Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban ;
- Ke – 10 Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana

(2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.



Pasal 56 :

Seseorang yang tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasar alasan penghapus pidana, apabila ia sendiri patut dicela atas dipersalahkan sebagai penyebab terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan penghapus pidana tersebut.

Pasal 57 :

- (1) Putusan pidana dan tindakan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dilakukan perubahan dan penyesuaian, dengan mengingat perkembangan narapidana dan maksud pemidanaan.
- (2) Perubahan dan penyesuaian tersebut dapat dilakukan atas permohonan terpidana, orang tua, wali atau penasehat hukumnya, atas permintaan jaksa penuntut atau permintaan hakim pengawas.
- (3) Perubahan atau penyesuaian tersebut tidak boleh lebih berat dari putusan dan pidana semula dan harus dengan persetujuan pidana.
- (4) Perubahan atau penyesuaian tersebut dapat berupa pencabutan atau penghentian sama sekali sisa pidana atau tindakan yang dijatuhkan terdahulu atau dapat berupa penggantian jenis pidana atau tindakan lainnya.
- (5) Apabila permohonan perubahan atau penyesuaian tersebut ditolak oleh pengadilan, permohonan baru dapat diajukan kembali setelah satu tahun sejak penolakan.
- (6) Jika terdapat keadaan-keadaan khusus yang menunjukkan bahwa permohonan itu patut dipertimbangkan sebelum batas waktu satu tahun

berlaku, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku.

Pasal 57 ini tampaknya berkaitan dengan ide individualisasi pidana. Ide ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :<sup>50</sup>

- Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi/perseorangan (asas personal) ;
- Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas) : “tiada pidana tanpa kesalahan” ;
- Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku ; ini berarti harus ada kelonggaran / fleksibilitas bagi hukum dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan dan penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Patut pula dikemukakan bahwa ide individualisasi pidana di Greenland seperti yang dikutip Barda Nawawi Arif.<sup>51</sup> Dari The Greenland Criminal Code, yaitu : ide individualisasi bertolak pada dua landasan/dasar (“*concertino*”), yaitu :

- (1) “The elasticity of sentencing” (elastisitas pemidanaan).
- (2) “The alteration/annulment/recovation of sanction (perubahan, perubahan dan pencabutan sanksi).

Pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan

<sup>50</sup> Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op. Cit., hal. 43.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal. 43.

nilai-nilai kemanusiaan yang beradab ; tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai pergaulan hidup masyarakat.<sup>52</sup>

Mengenai jenis-jenis pidana diatur di dalam pasal 114, ayat :

(1) Pidana pokok terdiri dari :

- a. Pidana nominal
  - 1. Pidana peringatan, atau ;
  - 2. Pidana teguran keras.
- b. Pidana dengan syarat
  - 1. Pidana pembinaan di luar lembaga ;
  - 2. Pidana kerja sosial, atau ;
  - 3. Pidana pengawasan.
- c. Pidana denda, atau ;
- d. Pidana pembatasan kebebasan
  - 1. Pembinaan di dalam lembaga ;
  - 2. Pidana penjara, atau ;
  - 3. Pidana tutupan.

(2) Pidana tambahan terdiri atas :

- a. Perampasan barang-barang tertentu atau tagihan
- b. Pembayaran ganti kerugian, atau ;
- c. Pemenuhan kewajiban adat.

Pasal 115 RKUHP mengatur mengenai pidana dengan syarat, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik.

---

<sup>52</sup> Ibid., hal. 44

Khusus mengenai pidana dan tindakan bagi anak, ada hal-hal baru yang sangat maju dalam RKUHP 1987/1988, yaitu tersedianya beberapa alternatif yang lebih banyak dibandingkan dengan KUHP dan Undang-undang Pengadilan Anak.

Pasal 116 RKUHP mengatur mengenai pembinaan di luar lembaga, yaitu :

- a. Mengikuti program bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina.
- b. Mengikuti terapi di Rumah Sakit Jiwa, atau ;
- c. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Selanjutnya dikatakan, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

Pasal 117 RKUHP mengatur mengenai pidana kerja sosial. Di dalam pasal ini dikatakan bahwa, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau bagian pidana kerja sosial tersebut apabila anak tersebut tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajibannya.

Pasal 122 mengatur pembinaan di dalam lembaga yaitu :

- (1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan tempat latihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.
- (2) Jika keadaan dan perbuatan anak membahayakan masyarakat maka dikenakan pidana pembinaan di lembaga pemasyarakatan anak.
- (3) Pembinaan di lembaga pemasyarakatan anak dilaksanakan sampai anak berusia 18 tahun.
- (4) Setelah anak menjalani  $\frac{1}{2}$  dari lamanya masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan anak dan berkelakuan baik, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pasal 123

- (1) Pidana penjara bagi anak dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan anak.
- (2) Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana yang dikenakan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

### 3. Resosialisasi

Bila istilah “resosialisasi” ini “dipenggal”, maka akan diperoleh dua suku kata yang berlainan makna, yaitu : “re” mengandung pengertian kembali, dan “sosialisasi”, berarti suatu proses sosial dalam pergaulan hidup masyarakat. Dengan demikian, “resosialisasi”, diartikan sebagai

suatu proses yang merupakan upaya pengembalian seseorang dalam suasana pergaulan sosial yang normal di tengah-tengah masyarakat.

Terhadap istilah resosialisasi ini, terdapat satu pandangan yang mengidentikkannya dengan makna dari istilah “pemasyarakatan”. Pandangan sedemikian ini sebagaimana dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, yaitu : “Pemasyarakatan yang berarti memasyarakatkan kembali terpidana, sehingga menjadi warga yang baik dan berguna (*healthy reentry into the community*), pada hakikatnya adalah resosialisasi”.<sup>53</sup> Sebagaimana diterangkan dalam naskah sejarah pemasyarakatan, yaitu :

..., sebagai peristiwa sejarah jelas bahwa istilah pemasyarakatan telah dipergunakan sejak tahun 1962, dan kalau isi dari apa yang menyebabkan timbulnya istilah “pemasyarakatan” ditelaah dan diperbandingkan dengan apa yang terkandung dalam istilah resosialisasi, maka tidak terdapat perbedaan-perbedaan prinsipil.<sup>54</sup>

#### 4. Narapidana (Napi)

Merujuk kepada UU. No. 8 Tahun 1981, tentang KUHP, ditemukan adanya beberapa istilah yang berbeda dan menunjukkan tingkat (kualitas) seseorang pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana, yaitu tersangka, terdakwa, dan terpidana.<sup>55</sup>

<sup>53</sup> Romli Atmasasmita, *Kepenjaraan dalam Suatu Bunga Rampai*, Armica, Bandung, 1983, hal., 44.

<sup>54</sup> Baharuddin Soeryobroto, *Naskah Sejarah Pemasyarakatan ; Bagian ke II, Bab III, Periode Kepenjaraan R.I. Ketiga (1960-1963), Proyek Penyempurnaan Sistem Pemasyarakatan*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, hal., 32.

<sup>55</sup> Penjelasan terhadap arti masing-masing istilah tersebut, lihat UU. No. 8 Tahun 1981, tentang KUHP.

Dalam kaitannya dengan istilah narapidana, maka dapat dikemukakan bahwa istilah narapidana ini merupakan derivasi dari istilah terpidana, yang ditujukan kepada tiap-tiap orang yang melakukan tindak pidana, yang oleh putusan hakim kepada orang tersebut dijatuhi pidana (vide, Pasal 1 butir 6 UU. No. 12 Tahun 1995). Oleh karenanya narapidana sering disebutkan sebagai orang terpidana yang menjalani pidana kehilangan kemerdekaan, yang ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (vide, Pasal 1 butir 7 UU. No. 12 Tahun 1995).

#### 5. Anak

Anak merupakan sosok manusia mungil yang secara fisik maupun psikis berbeda kondisinya dengan orang dewasa. Membicarakan tentang anak dalam kaitan perilaku delinkuensi anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seseorang dapat dikategorikan sebagai anak. Di samping itu ada pula yang menggunakan pendekatan psikososial dalam usahanya merumuskan mengenai batasan tentang anak ini.<sup>56</sup>

Perumusan batasan mengenai anak, tidak ada keseragaman baik dalam perundang-undangan nasional sendiri, maupun negara – negara lain. Di dalam Perundang-undangan nasional, terdapat beraneka ragam batasan mengenai anak, misalnya di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ditentukan anak adalah mereka yang berada di bawah usia 21 tahun, di

---

<sup>56</sup> Paulus Hadisuprpto, **Juvenile Delinquency : Pemahaman dan Penanggulangannya**, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, hal. 7.

dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan batas usia anak adalah di bawah 16 untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1979 tentang Pengadilan Anak menyatakan anak adalah mereka yang berada di bawah usia 18 tahun, anak yang disebut terakhir ini diklasifikasikan ke dalam 2 golongan, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 butir 2, yang lengkap berbunyi :

Anak nakal, adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau ;
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Negara-negara lain mempunyai batas usia minimum dan batas maksimum seorang anak untuk dapat diajukan ke sidang anak.

Sebagai perbandingan dikemukakan sebagai berikut :<sup>57</sup>

1. Amerika Serikat : Ada 27 negara bagian yang menentukan batas usia antara 8 sampai 18, negara bagian menentukan batas usia 8-17 tahun dan negara bagian lainnya menentukan batas usia 12 sampai 16 tahun.
2. Inggris : Menentukan batas usia 12 sampai 16 tahun.
3. Australia : Kebanyakan negara bagian menentukan batas usia antara 6 sampai 16 tahun.

---

<sup>57</sup> Sri Widayati Soekito, *Anak dan Wanita dan Hukum*, LP3S, Jakarta, hal. 10-11.



4. Negeri Belanda : Menentukan batas usia 12 sampai 18 tahun.
5. Sri Lanka : Menentukan batas usia 6 sampai 18 tahun.
6. Jepang dan Korea : Menentukan batas usia antara 14 sampai 20 tahun.
7. Taiwan : Menentukan batas usia 14 sampai 18 tahun.
8. Kamboja : Menentukan batas usia 15 sampai 18 tahun.
9. Filipina : Menentukan batas usia 7 sampai 16 tahun.
10. Malaysia : Menentukan batas usia 7 sampai 18 tahun.
11. Singapura : Menentukan batas usia 7 sampai 16 tahun.

Sementara Task Force on Juvenile Delinquency Prevention menentukan bahwa seyogyanya batas usia penentuan seorang anak dalam konteks pertanggungjawaban pidananya ditetapkan usia terendah 10 tahun dan batas antara 16-18 tahun.

Batasan usia ini biasanya dipergunakan sebagai tolak ukur sejauh mana anak bisa dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan kriminal.<sup>58</sup>

Perbedaan penetapan batas usia ini terjadi karena ada pengaruh kondisi sosiokultural masyarakat dari negara-negara bersangkutan, sehingga memunculkan adanya keanekaragaman penentuan batas usia seseorang sebagai anak.<sup>59</sup>

Didalam konvensi hak-hak anak (convention on the rights of the child) article 1 (pasal 1) dikatakan :

<sup>58</sup> Encyclopedia Americana, 1974, seri 16, hal. 270.

<sup>59</sup> Daulas Hadisuprpto, Juvenile Delinquency : Pemahaman dan Penanggulangannya, Op.Cit; hal. 9.

“For the purpose of the present convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier.” (Yang dimaksud anak dalam konvensi ini adalah setiap orang yang berada dibawah usia 18 tahun, diawasi berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan batas usia dewasa dicapai lebih awal.<sup>60</sup>

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, dalam menuntut orang yang belum cukup umur karena melakukan perbuatan sebelum berumur enam belas tahun, maka hakim dapat menentukan :

- Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharaannya tanpa dijatuhi pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran tersebut pada pasal : 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, 541 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana.

Selanjutnya didalam pasal 45 dan 46 diatur mengenai tindakan dan pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak, yaitu pasal 46 ayat 1 (satu) : jika hakim memerintahkan yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka dimasukkan ke dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau dikemudian hari dengan cara lain; atau diserahkan kepada orang tertentu atau kepada suatu badan hukum, yayasan

---

<sup>60</sup> United Nation Children Funds, *Convention on the rights of the child*, Resolusi PBB 44/25, 1989, page 6.

atau lembaga anak untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau dikemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain : dalam kedua hal di atas paling lama sampai umur delapan belas tahun.

Pasal 46 ayat 2 (dua) :

Aturan untuk melaksanakan ayat satu pasal ini ditentukan dengan Undang-undang.

Pasal 47 ayat 1 (satu) :

Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga.

Pasal 47 ayat 2 (dua) :

Jika perbuatan merupakan kejahatan yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 47 ayat 3 (tiga) :

Pidana tambahan yang tersebut dalam pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3 tidak dapat dijatuhkan. Di dalam Rancangan Konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 1997/1998 diatur mengenai pidana dan tindakan bagi anak, yaitu dari pasal III sampai dengan pasal 127.

Pasal III :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindakan pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan
- (2) Pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 112 RKUHP ini mengatur tentang pemerdanaan pemeriksaan di pengadilan demi kepentingan anak setelah mendengar pertimbangan penyidik, penuntut umum dan petugas kemasyarakatan.

Sedang di dalam Undang-undang Pengadilan Anak yang diatur mengenai batas usia minimum seorang anak yang dapat diajukan ke sidang anak, yaitu :

Pasal 4 ayat 1 (satu) : Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 4 ayat 2 (dua) : Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Di dalam Undang-undang Pengadilan Anak juga diatur mengenai anak yang belum berumur delapan tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Undang-undang ini, yaitu :

Pasal 5 ayat 1 (satu) :

Dalam hal ini anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.

Pasal 5 ayat 2 (dua) :

Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) masih dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua wali atau orang tua asuhnya.

Pasal 5 ayat 3 (tiga) :

Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.

Dengan demikian menurut pasal ini, anak di bawah umur delapan tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana dapat dilakukan penyidikan dengan tetap memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Menurut disiplin ilmu lain, dalam hal ini psikologi perkembangan anak, maka dilakukan pembagian, yaitu :<sup>61</sup>

1. Masa kanak-kanak, yaitu sejak lahir sampai 5 tahun.
2. Masa anak, yaitu umur 6 sampai 12 tahun.
3. Masa pubertas, yaitu umur 13 sampai kurang lebih 18 tahun bagi anak putri dan sampai umur 22 tahun bagi anak putra.
4. Masa adolesen, sebagai masa transisi ke masa dewasa.

---

<sup>61</sup> Agus Suyanto, **Psikologi Perkembangan**, Rineka Cipta, Surabaya, 1977, hal. 1

Menurut sejarah ilmu jiwa anak, dikatakan, bahwa sejak dulu manusia berusaha menguasai alam termasuk di dalamnya menguasai ilmu pengetahuan, tapi baru pada akhir-akhir ini, kehidupan sebagai anak yang memiliki dunianya sendiri diperhatikan. Dan usaha pendidikan anak sudah sejak dulu dilaksanakan, misalnya di Yunani atau Romawi Kuno, tapi belum memandang bagaimana seharusnya. Pada waktu itu belum ada keinsafan bahwa untuk rumah pendidikan anak, diperlukan lebih dahulu seluk beluk kehidupan anak apalagi kehidupan jiwanya.<sup>62</sup>

Pengetahuan tentang psikologi perkembangan anak ini sangat penting untuk diketahui oleh pejabat-pejabat yang bersangkutan dengan anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana. Para hakim, jaksa, polisi, rumah pendidikan, lembaga pemasyarakatan anak dan lain-lain yang terlibat, harus menyadari bahwa dengan mendidik anak-anak tersebut diharapkan perubahan atas sifat-sifat yang tidak baik tadi. Asas bagi kepentingan anak, yang diusahakan dengan memberikan bimbingan, pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi menjadi landasan peradilan anak-anak.<sup>63</sup>

Dengan demikian penentuan batasan anak ini cukup beragam baik dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan nasional, instrumen internasional, maupun disiplin ilmu lain.

---

<sup>62</sup> Ibid, hal., 47.

<sup>63</sup> Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Gratika, 1993, hal. 2.

Dari uraian-uraian di atas, maka disimpulkan, bahwa maksud dari kinerja LPA dalam rangka resosialisasi napi anak, adalah perubahan terhadap segala bentuk tindakan atau kebijakan (*policy*) yang dilakukan dalam pergaulan hidup yang berlangsung secara normal, dengan tidak dihalangi oleh traumatic yang dialami oleh si anak, maupun pandangan negatif dari masyarakat tempat dimana si anak nantinya menjalani kehidupan.

Penekanan pada persoalan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Anak, mengharuskan penulis untuk terlebih dahulu menguraikan secara teoritik tentang hakikat dari Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, khususnya Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam kedudukannya sebagai salah satu sub sistem dari sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*).

Penekanan pada persoalan kinerja LPA mengharuskan penulis untuk terlebih dahulu menguraikan secara teoritik tentang hakikat dari LP di Indonesia, khususnya LPA dalam kedudukannya sebagai salah satu sub sistem dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

### **C. Gambaran Umum tentang Lembaga Pemasyarakatan**

#### **1. Sejarah dan Perkembangan**

Tiap-tiap orang yang telah melakukan tindak pidana, dan oleh karenanya orang tersebut harus berhadapan dengan proses peradilan pidana (*criminal justice processes*), maka apabila hakim pengadilan menjatuhkan putusan yang bersifat menghukum orang tersebut dengan pidana penjara selama X tahun, maka konsekwensi logisnya, sehingga

sering disebutkan orang, bahwa LP merupakan wadah (tempat) pelaksanaan putusan hakim pengadilan pidana.

Istilah Lembaga Pemasyarakatan (LP) lahir dan dipergunakan sebagai identitas dari tempat pelaksanaan putusan pengadilan pidana, bila diamati dari perkembangan dalam pelaksanaan pemidanaan maka ianya tidak terlepas dari persoalan-persoalan sebagai berikut :

**Pertama**, perkembangan yang terjadi di dalam teori-teori penjatuan hukuman, dari mulai teori yang bersifat absolut (berorientasi kepada pembalasan dan atau penjerahan), yang hanya menekankan kepada tindakan pembalasan terhadap si pelaku dan yang dalam perkembangannya oleh Vos di bagi ke dalam 3 bagian, yaitu :<sup>64</sup>

- a. Teori pembalasan subyektif (*subjective vergelding*), yang melihat pembalasan sebagai suatu kewenangan negara (Sthal & Kant) ;
- b. Teori pembalasan objektif (*objective vergelding*), yang melihat pembalasan sebagai suatu kewenangan masyarakat (Herbert), dan ;
- c. Teori pembalasan subyektif yang objektif (*de objective als aan de subjective vergelding*) (Hegel);

Sampai kepada teori pemidanaan yang tidak hanya berorientasi sebagai pembalasan kepada si pelaku yang telah melakukan tindak pidana, tetapi bagaimana membuat si pelaku sadar akan kesalahannya, dan bagaimana si pelaku pada akhirnya dapat berinteraksi secara normal di dalam

<sup>64</sup> Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal., 27-28.



kehidupannya, yang disebut dengan *utilitarian theory* atau disebut juga dengan “teori gabungan”.<sup>65</sup>

**Kedua,** adalah dilatarbelakangi oleh perkembangan isu kemanusiaan, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang (termasuk Indonesia), yang dituntut untuk diterapkan dalam segala aspek kehidupan manusia.<sup>66</sup>

Kondisi-kondisi tersebut kemudian menuntut diadakannya satu perubahan di dalam proses pelaksanaan hukuman terhadap terpidana (baca juga ; napi anak). Sehingga dilakukanlah perubahan terhadap *Gestichten Reglement* (reglemen penjara), yang dirumuskan dengan mendasarkannya pada *Wetboek van Strafrchts voor Nederlanche Indie* (Stb. 1915, No. 732),<sup>67</sup> menjadi sistem pemasyarakatan.

Perubahan yang terjadi terhadap sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, kemudian diikuti dengan perubahan penyebutan bagi wadah pelaksanaan hukuman, yaitu penjara menjadi Lembaga

<sup>65</sup> Vos dalam Bambang Poernomo mengemukakan adanya 3 (tiga) aliran dalam teori gabungan ini, yaitu :

- a. Aliran yang menitikberatkan kepada pembalasan, tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi kepentingan penegak hukum (Zevenbergen) ;
- b. Aliran yang menitikberatkan pada perlindungan ketertiban masyarakat (Simon), dan ;
- c. Aliran yang menekankan pada pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat (De Pinto).

*Ibid.*, hal., 31.

<sup>66</sup> Lihat Romli Atmasasmita, *Strategi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hal., 9.

<sup>67</sup> R. Achmad S Soemadipraja & Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1979, hal., 1.

Pemasyarakatan (LP). Dimana, istilah pemasyarakatan dianggap lebih mengandung maksud baik, yaitu bahwa pembinaan narapidana berorientasi pada tindakan-tindakan yang lebih manusiawi, yang disesuaikan dengan kondisi tiap-tiap narapidana.<sup>68</sup>

Khususnya di Indonesia, munculnya istilah “pemasyarakatan”, adalah berawal dari ungkapan Suhardjo pada saat penerimaan gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Indonesia, tanggal 5 Juli 1963,<sup>69</sup> yang mana dalam pidatonya, Suhardjo mengemukakan :

Bahwa penghukuman bukanlah hanya untuk melindungi masyarakat semata-mata, melainkan harus pula berusaha membina si pelanggar hukum. Pelanggar hukum tidak lagi disebut penjahat, melainkan ia adalah orang yang tersesat. Seseorang yang tersesat akan selalu dapat bertobat dan ada harapan dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari sistem pembinaan yang diterapkan kepadanya.<sup>70</sup>

Direktorat Pemasyarakatan pada saat itu, yang menanggapi positif terhadap ungkapan Suhardjo, kemudian mengadakan Konferensi Dinas Direktur Penjara seluruh Indonesia di Lembang (Bandung), pada bulan April 1964, yang kemudian menghasilkan sepuluh prinsip dasar dari pemasyarakatan, yaitu :<sup>71</sup>

- a. Orang yang tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat yang adil berdasarkan Pancasila ;

<sup>68</sup> Lihat Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992, hal., 70.

<sup>69</sup> Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal., 73.

<sup>70</sup> Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hal., 12.

<sup>71</sup> Achmad Soemadipraja & Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hal., 13-15.

- b. Menjatuhi pidana bukanlah tindakan balas dendam sari negara. Oleh karenanya terhadap narapidana tidak dibenarkan penyiksaan, baik berupa tindakan, upacara, cara perawatan atau penempatan. Satu-satunya derita adalah dihilangkan kemerdekaan ;
- c. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan kepada narapidana. Oleh karenanya kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatan yang telah lalu. Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial, guna menumbuhkan rasa hidup bermasyarakat ;
- d. Negara dilarang membuat kondisi seseorang lebih buruk ataupun lebih jahat daripada sebelum orang tersebut masuk lembaga. Karena itu harus diadakan pemisahan, antara :
  - 1) Yang residivis dengan yang bukan residivis ;
  - 2) Yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan ;
  - 3) Yang dewasa, dewasa muda, dan anak-anak, dan ;
  - 4) Yang terpidana dengan yang tahanan.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat, dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat ;
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan untuk kepentingan jawatan atau kepentingan negara sewaktu saja ;

- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat ;
- i. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan, dan ;
- j. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program-program di tengah kota ke tempat-tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan.

Lahirnya istilah pemasyarakatan ternyata tidak hanya memberikan pengaruh secara konseptual, dalam arti dilakukannya perubahan dalam sistem pemasyarakatan itu sendiri, akan tetapi juga memberikan pengaruh secara “fisik”, yaitu dengan adanya peralihan sebutan “penjara” kepada “lembaga pemasyarakatan”, walaupun dalam kenyataannya masih terdapat sebagian masyarakat yang menyebutkan istilah penjara terhadap wadah atau lembaga yang melaksanakan putusan pengadilan.

Lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu unsur dari sistem peradilan pidana, sebaiknya juga mendapat pengkajian yang sama dengan unsur-unsur lainnya dari sistem peradilan pidana, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan mempunyai posisi yang strategi dalam merealisasi tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan (*Suppression of crime*). Keberhasilan dan kegagalan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga

pemasyarakatan akan memberikan kemungkinan-kemungkinan penilaian yang dapat bersifat positif maupun negatif. Penilaian itu dapat bersifat positif manakala pembinaan narapidana mencapai hasil maksimal, yaitu bekas narapidana menjadi warga masyarakat yang taat pada hukum. Penilaian itu dapat negatif kalau bekas narapidana yang dibina itu menjadi penjahat kembali.<sup>72</sup>

Menurut Mochtar Kusumaatmadja lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu unsur dari sistem peradilan pidana.<sup>73</sup> Lembaga pemasyarakatan sebagai suatu sistem, menghadapi empat masalah pokok :

- (1) Masalah sarana peraturan perundang-undangan ;
- (2) Masalah sarana personalia ;
- (3) Masalah sarana administrasi - keuangan ;
- (4) Masalah sarana fisik

Sedangkan menurut Muladi<sup>74</sup>, selanjutnya apakah akan dilihat sebagai metode pembinaan pada pelaku (treatment of offender method) ataukah akan dilihat sebagai sistem, maka apabila hendak disempurnakan, maka sistem pemasyarakatan harus memperhatikan dimensi-dimensi masukan (input dimension), baik yang merupakan dimensi masukan awal (row input), dimensi masukan instrumental (instrumental input). Maupun dimensi masukan yang berasal dari lingkungan strategis, baik nasional maupun global (environmental input). Atas dasar interaksi positif antar

<sup>72</sup> Petrus Irwan. P dan Pandapotan S., **Lembaga Pemasyarakatan dalam Respektif Sistem Peradilan Pidana**, Sinar Harapan, hal. 65.

<sup>73</sup> Romli Atmasasmita, **Kapita Selektu Hukum Pidana dan Kriminologi**, Op. Cit., hal.135.

<sup>74</sup> Muladi, **Kapita Selektu Sistem Peradilan Pidana**, Op. Cit., hal. 120.

dimensi ini baru dapat ditentukan secara akurat baik subjek, objek maupun metode yang akan didayagunakan dalam proses pemasyarakatan terpidana.

Sistem peradilan pidana di Indonesia, setelah berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memiliki empat sub sistem, yaitu : Kepolisian yang secara administratif berada di bawah Departemen Pertahanan dan Keamanan, Kejaksaan di bawah Kejaksaan Agung, Pengadilan di bawah Mahkamah Agung serta Lembaga Pemasyarakatan di bawah Departemen Kehakiman. Lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama dengan sub sistem lainnya. Untuk memahami lebih jauh posisi strategi dari lembaga pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana, maka perlu memahami dan melihat keberadaan yang sebenarnya dari keseluruhan lembaga pemasyarakatan.

Tujuannya adalah untuk mendudukan peran dan tanggung jawab lembaga ini secara proporsional dengan sub sistem lainnya. Secara umum cara yang dilakukan adalah dengan memperhatikan faktor-faktor:<sup>75</sup>

1. Jumlah lembaga pemasyarakatan yang ada di seluruh Indonesia beserta kelas dan daya muatnya.
2. Jumlah narapidana yang sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia adalah 29.993 narapidana dengan berbagai karakteristiknya (sumber : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI Juli 1991).

<sup>75</sup> Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotas S, **Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana**, Op. Cit., hal. 66

3. Jumlah petugas/pegawai lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan balai bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak (balai BISPA) di seluruh wilayah Indonesia pada bulan Juli 1991, adalah 17.662 dengan karakteristik pendidikan ; SD sebanyak 3.003 ; SMP sebanyak 3.009, SMA sebanyak 10.0019 ; D III sebanyak 1.113 ; S1 (Sarjana) sebanyak 428 orang (Sumber Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI, Juli 1991).

Dengan melihat ketiga faktor di atas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa ;<sup>76</sup> terdapat ketidakseimbangan antara jumlah narapidana dengan sarana personalia, yaitu petugas pembina yang dalam hal ini berfungsi sebagai pembina.

Memperbandingkan antara jumlah narapidana sebanyak 29.923 dengan jumlah pegawai sebanyak 17.662 dengan karakteristik didominasi Sekolah Menengah Atas, disusul SMP dan Sekolah Dasar.

Dengan demikian yang paling banyak melakukan hubungan dengan narapidana saat menjalani hukuman adalah para petugas yang tingkat pendidikannya sekolah menengah ke bawah.

Dengan tidak mengecilkan arti kemampuan petugas pembina yang berpendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas, tetapi merupakan fakta bahwa petugas pembina dalam melakukan pembinaan di dalam lembaga lebih banyak mengandalkan pendekatan keterlibatan. Oleh karena itu lembaga pemasyarakatan membutuhkan tenaga-tenaga yang berkualitas,

---

<sup>76</sup> Ibid, hal. 67

seperti apa yang dikatakan oleh Karsono Adisumarto, bahwa pelaksanaan pemasyarakatan pada hakekatnya memerlukan tenaga-tenaga ahli seperti psikiater, psikolog, sosiolog, dokter, insinyur, ahli perusahaan dan ahli-ahli lain sesuai dengan kebutuhan teknis operasional lembaga pemasyarakatan.<sup>77</sup>

Pada uraian sebelumnya telah disinggung, bahwa salah satu karakteristik kejahatan sebagai penyakit sosial, di samping memiliki umur yang relatif tua, juga mengandung sifat universal. Dalam arti bahwa kejahatan tersebut dalam perkembangannya, tidak hanya terjadi di dalam satu wilayah atau negara tertentu, tetapi terjadi di setiap wilayah atau negara yang ada. Tidak hanya merupakan dominasi dari orang dewasa ataupun kaum lelaki, tetapi juga dilakukan oleh anak-anak dan kaum wanita.

Adanya kemungkinan suatu kejahatan dilakukan oleh anak-anak, di samping menimbulkan satu tuntutan untuk dilakukannya proses peradilan yang berbeda, juga menimbulkan tuntutan lain, yaitu adanya penempatan yang berbeda diantara anak-anak yang melakukan kejahatan dengan orang dewasa yang melakukan kejahatan. Oleh karenanya, sebagai realisasi dari pon 4 sub bab d, dari sepuluh prinsip-prinsip pokok pemasyarakatan di atas, diupayakan untuk membentuk satu Lembaga Pemasyarakatan yang dikhususkan untuk menampung, membina, dan

---

<sup>77</sup> Ibid, hal. 68.



mendidik anak-anak yang melakukan kejahatan, yaitu yang disebut Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA).

Penegasan terhadap adanya pembagian LP ini, dituangkan dalam SK.MENKEH.RI.NO. M.01-PR.07.03 Tahun 1985, tanggal 26 Februari 1985, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Dalam keputusan ini, disebutkan empat bentuk ataupun jenis dari LP (Lapas), yaitu : Lapas, Lapas Wanita, Lapas Pemuda, dan Lapas Anak. Terhadap Lapas Anak (LPA), kemudian dibagi ke dalam dua golongan, yaitu Lapas Anak Pria dan Lapas Anak Wanita.

Terhadap sejarah kelahiran LPA, yang merupakan lokasi penelitian, selanjutnya akan diuraikan secara khusus pada Bab III.

#### **D. Eksistensi LPA dalam Sistem Peradilan Pidana**

Dikarenakan yang menjadi penekanan, adalah Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA), maka sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dimaksudkan, adalah sistem peradilan pidana yang berlaku atau yang diterapkan dalam kasus tindak pidana anak.

Mardjono Erksodiputro mengemukakan, bahwa sistem peradilan pidana, adalah :

Suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan dalam batas-batas toleransi masyarakat, ... yang bertujuan :

1. Mencegah masyarakat menjadi korban ;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas, bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dijatuhi pidana, dan ;

3. Mengusahakan agar mereka yang telah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>78</sup>

Bertitik tolak dari pandangan Mardjono di atas, maka selanjutnya dapat dikemukakan, bahwa sistem peradilan pidana anak, adalah merupakan suatu mekanisme ataupun proses untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak, yang disesuaikan dengan sifat maupun karakteristik dari anak.

Sebagai suatu sistem, maka yang disyaratkan dari proses bekerjanya SPP anak, adalah adanya suatu keterpaduan diantara sub-sub sistem yang terdapat di dalam sistem tersebut. Hal ini di samping didasarkan bahwa tujuan dari SPP anak baru dimungkinkan untuk diwujudkan apabila sub-sub sistem yang ada di dalamnya berada pada posisi yang saling mendukung, juga disandarkan kepada pandangan Mardjono yang mengemukakan akibat negatif yang akan muncul apabila tidak adanya keterpaduan diantara sub-sub sistem di dalam suatu sistem, yaitu :<sup>79</sup>

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama ;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana, dan ;
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

<sup>78</sup> Mardjono Reksodiputro, **Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana**, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum-Universitas Indonesia, 1994, hal., 84.

<sup>79</sup> Lihat Mardjono Reksodiputro, *Ibid.*, hal., 85.

Berkaitan dengan hal di atas, Muladi mengemukakan :

Sistem Peradilan Pidana, di dalamnya terkandung gerak sistemik dari sub sistem-sub sistem pendukungnya, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga koreksi (Lembaga Pemasyarakatan), yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan (totalitas) yang berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output), yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (untuk tujuan jangka pendek), pencegahan kejahatan (untuk tujuan jangka menengah), dan kesejahteraan sosial (untuk tujuan jangka panjang).<sup>80</sup>

Selanjutnya Muladi menegaskan,<sup>81</sup> bahwa yang harus dilihat atau diperhatikan dari sistem peradilan pidana, adalah eksistensi sistem peradilan pidana tersebut sebagai "*the network of courts and tribunal a which deal which criminal law and its enforcement*". Pemahaman sistem dalam hal ini harus dilihat dalam konteks, baik sebagai *physical system*, yaitu seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai tujuan, maupun sebagai *abstract system*, dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur, yang satu sama lain berbeda, tetapi saling tergantung. Begitu juga dengan Mardjono yang mengemukakan :<sup>82</sup> bahwa bila keterpaduan dari bekerjanya SPP ini tidak diperhatikan, maka ianya merupakan satu kendala dan faktor mendasar yang menyebabkan SPP tidak dapat mewujudkan tujuan idealnya.

Menciptakan sebuah sistem yang bersifat utuh dan terpadu, bukanlah merupakan suatu kerja yang sederhana, melainkan sebaliknya. Heterogenitas persoalan yang dihadapi untuk mewujudkan keutuhan (keterpaduan) SPP,

<sup>80</sup> Muladi, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal., vii.

<sup>81</sup> Muladi, *Ibid.*, hal., 15.

<sup>82</sup> Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hal., 85-86.

menempatkan dibutuhkannya satu disiplin ilmu khusus yang pada dasarnya berada di luar dari ruang lingkup ilmu hukum, yaitu **manajemen**. Terhadap urgensinya ilmu manajemen dalam penciptaan keterpaduan sistem ini digambarkan oleh Susilo Martoyo, yang mengemukakan :

Ada tiga alasan utama dibutuhkannya ilmu manajemen untuk membentuk suatu sistem yang utuh terpadu, yaitu :

1. Untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan sistem).
2. Untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan ;
3. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas.<sup>83</sup>

Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya, khususnya Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA), sebagai sebuah organisasi, merupakan suatu sistem manajemen. Oleh karenanya jangan sampai tujuan-tujuan organisasi lebih berada di depan atau lebih diutamakan ketimbang tujuan dari sistem, tempat LPA tersebut sebagai sub sistemnya. Karena sebagaimana dikemukakan oleh Peter M Blau dan Marshal W Meyer, bahwa :<sup>84</sup> di dalam birokrasi-birokrasi yang besar ideologi-ideologi organisasional berkembang mendahului tujuan-tujuan asli, mengkaburkan persepsi-persepsi, dan secara khusus menciptakan penolakan dengan menjunjung tinggi keadaan-keadaan yang sedang berlaku. Karena apabila LPA, dengan beranggapan bahwa keberadaannya adalah di luar dari SPP, sehingga lebih mengutamakan atau lebih menonjolkan tujuan LPA sebagai organisasi, bukan tujuan SPP maka

<sup>83</sup> Susilo Martoyo, **Manajemen Sumber Daya Manusia**, BPFE-UGM, Yogyakarta, 1987, hal., 4.

<sup>84</sup> Lihat Peter M. Blau & Marshal W Meyer, **Op. Cit.**, hal., 71.

yang diharapkan untuk diwujudkan dari SPP anak tentu tidak akan terpenuhi.<sup>85</sup>

Dengan berpijak kepada eksistensi LPA sebagai bagian ataupun sub sistem dari SPP anak, berikut dikemukakan kinerja LPA sehubungan dengan pembinaan yang dilakukan untuk tujuan resosialisasi napi anak.

Merujuk ataupun mengutip pandangan yang dikemukakan oleh Georey Hazard Jr., Muladi mengemukakan adanya tiga bentuk pendekatan untuk memahami proses bekerjanya SPP, yaitu : pendekatan normative, administrative, dan sosial.<sup>86</sup> Dikarenakan LPA sebagaimana telah diuraikan terdahulu adalah merupakan sub sistem dari SPP, maka pembahasan terhadap kinerja LPA tersebut dilakukan atas dasar ketiga bentuk pendekatan di atas.

Menganalisis dan membahas kinerja LPA berdasarkan pendekatan normative maka sejalan dengan hakikat norma itu sendiri, yang secara umum dikemukakan sebagai ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya penekanan berdasarkan pendekatan ini, adalah bagaimana ketentuan perundang-undangan yang ada mengatur tentang kinerja LPA, dan bagaimana LPA sudah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan bagi LPA di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

---

<sup>85</sup> Lihat Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hal., 135.

Keberhasilan upaya penegakan hukum, sangat dipengaruhi oleh ketergantungan dan keterkaitan antara unsur-unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

<sup>86</sup> Lihat Muladi dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana ; Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hal., 17-18.

Sebelumnya, perlu penulis kemukakan, bahwa di dalam pendekatan normative terhadap kinerja LPA, juga harus diperhatikan model SPP yang tergambar, yang oleh Herbert L Packer diklasifikasikan ke dalam *Due Process Model (DPM)* dan *Crime Control Model (CCM)*.<sup>87</sup>

Urgensi perhatian terhadap dua model ini, adalah walaupun keduanya merupakan model yang muncul dari satu pendekatan yang sama, namun dikarenakan tiap-tiap model memiliki karakteristik yang tersendiri, maka dimungkinkan diperoleh hasil yang berbeda dari kinerja LPA yang diharapkan.

Terhadap karakteristik ataupun nilai-nilai yang mendasari *DPM*, Romli Atmasasmita mengemukakan :<sup>88</sup>

Bahwa nilai-nilai yang mendasari *DPM*, adalah :

1. Kemungkinan adanya faktor kelalaian yang manusiawi atau "*human error*", menyebabkan model ini menolak *informal fact finding process*, sebagai cara untuk menetapkan *definitif factual guilt* seseorang. Model ini hanya mengutamakan *formal adjudikatif* dan *adversary fact finding*. Hal ini berarti seseorang anak yang disangka telah melakukan kejahatan harus diajukan ke pengadilan yang tidak memihak, dan diperiksa sesudah si anak memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya.
2. Model ini menekankan kepada pencegahan (*preventive measure*) dan

<sup>87</sup> Lihat Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968, hal., 157-158.

<sup>88</sup> Lihat Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hal., 19-20.

menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan.

3. Model ini beranggapan bahwa individu secara utuh dan utama di dalam proses peradilan dan konsep pembatasan wewenang formal, sangat memperhatikan kombinasi stigma dan kehilangan kemerdekaan yang dianggap merupakan pencabutan hak asasi seseorang yang dapat dilakukan oleh negara. Proses peradilan dianggap menekan (*coercive*), membatasi (*restricting*), dan merendahkan martabat (*demeaning*). Proses peradilan harus dikendalikan agar dapat dicegah penggunaannya, sampai pada titik optimum, karena kekuasaan cenderung disalahgunakan atau memiliki potensi untuk menempatkan individu pada kekuasaan negara yang bersifat *coercive*.
4. *DPM* bertolak dari konsep nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan, dan memegang doktrin *legal-guilt*, yang berorientasi pada :
  - a. Seseorang yang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara prosedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan ;
  - b. Seseorang tidak dapat dianggap bersalah sekalipun kenyataan akan memberatkan, jika undang-undang kepada orang yang bersangkutan tidak efektif.
5. Gagasan persamaan hak di muka hukum atau *equality before the law* lebih diutamakan.
6. Lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana.

Bila kita bertolak dari model di atas untuk menggambarkan kinerja dari LPA, maka satu hal yang pasti bahwa gambaran kinerja yang ada, adalah merupakan cerminan dari pengaturan perundang-undangan dan yang merupakan putusan pengadilan. Namupun demikian, walaupun dikatakan bahwa kinerja LPA, adalah ditentukan oleh substansi peraturan perundang-undangan, sehingga menggambarkan LPA tersebut hanya sebagai alat pelaksana, akan tetapi dengan dirumuskannya standard “kesusilaan” dan “kemanfaatan”, sebagai landasan dalam mengambil dan menentukan tindakan terhadap napi anak, selanjutnya menunjukkan batas-batas, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kinerja LPA, adalah substansi perundang-undangan yang berorientasi kepada konsep pembinaan dalam rangka resosialisasi napi anak. Dengan kata lain, bahwa dengan adanya *obstade course*, maka kinerja LPA tidak mengejar suatu target tertentu di luar peraturan perundang-undangan yang ada. Bila di dalam UU. No. 12 Tahun 1985 (misalnya) dirumuskan bahwa tujuan LPA, adalah untuk mendidik, membina, dan mengembalikan anak dalam kehidupan yang wajar di tengah-tengah masyarakat, sehingga tindakan-tindakan yang diatur dan dirumuskan dalam undang-undang tersebut, adalah tindakan-tindakan yang berorientasi kepada upaya rehabilitasi dan resosialisasi, maka kinerja yang ditunjukkan oleh LPA, adalah merealisasikan apa yang diatur dalam UU. No. 2 Tahun 1985 tersebut.

Berbeda halnya dengan *Crime Control Model (CCM)*, dengan karakteristik ataupun nilai-nilai dasar yang melandasi bekerjanya model ini,



dan penekanan yang hendak dicapai dari penerapan model ini yaitu efisiensi, sehingga model ini dikatakan juga sebagai *assembly line conveyer belt* atau sistem-sistem ban berjalan, membenarkan LPA dalam kinerjanya untuk menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam bekerjanya LPA.

Adapun karakteristik dari CCM ini, adalah :<sup>89</sup>

1. Tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi penting dari suatu proses peradilan ;
2. Perhatian utama ditujukan kepada efisiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya, dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilannya ;
3. Prinsip kriminal penegakan hukum harus dilaksanakan berdasarkan prinsip cepat (*speedy*) dan tuntas (*finalty*), dan model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut haruslah model administrative atau model managerial ;
4. Asas pra duga tak bersalah (*presumption of innocent or presumption of guilty*) akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien dan ;
5. Proses penegakan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas, temuan-temuan fakta administrative oleh karena temuan tersebut akan membawa ke arah :
  - a. Pembebasan seorang tersangka dari penuntutan ;
  - b. Kesiediaan terdakwa menyatakan dirinya bersalah (*lead of guilty*).

---

<sup>89</sup> Lihat Romli Atmasasmita, *Ibid.*, hal., 19.

Berkaitan dengan pendekatan normative, untuk melihat kinerja LPA dan model SPP yang terdapat di dalam pendekatan tersebut, maka pengaturan kinerja LPA di dalam peraturan perundang-undangan tidaklah harus dipisahkan atau terkotak-kotak dari komponen SPP lainnya, karena apabila hal ini yang dilakukan, maka tujuan SPP anak akan sulit untuk diwujudkan, khususnya di dalam meresosialisasi napi anak nantinya ke tengah-tengah masyarakat.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

Mengawali pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan yang sebelumnya telah dirumuskan pada bab pendahuluan, berikut diuraikan beberapa persoalan yang berada di dalam ruang lingkup lokasi penelitian.

Pemaparan lokasi penelitian ini dirasa perlu, untuk menginformasikan kepada para pembaca, bagaimana suasana atau kondisi lokasi penelitian dalam realitasnya.

Sehubungan hal di atas, maka pemaparan lokasi penelitian di sini meliputi 3 (tiga) objek, yaitu :

1. Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Tangerang ;
2. Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo, dan ;
3. Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Plantungan.

Lebih jelasnya bagaimana suasana atau kondisi dari ketiga LPA di atas digambarkan dalam uraian berikut ini :

#### **1. Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Tangerang**

##### **a. Sejarah**

Sebelum LPA Tangerang didirikan, terhadap anak-anak ataupun manusia usia muda yang terpaksa dirampas kemerdekaannya melalui putusan pengadilan pidana, sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya, ditempatkan di Madiun. Namun setelah pemerintah

mempergunakan tanah partikelir (tanah swasta), berdasarkan usulan Direktur Yustisi, melalui surat nomor : 020/I/3/1923, tertanggal 14 Februari 1923, dibangun atau didirikanlah LPA atau dulunya disebut juga dengan nama Rumah Penjara Untuk Usia Muda (*jeudgevangenings*), sebuah lembaga pendidikan negara untuk anak laki-laki (*landsopvoedingesticht* dan sebuah lagi untuk anak wanita di Tanah Tinggi Tangerang.

Dengan adanya tiga lembaga khusus untuk pelanggar usia muda di Tanah Tinggi Tangerang, yang mempunyai destinasi yang berbeda, maka lengkaplah ruang gerak penerapan pasal 45, 46 dan 47 KUHP.

Setelah berdirinya lembaga-lembaga pendidikan negara untuk pelanggar hukum usia muda di Tangerang didirikan pula lembaga-lembaga yang serupa di Bandung, Solo dan Blitar, namun bersama dengan itu pula didirikan rumah-rumah penjara khusus bagi pelanggar hukum usia muda yang dikenakan pidana hilang kemerdekaan, seperti di Ambara yang sekarang dipindahkan di Kutoarjo untuk Jawa Tengah dan Pemekasan Jawa Timur, tidak terhitung bagian-bagian yang khusus untuk pelanggar hukum usia muda yang terdapat di penjara-penjara sentral yang dirubah fungsinya menjadi "*stroafgevangings*" (penjara tempat melaksanakan pidana hilang kemerdekaan). Jelas sekali bahwa fasilitas untuk menampung pelanggar hukum usia muda lebih banyak daripada fasilitas yang berupa lembaga pendidikan negara (*landsopvoedingesticht*).

Pembangunan *jeudgevangenings*, diawali dengan peletakan batu pertama, pada tanggal 28 Desember 1923. Pembangunannya dilakukan dengan sebagian besar mempergunakan tenaga para terpidana, yang terdapat di *jeudgevangenings* Madiun. Setelah pembangunan *jeudgevangenings* di Tanah Tinggi Tangerang selesai dibangun, maka para terpidana muda usia ataupun terpidana anak yang berada di Rumah Penjara Madiun, kemudian dipindahkan ke Rumah Penjara Usia Muda di Tanah Tinggi Tangerang, yang sekarang dikenal dengan sebutan Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Tangerang.

b. Luas dan Bentuk Bangunan

Sejak mulai dibangun sampai dengan saat ini, luas dan bentuk bangunan LPA Tangerang, tidaklah mengalami perubahan. Dengan luas areal sekitar 12.150 meter persegi, dengan luas bangunan keseluruhan 3.350 meter persegi, LPA dibangun dalam bentuk (format) “letter U”. Sementara bentuk bangunan LPA Tangerang ini pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan bangunan Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) dan Lembaga Pemasyarakatan Dewasa (LPD), baik yang ada di dalam Indonesia maupun di luar Indonesia, yaitu berbentuk “kipas terbuka” atau “bangunan lingkaran” yang tidak tertutup (*ring gebouw*).

Bangunan LPA Tangerang terdiri dari lima deretan sel-sel (blok-blok), yang dilingkari oleh bangunan *ring gebouw*. Deretan sel-sel

yang berjumlah lima buah, masing-masing dipisahkan oleh lapangan hijau yang langsung berbatasan dengan pintu-pintu tiap sel.

Bangunan LPA Tangerang, memiliki 428 buah sel, dengan ukuran rata-rata 1,50 x 2,50 M, untuk sel perorangan. Di samping sel-sel perorangan, terdapat kamar-kamar yang terletak di bangunan lingkaran, yang dapat memuat 10-15 orang anak.

c. Fasilitas

Bangunan LPA Tangerang, di samping dilengkapi fasilitas kantor untuk pelaksanaan administrasi LPA Tangerang, yang terletak di barisan depan pintu masuk LPA Tangerang, juga dilengkapi dengan fasilitas yang dapat dipergunakan untuk memupuk mental, kepribadian, dan kemandirian anak, seperti : ruang nonton TV, taman/lapangan bermain, tanah kebun, dan ruangan masak, yang kesemua fasilitas tersebut berada di dalam lingkaran bangunan LPA Tangerang. Sementara untuk fasilitas pendidikan, tidak terdapat di LPA Tangerang, tetapi terdapat di LP Pemuda Tangerang. Oleh karenanya anak-anak yang akan bersekolah diantar ke LP Pemuda Tangerang.

Secara terperinci sarana dan pra-sarana yang merupakan fasilitas LPA Tangerang di dalam melakukan pembinaan napi anak diuraikan sebagai berikut :

### 1) Ruang Administrasi

Ruang administrasi ini di samping berfungsi sebagai tempat pelaksanaan kegiatan administrasi, juga sebagai wadah penerimaan dan pendataan napi anak.

### 2) Ruang Tinggal Napi Anak

Ruang tinggal napi anak yang terdapat di LPA dibagi dalam berbagai tingkatan, yang meliputi : *standard minimum security*, *standard medium security*, dan *standard maximum security*. Di dalam ruang tinggal *standard minimum security*, penghuni dapat membawa kunci kamarnya masing-masing. Setiap kamar dilengkapi dengan tempat tidur, meja kecil, lampu penerangan. Di dalam ruang tinggal dengan *standard minimum security* masih diperlukan pengawasan, akan tetapi tidak terlalu ketat. Perlengkapan di dalam ruang tinggal ini sama dengan perlengkapan yang ada di ruang tinggal dengan *standard medium security*. Sementara di dalam ruang tinggal *standard maximum security*, masih diperlukan pengawasan yang ketat, karena narapidana anak dianggap berbahaya. Mengenai ruang tinggal narapidana anak pada dasarnya masih bersifat antara *medium security* dan *maximum security*, karena pengawasan tetap dilakukan dengan ketat dan kunci kamar masih dipegang oleh petugas. Sesungguhnya penggolongan lembaga ke dalam *maximum security*, *medium security*, dan *minimum security* sudah tidak

sesuai dengan kebutuhan sistem pemasyarakatan. Dasar penggolongan ini hanya dipandang dari pendekatan keamanan (*security approach*), sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 KUHP dan Pasal 49-56 *Gestichten Reglemen*. Sebaiknya perlu dipikirkan kondisi bangunan lembaga pemasyarakatan terbuka dengan *standard minum security* atau perlu diadakannya sarana semi-lembaga yang dikoordinasikan dengan baik dalam kerangka pengimigrasian anak ke dalam masyarakat. Walaupun ini tentu memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang sekali yang juga memerlukan keterlibatan suatu lembaga yang independen, misalnya parole, probation dan lembaga-lembaga kesejahteraan anak dengan ditunjang oleh petugas yang berkualitas.

Sedangkan mengenai perlengkapan kamar, saat ini di dalam setiap kamar tidak ada tempat tidur, tidak ada tikar, meja belajar dan lemari. Saat ini narapidana anak itu tidur di lantai, kecuali mereka yang membawa sendiri alas tidur (tikar). Sedangkan menurut instrumen internasional (*United Nation Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty*), ruang tidur anak harus dapat memberikan kenyamanan tidur bagi anak, jam tidur diatur, dan selama tidur anak harus terbebas dari gangguan.

### 3) Ruang Makan

Seluruh narapidana makan bersama di ruang makan, kecuali orang-orang tertentu yang dikenakan pengawasan *maximum security* dan



*medium security*. Dalam hal ini anak berhak mendapatkan makanan yang berkualitas dan cukup kuantitasnya yang disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak serta sesuai dengan standard kesehatan.

#### 4) Sel Disiplin

Sel disiplin, yaitu sel untuk menempatkan narapidana yang melanggar tata tertib atau disiplin dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan.

Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang mempunyai sel disiplin yang diperuntukkan bagi narapidana anak yang melanggar peraturan. Bagi mereka hanya diberikan “makan kering”, yaitu istilah yang berarti makan tanpa lauk, dan mereka dimasukkan dalam sel disiplin. Dan berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Seksi Bimbingan dan Pembinaan Anak Didik, dikatakan bahwa hukuman badan boleh saja dikenakan bagi anak yang melanggar disiplin atau peraturan. Keadaan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia juga tidak sesuai dengan instrumen internasional. Pada setiap tindakan disiplin harusnya berpedoman pada suatu ketentuan yang tidak merendahkan martabat anak sebagai seorang manusia dan harus sesuai dengan ukuran kelayakan dalam masyarakat. Semua tindakan kasar yang tidak manusiawi, merendahkan martabat anak, penempatan dalam sel

yang gelap dan terisolir, serta pengurangan jatah makan, dan hukuman fisik adalah dilarang dengan alasan apapun.

#### 5) Sel Orientasi

Sel orientasi, yaitu untuk menempatkan narapidana yang baru sebagai tempat tinggal sementara waktu, dimana mereka disini dipelajari untuk menentukan program selanjutnya.

Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang mempunyai satu ruang orientasi. Akan tetapi secara fungsional sel ini kurang dimanfaatkan terhadap kegiatan orientasi narapidana anak. Hal ini terbukti misalnya dalam hal anak tidak mengetahui hak-haknya sebagai penghuni lembaga. Seharusnya dalam sel ini anak diberitahu mengenai hak-hak mereka dan peraturan-peraturan yang ada di dalam lembaga dan juga di dalam sel ini selain dilakukan orientasi terhadap anak dalam rangka memberikan program pembinaan, seharusnya dalam tahap ini juga anak diperkenalkan pada hak-hak dan kewajiban mereka sebagai penghuni lembaga pemasyarakatan. Dari data yang diperoleh (tabel...) sebagian dari mereka ternyata tidak tahu apa yang menjadi hak-hak mereka.

#### 6) Ruang Kunjungan

Ruang kunjungan, yaitu tempat terselenggaranya pertemuan dengan keluarga.

Lembaga pemasyarakatan anak Tangerang mempunyai ruang kunjungan yang bersatu dengan ruang administrasi pembinaan.

Hanya saja pada pelaksanaannya untuk kunjungan keluarga saat ini tidak mempunyai batas waktu yang jelas, ada yang hanya lima belas menit ada yang setengah jam bahkan ada yang lebih dari itu. Tidak ada ketegasan peraturan mengenai lamanya waktu berkunjung. Bagi pengunjung yang sering datang ke lembaga pemasyarakatan dan sudah kenal dekat dengan petugas, maka jangka waktu bisa diperpanjang.

7) Ruang pembinaan

Di dalam rangka pembinaan narapidana. Maka diperlukan ruangan-ruangan yang berfungsi untuk mendukung terwujudnya pembinaan tersebut. Saat ini di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang mempunyai :

- a) Ruang kelas SD, SMP dan SMA, yang dipergunakan untuk menampung aktivitas pendidikan dan ilmu pendidikan. Sekolah Dasar di sini dinamakan SD Istimewa Tangerang, yang terdiri dari enam kelas, yaitu kelas satu sampai dengan kelas enam. Statusnya swasta, di bawah pimpinan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DKI Jaya. Sekolah Dasar Istimewa Tangerang ini telah melaksanakan EBTA secara mandiri. Sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama (SLTP Istimewa) dan SMU (SMU Istimewa), terdiri dari tiga kelas, yaitu kelas satu sampai dengan kelas tiga. Statusnya swasta, di bawah pimpinan Kantor Wilayah Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan. Yang menjadi permasalahan disini adalah tidak semua narapidana anak dapat bersekolah disini, karena mereka harus menempuh persyaratan, yang salah satunya adalah surat keterangan bahwa mereka bersekolah sebelum masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan.

- b) Ruang kerja (*workshop*). Di lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang saat ini mempunyai ruang kerja, yang berfungsi sebagai ruang untuk pendidikan non formal. Ruangan ini berfungsi untuk melakukan latihan-latihan keterampilan seperti, seni lukis, seni teater, seni musik, keterampilan elektronika, sablon, menjahit dan kerajinan triplek. Akan tetapi pada saat ini kondisi peralatan sudah banyak yang rusak dan tidak bisa dipergunakan sebagaimana mestinya, sedangkan untuk beberapa kegiatan tidak sepenuhnya dilaksanakan karena kekurangan tenaga pengajar atau tenaga ahli dalam bimbingan kerja.
- c) Tempat untuk kegiatan ekstrakurikuler. Saat ini di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang mempunyai kegiatan ekstrakurikuler, berupa kegiatan kepramukaan, olah raga dan rekreasi. Untuk kegiatan ekstrakurikuler berupa kepramukaan saat ini telah dilaksanakan latihan gabungan pramuka dengan Gugus Depan SLTP Negeri 1, SLTP Negeri 2 dan SLTP Panca

Karya. Sedangkan untuk kegiatan olah raga hanya dilakukan di sekitar luar lembaga.

- d) Ruang Auditorium. Ruangan ini dimaksudkan sebagai tempat serba guna misalnya untuk mengadakan upacara, ceramah, kesenian dan sebagainya. Saat ini ruang serba guna belum difungsikan sebagaimana mestinya. Misalnya dengan lebih diefektifkannya penyuluhan-penyuluhan.
- e) Tempat Ibadah. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang terdapat satu ruangan yang berfungsi sebagai gereja. Ruangan ini berfungsi untuk menampung aktivitas keagamaan bagi narapidana anak. Secara fisik gedung ini cukup memadai, akan tetapi perlu ditingkatkan lagi baik secara kualitatif maupun kuantitatif mengenai program keagamaan.
- f) Rumah sakit. Saat ini di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang tidak mempunyai atau tidak terdapat Rumah Sakit Khusus atau Klinik, yang ada hanya satu ruangan yang dipergunakan untuk pelayanan medis bagi narapidana anak yang memerlukan pemeriksaan dan pengobatan.

## **2. Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo**

Untuk Jawa Tengah (Semarang), Rumah Penjara untuk Anak-anak Usia Muda, pertama adanya di Ambarawa, kemudian setelah dilakukannya pemekaran LPA, setelah pembangunan LPA Tangerang, maka di

Kutoardjo dibangun LPA untuk menggantikan posisi Rumah Penjara untuk Anak-anak Usia Muda, yang sebelumnya ada di Ambarawa.

memperhatikan bentuk dan fasilitas LPA Kutoardjo ini, dan memperbandingkannya dengan bentuk dan fasilitas yang terdapat di LPA Tangerang, sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu, maka dapat dikatakan tidak terdapat perbedaan. LPA Kutoardjo juga dibangun dalam bentuk kipas terbuka atau dalam bentuk lingkaran terbuka (*ring gebouw*). Yang membedakannya, adalah luas areal dan luas bangunan, serta kelengkapan fasilitas, dan pola penataan lokasi. Dimana untuk hal-hal ini, LPA Kutoardjo berada di bawah LPA Tangerang.

### **3. Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Plantungan**

Berbeda halnya dengan kedua LPA yang telah diuraikan di atas (Tangerang dan Kutoardjo), LPA Plantungan ini tidak berbentuk kipas terbuka ataupun bangunan setengah lingkaran yang tidak tertutup. Melainkan berbentuk bangunan rumah sakit. Kondisi ini terjadi dikarenakan Lembaga Pemasyarakatan (LP), melainkan merupakan bangunan yang dibangun untuk rumah sakit kusta, yang kemudian dalam perjalanannya mengalami peralihan fungsi ataupun kegunaan menjadi LP.

Walaupun bentuk bangunan LPA Plantungan ini tidak lazim untuk sebuah LPA, namun melihat posisi dan letaknya, maka dapat dikatakan bahwa untuk tujuan pembinaan anak-anak pidana, posisi LPA Plantungan yang berada di pinggiran kota, dengan kondisi alam yang relatif alamiah,

terkesan lebih baik dibandingkan dengan LPA Tangerang maupun LPA Kutoardjo.

Memperbandingkan kondisi, khususnya kelengkapan dari ketiga LPA yang menjadi objek penelitian ini, secara sederhana digambarkan dalam ragaan 1 berikut ini :

**RAGAN 1**  
**PERBANDINGAN KELENGKAPAN LPA YANG MENJADI**  
**LOKASI PENELITIAN**

NO	KELENGKAPAN LPA	ASAL LPA		
		Kutoardjo	Plantungan	Tangerang
1.	Ruang Administrasi	Ada	Ada	Ada
2.	Ruang Tinggal Napi Anak	Ada	Ada	Ada
3.	Ruang Makan	Ada	Ada	Ada
4.	Sel Disiplin	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
5.	Sel Orientasi	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
6.	Ruang Kunjungan	Ada	Ada	Ada
7.	Ruang Pembinaan	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
8.	Ruang Kelas (Pendidikan)	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
9.	Ruang Kerja	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
10.	Ruang Ekstrakurikuler	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
11.	Ruang Auditorium	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
12.	Ruang Ibadah	Ada	Ada	Ada
13.	Rumah Sakit	Tidak Ada	Ada	Ada

Sumber : Data Primer 1999

**B. Konstruksi Hukum Kinerja LPA dalam Kerangka Resosialisasi Napi Anak**

Uraian pada sub bab di atas, menunjukkan adanya perbedaan kondisi fisik dari ketiga LPA yang menjadi lokasi penelitian dari thesis ini. Namun bila kita menelusuri landasan yuridis yang menjadi dasar bagi kinerja LPA,

maka diperoleh jawaban bahwa secara umum landasan bagi kinerja (*performance*) LPA tersebut adalah sama, yaitu peraturan perundang-undangan yang secara substansial berisikan materi tentang kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak.

Bertitik tolak dari pemikiran di atas, maka dalam membicarakan konstruksi hukum kinerja LPA dalam kerangka resosialisasi napi anak, di samping hakikat dari resosialisasi yang terlebih dahulu harus dipahami (lihat kembali uraian pada Bab I dan Bab II), juga harus dipahami makna dari konstruksi hukum yang dimaksudkan. Hal ini dirasa perlu diketahui agar dalam penguraian terjadi kekeliruan maupun penyimpangan dari makna konstruksi hukum yang dimaksudkan.

Pengertian operasional dari konstruksi hukum kinerja LPA, adalah pengaturan kinerja LPA dalam peraturan perundang-undangan yang ada, dan menjadi dasar yuridis bagi LPA di dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawab yang diembannya. Oleh karenanya dalam penguraian konstruksi hukum yang dimaksudkan dipergunakan sudut pandangan sebagai berikut :

**Pertama**, adalah penguraian konstruksi hukum kinerja LPA yang disandarkan kepada sudut pandangan perlindungan hukum terhadap anak (*legal protect to the children*). Artinya, bahwa secara substansial peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan tersebut mengatur dan merumuskan tentang hak-hak anak, khususnya napi anak dan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang dimilikinya tersebut.



**Kedua,** adalah penguraian konstruksi hukum kinerja LPA yang disandarkan kepada pengaturan yuridis tentang fungsi, peran, dan tanggung jawab LPA. Beda halnya dengan poin satu, pada poin kedua ini, walaupun peraturan perundang-undangan tersebut tidak ada mengatur dan atau merumuskan tentang hak-hak anak, khususnya napi anak, akan tetapi merumuskan tentang landasan bagi kinerja LPA, maka peraturan perundang-undangan ini termasuk ataupun dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar yuridis bagi kinerja LPA.

Walaupun dari sudut pandangan landasan yuridis bagi kinerja LPA dapat dijelaskan, namun dalam penguraiannya tidak mungkin untuk mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan tersebut berdasarkan kedua sudut pandangan dimaksud. Hal ini dikarenakan kedua sudut pandangan tersebut secara umum terdapat di dalam setiap peraturan perundang-undangan yang ada.

Penguraian lebih terperinci terhadap konstruksi hukum pengaturan kinerja LPA di dalam melakukan pembinaan untuk tujuan resosialisasi napi anak berdasarkan kedua sudut pandangan di atas, tergambar dalam uraian beberapa peraturan perundang-undangan berikut ini.

1. Ordonansi tanggal 17 Desember 1925, tentang Peraturan Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam Bagi Wanita (Stb. Nomor : 647/1925).

Dalam Ordonansi 17 Desember 1925 dirumuskan tentang larangan-larangan untuk memperkerjakan anak di bawah umur 12 tahun, pada

tempat-tempat dan waktu sebagaimana dirumuskan pada Pasal 1 dan Pasal 2 Ordonansi 1925 tersebut, yang lengkapnya berbunyi :

Pasal 1  
(Diubah dengan Stb. Nomor : 8 Tahun 1948)

Anak di bawah umur dua belas tahun tidak boleh melakukan pekerjaan di dalam atau untuk keperluan suatu perusahaan antara jam delapan dan jam lima pagi.

Pasal 2

- (1) Anak di bawah umur dua belas tahun tidak boleh melakukan pekerjaan :
- a. Di pabrik, yaitu ruangan tertutup atau dianggap tertutup, dimana di dalam atau untuk keperluan suatu perusahaan dipergunakan suatu alat bertenaga mesin atau lebih ;
  - b. Di tempat kerja, yaitu ruangan dimana di dalam atau untuk keperluan suatu perusahaan biasanya dilakukan pekerjaan tangan oleh sepuluh orang atau lebih secara bersama-sama ;
  - c. Pada pembuatan, pemeliharaan, perbaikan, dan pembongkaran jalan tanah, penggalian, perairan, bangunan, dan jalan-jalan ;
  - d. Pada Perusahaan Kereta Api dan Term ;
  - e. Pada pembuatan, pembongkaran, dan pemindahan barang, baik di pelabuhan, dermaga dan galangan kapal maupun di stasiun, tempat pemberhentian dan tempat pembongkaran muatan, di tempat penyimpanan barang dan gudang, kecuali jika membawa dengan tangan.

Ordonansi 17 Desember 1925 tersebut, mengisyaratkan kepada LPA untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang berorientasi kepada peng-eksploitasian tenaga nabi anak, untuk tujuan dan pada tempat, serta dalam suasana kerja sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Ordonansi tersebut.

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950, tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah

UU. NO. 4 Tahun 1950, merumuskan tentang hak dari setiap anak, dalam hubungannya dengan perolehan pendidikan dan pengajaran, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10, yang lengkapnya berbunyi :

#### Pasal 10

- (1) Semua anak yang sudah berumur 6 (enam) tahun, berhak dan yang sudah berumur 8 (delapan) tahun diwajibkan belajar di sekolah, sedikit-dikitnya 6 tahun lamanya ;
- (2) Belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama, dianggap telah memenuhi kewajiban belajar, dan ;
- (3) Kewajiban belajar diatur dalam undang-undang.

Rumusan Pasal 10 di atas, memberikan amanah dan tanggung jawab kepada LPA untuk memperhatikan kondisi pendidikan anak pidana selama menjalani hukuman. Dalam arti, bahwa LPA mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan sekolah bagi anak-anak pidana, yang keberadaannya diakui oleh pemerintah ataupun negara.

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan anak (Lembaran Negara, 1979 Nomor 32)

Dalam UU. No. 4 Tahun 1979, dirumuskan tentang hak-hak anak dalam hubungannya dengan kesejahteraan, yaitu pada Bab II, yang antara lain tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut :

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus, untuk tubuh dan berkembang secara wajar ;
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna ;
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, dan ;
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhannya dengan wajar.

### Pasal 3

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.

### Pasal 4

- (1) Anak yang tidak mempunyai orang tua, berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### Pasal 5

- (1) Anak yang tidak mampu, berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### Pasal 6

- (1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan, yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- (2) Pelayanan dan asuhan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum, berdasarkan keputusan hakim.

### Pasal 7

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

### Pasal 8

Bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak, menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

### Pasal 9

Orang tua, adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

### Pasal 10

- (1) Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya sebagaimana termaksud dalam Pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anaknya, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang tua atau badan sebagai wali.
- (2) Pencabutan kuasa asuh dalam ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya.
- (3) Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim.
- (4) Pelaksanaan ketentuan ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### Pasal 11

- (1) Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi ;
- (2) Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat ;
- (3) Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat dilaksanakan di dalam maupun di luar panti ;
- (4) Pemerintah mengadakan pengarahan, bimbingan, bantuan, dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat ;
- (5) Pelaksanaan usaha kesejahteraan anak sebagai termaktub dalam ayat (1), (2), (3), dan (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### Pasal 12

- (1) Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak ;
- (2) Kepentingan kesejahteraan anak yang termaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah ;
- (3) Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak, yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

Kerjasama internasional di bidang kesejahteraan anak dilaksanakan oleh pemerintah atau oleh badan lain dengan persetujuan pemerintah.

Memperhatikan materi ataupun substansi dari UU. No. 4 Tahun 1979, dan memperbandingkannya dengan beberapa perundang-undangan yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa perbedaan, yaitu :

- a. Beberapa peraturan perundang-undangan yang terdahulu (poin a dan poin b) merumuskan tentang perlindungan hak-hak anak secara khusus. Sementara UU. No. 4 Tahun 1979, merumuskan konsep perlindungan hak-hak anak secara umum, dalam arti melibatkan beberapa aspek dari perlindungan anak, dan ;
- b. Bahwa peraturan perundang-undangan terdahulu (poin a dan poin b), hanya menekankan tanggung jawab perlindungan hak anak, hanya terhadap orang ataupun badan-badan tertentu, yang disesuaikan dengan karakteristik yang diatur oleh peraturan tersebut. Sedangkan penekanan perlindungan terhadap hak-hak anak yang terdapat di dalam UU. No. 4 Tahun 1979 ditujukan tidak bersifat khusus, melainkan sebaliknya ditujukan kepada keseluruhan komponen yang terikat kepada perlindungan terhadap hak-hak anak, seperti : orang tua, masyarakat, dan negara.

Bertitik tolak dari perumusan pasal-pasal UU. No. 4 Tahun 1974, sebagaimana dirumuskan di atas, maka resume dari hak-hak anak yang

patut mendapatkan perlindungan hukum (*legal protection*) dan perlindungan sosial (*social protection*), adalah sebagai berikut :

- a. Perlindungan terhadap hak anak untuk memperoleh kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar ;
- b. Perlindungan terhadap hak anak untuk memperoleh sarana dan prasarana dalam mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, secara baik dan berguna ;
- c. Perlindungan terhadap hak anak untuk mendapatkan pemeliharaan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, dan ;
- d. Perlindungan terhadap hak anak dari kondisi lingkungan yang dapat dimungkinkan menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar.

Satu hal perlu rasanya penulis tegaskan di sini, adalah bahwa hakikat perlindungan (*protection*) di sini jangan ditafsirkan hanya sebagai upaya untuk menjaga agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak (sebagaimana yang tertanam dalam pikiran sebagian orang), tetapi harus dipahami bahwa di dalam hakikat perlindungan tersebut terkandung makna "pemenuhan" ataupun "pemberian" segala sesuatu hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Jadi tidak hanya sekedar menjaga tanpa memberi, tetapi di samping menjaga hak napi anak juga memberikan apa yang memang menjadi hak napi anak, jadi adanya keseimbangan

diantara kebijakan di dalam melindungi hak-hak napi anak, dengan kebijakan yang ditujukan untuk memberikan apa yang menjadi hak napi anak dan merupakan kewajiban dari Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) untuk memenuhinya.

#### 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan

Memperhatikan identitas dari UU. No. 12 Tahun 1995 ini, yaitu "pemasyarakatan", maka dapat dikemukakan bahwa undang-undang ini merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang secara langsung berhubungan langsung dengan pembinaan napi anak. Pemikiran ini didasarkan kepada "bahwa penerapan UU. No. 12 Tahun 1995 tersebut dilakukan dalam dan oleh satu lembaga tempat napi anak berada, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA).

Beberapa ketentuan pasal dari UU. No. 12 Tahun 1995 tersebut yang dapat dikemukakan sebagai dasar acuan ataupun pedoman bagi LPA di dalam melakukan pembinaan untuk tujuan resosialisasi napi anak, adalah :

##### Bagian Menimbang Poin a

Bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insane dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.

##### Bagian Menimbang Poin c

Bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab.



### Pasal 1 butir 1

Pemasyarakatan, adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

### Pasal 1 butir 2

Sistem Pemasyarakatan, adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila, yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab.

### Pasal 2

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

### Pasal 3

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

### Pasal 5

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas :

- e. Pengayoman ;
- f. Persamaan perlakuan dan pelayanan ;
- g. Pendidikan ;
- h. Pembimbingan
- i. Penghormatan harkat dan martabat manusia ;
- j. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan ;
- k. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

### Pasal 12 ayat (1)

Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar :

- c. Umur ;
- d. Jenis kelamin ;
- e. Lama pidana yang dijatuhkan ;
- f. Jenis kejahatan, dan ;
- g. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

### Pasal 14 ayat (1)

Narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya ;
- b. Mendapat perawatan, hak perawatan rohani maupun jasmani ;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran ;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak ;
- e. Menyampaikan keluhan ;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang ;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan ;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang-orang tertentu lainnya,
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) ;
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga ;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat ;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan ;
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 20

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Pidana di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. Umur ;
- b. Jenis kelamin ;
- c. Lama pidana yang dijatuhkan ;
- d. Jenis kejahatan, dan ;
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

### Pasal 27

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Negara di LAPAS Anak dilakukan penggolongan tas dasar :

- a. Umur ;
- b. Jenis kelamin ;
- c. Lama pidana yang dijatuhkan, dan ;
- d. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

### Pasal 43

Dalam hal bimbingan Anak Negara diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial dan anak yang diserahkan kepada orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, d, dan e, maka BAPAS melaksanakan :

- a. Pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang tua agar kewajiban sebagai pengaruh dapat dipenuhi.
- b. Pemantauan terhadap perkembangan Anak Negara dan Anak Sipil yang diasuh.

### Pasal 49

Pegawai Pemasyarakatan dilengkapi dengan sarana dan prasarana lain sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dilatarbelakangi oleh keadaan ataupun eksistensi dari UU. No. 12 Tahun 1995, sebagai peraturan perundang-undangan yang secara langsung berkaitan dengan pengaturan kinerja (*performance*) Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA), oleh karenanya wajar di dalam UU. No. 12 Tahun 1995 tersebut terdapat ketentuan-ketentuan pasal yang memberikan kewenangan kepada suatu badan atau lembaga untuk melakukan tugas pengawasan terhadap kinerja LPA yang dimaksudkan.

Adapun nama badan yang dimaksudkan, adalah **Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan,**

yang di dalam UU. No. 12 Tahun 1995 diatur dan dirumuskan dalam Bab IV, yakni pada pasal 45, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Menteri membentuk Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan.
- (2) Balai Pertimbangan Pemasarakatan bertugas memberi saran dan atau pertimbangan kepada Menteri.
- (3) Balai Pertimbangan Pemasarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari para ahli di bidang Pemasarakatan yang merupakan wakil instansi pemerintah terkait, badan non pemerintah dan perorangan lainnya.
- (4) Tim Pengamat Pemasarakatan yang terdiri dari pejabat-pejabat LAPAS, BAPAS, atau pejabat terkait lainnya, bertugas :
  - a. Memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasarakatan ;
  - b. Membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan, dan ;
  - c. . Menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasarakatan.
- (5) Pembentukan, susunan, dan tata kerja Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Memperhatikan rumusan pasal tentang Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan di atas, selanjutnya dapat dikemukakan bahwa peranan Balai Pertimbangan dan Tim Pengamat Pemasarakatan tersebut, dalam hubungannya dengan kinerja LPA, adalah terbatas pada peranan administrasi. Dalam arti, bahwa Balai Pertimbangan dan Tim Pengamat Pemasarakatan, hanya dapat menyarankan dan menerima keluhan, akan tetapi tidak dapat mengambil tindakan atas keluhan yang diterimanya dari napi anak.

## 5. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Berbeda halnya dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang disebutkan terdahulu, KUHP secara substansial secara khusus memfokuskan terhadap perlindungan anak-anak yang sudah terlanjur melakukan tindak pidana, yang kemudian menempatkan anak sebagai obyek dari penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*). Di samping itu KUHP juga memberikan perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban (*victim*) dari suatu tindak pidana tertentu, dengan jalan memberikan pidana (*poena*) kepada si pelaku (*offender*). Hal yang disebutkan terakhir ini dapat dilihat dari perumusan pasal-pasal, seperti : Pasal 287, 289, 290, 291, 294, 295, 297, 328, 329, 330, 331, dan Pasal 332 KUHP.

Sementara terhadap anak yang terlanjur melakukan tindak pidana, perlindungan terhadapnya di dalam KUHP dapat dilihat dari rumusan pasal-pasal sebagai berikut :

### Pasal 45

Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharaannya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan Pasal 540, dan perbuatan itu dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesuatu kejahatan, atau menghukum anak yang bersalah itu.

### Pasal 46

- (1) Jika hakim memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah, maka ia : baik ditempatkan dalam rumah pendidikan negeri, supaya di situ atau dikemudian dengan cara lain, ia mendapat pendidikan dari pihak pemerintah, baik diserahkan kepada orang-orang yang ada di negara Indonesia atau kepada perserikatan yang mempunyai hak badan hukum (*rechtperson*) yang ada di negara Indonesia, supaya di situ mendapat pendidikan dari mereka atau kemudian dengan cara lain, dari pemerintah dalam ke dua itu, selamanya sampai cukup delapan belas tahun.

Memperbandingkan format perlindungan terhadap anak-anak yang terlanjur melakukan tindak pidana (baca juga : napi anak) khususnya dan napi pada umumnya, yang dirumuskan di dalam KUHP dengan Rancangan KUHP (RKUHP) 1997-1998, terdapat beberapa perbedaan, diantaranya adalah “bahwa KUHP tidak ada merumuskan secara eksplisit melalui pasal-pasal tentang pedoman perlindungan terhadap napi anak, akan tetapi di dalam RKUHP 1997-1998, kita temukan secara eksplisit pasal-pasal yang merumuskan pedoman perlakuan terhadap napi anak, seperti :

### Pasal 117 RKUHP

- (1) Pelaksanaan pidana kerja sosial untuk anak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) dan ayat (6).
- (2) Jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah, maka untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial itu.

### Pasal 118 RKUHP

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, 79, dan Pasal 80 berlaku juga terhadap pidana pengawasan anak.

### Pasal 119 RKUHP

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 berlaku juga untuk pidana denda bagi anak.

## Pasal 120 RKUHP

- (1) Pidana denda bagi anak hanya dapat dijatuhkan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 16 (enam belas) tahun.
- (2) Pidana denda yang dijatuhkan terhadap anak, paling banyak  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum pidana denda yang diancamkan terhadap orang dewasa.

## Pasal 121 RKUHP

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- (3) Minimum khusus pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) tidak berlaku terhadap anak.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) (3) (4), Pasal 70, 71, 72, 73, 74, 75, dan Pasal 76, berlaku juga sepanjang dapat diberlakukan terhadap pidana pembatasan kebebasan terhadap anak.

## Pasal 122 RKUHP

- (1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat latihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.
- (2) Jika keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat, maka dikenakan pidana pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.
- (3) Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak dilaksanakan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Setelah anak menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari lamanya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan berkelakuan baik, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

## Pasal 123 RKUHP

- (1) Pidana penjara bagi anak dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.
- (2) Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

## Pasal 126 RKUHP

- (1) Setiap anak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dapat dikenakan tindakan :
  - a. Perawatan di rumah sakit jiwa ;
  - b. Penyerahan kepada pemerintah, atau ;
  - c. Penyerahan kepada negara.
- (2) Tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak tanpa menjatuhkan pidana pokok, adalah :
  - a. Pengembalian kepada orang tua, wali, atau pengasuhnya ;
  - b. Penyerahan kepada pemerintah ;
  - c. Penyerahan kepada seseorang ;
  - d. Keharusan mengikuti sesuatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau sesuatu badan swasta ;
  - e. Pencabutan surat izin mengemudi ;
  - f. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana ;
  - g. Perbaikan akibat dari tindak pidana ;
  - h. Rehabilitas, dan atau ;
  - i. Perawatan di lembaga.

Substansi peraturan perundang-undangan, sebagaimana dikemukakan di atas menunjukkan, bahwa LPA tidak kekurangan landasan yuridis di dalam menjalankan fungsi, tugas, dan atau tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Namun praktik (realitas phenomena) yang ada menunjukkan hal yang sebaliknya, dimana LPA seolah-olah minim dalam peraturan perundang-undangan yang melandasi kinerjanya.

Apa yang dikemukakan terakhir di atas, digambarkan oleh kinerja LPA yang cenderung hanya mempergunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan keberadaannya, seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan peradilan anak (*children justice*). Kondisi sedemikian ini terjadi, tidak terlepas dari kualitas profesionalitas aparat LPA yang hanya memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan prosedur peradilan pidana



terhadap anak (*criminal justice procedure for children*) dan menganggap bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak, namun berada atau “tidak berkaitan” dengan ruang lingkup peradilan anak, tidak perlu untuk pedoman pembinaan napi anak.

Bias dari kondisi yang dipaparkan di atas, adalah munculnya kekakuan dan sifat monoton dari aktivitas pembinaan napi anak yang dilakukan napi anak, yang selanjutnya membuat napi anak merasa bosan, jenuh, dan tidak dapat mengambil manfaat atau hikmah dari proses pembinaan yang diberikan kepadanya di LPA.

Di samping konstruksi hukum yang bersifat nasional sebagaimana diuraikan di atas, juga terdapat peraturan perundang-undangan yang bersifat internasional, yang secara universal berlaku sebagai dasar dalam melakukan pembinaan terhadap napi anak. Diantara peraturan perundang-undangan tersebut, adalah :<sup>90</sup>

- a. *The United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)* ;
- b. *The United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, dan ;
- c. *The United Nations for the Protection of Juvenile Deprived of Liberty*.

Bagaimana pengaturan pembinaan napi anak, berdasarkan ketiga produk peraturan perundang-undangan internasional tersebut secara rinci dan sistematis didasarkan sebagai berikut :

<sup>90</sup> Paulus Hadisaprapto, *Juvenile Delinquency; Pemahaman dan Penanggulangannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal., 101.

a. *The United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency*

*The United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency* atau yang disebut juga dengan *The Riyadh Guidelines*, dicantumkan dalam resolusi PBB 45/112, tanggal 14 Desember 1990. Secara substansial Resolusi PBB 45/112 ini terdiri dari 66 butir ketentuan yang menjadi dasar ataupun pedoman pencegahan "*Juvenile Delinquency*" dan "*young crimes*".<sup>91</sup>

Walaupun secara substansial, judul dan tujuan dari resolusi 45/112 tersebut adalah pencegahan terjadinya kejahatan anak dan kejahatan orang muda. Namun bukan berarti resolusi ini tidak mempunyai ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan dasar bagi pembinaan napi anak.

Beberapa ketentuan dari resolusi tersebut, yang dapat dijadikan dasar bagi pembinaan napi anak, adalah :<sup>92</sup>

1. Pengembangan sikap non-kriminogen di kalangan anak dan masyarakat perlu dilakukan, dengan cara mendayagunakan undang-undang, aktivitas sosial yang bermanfaat, meningkatkan pendekatan manusiawi terhadap segala aspek kehidupan kemasyarakatan, termasuk memperhatikan dan memperlakukan anak dan remaja secara manusiawi (Rumusan ini memberikan gambaran bahwa pola pembinaan terhadap napi anak, hendaknya didasarkan kepada :

<sup>91</sup> Paulus Hadisuprpto, *Makalah pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi*, Fakultas Hukum-UNDIP, Semarang, 1995, hal., 13.

<sup>92</sup> Lihat Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency : Pemahaman dan Penanggulangannya*, Op.Cit., hal., 105.

- a) Peraturan perundang-undangan yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan, dan ;
  - b) Pendekatan yang didasarkan kepada nilai-nilai kemanusiaan).
2. Mengusahakan terjaminnya perkembangan usia muda secara harmonis demi terlangsungnya pertumbuhan personalitas anak sejak usia dini, anak dan remaja tidak harus dijadikan objek pengawasan dan sosialisasi. Dalam hal ini termasuk juga pemahaman bahwa anak dan remaja yang melakukan perbuatan pelanggaran ringan, tidak harus direaksi dengan pengkriminalisasian dan penghukuman (ketentuan ini mengisyaratkan untuk tidak cepat-cepat memberikan label penjahat dan penghukuman terhadap anak yang telah melakukan kejahatan. Oleh karenanya diperlukan adanya pedoman yuridis untuk klasifikasi tindakan anak sebagai kejahatan atau tidak).
3. Peraturan perundang-undangan yang disusun untuk melakukan dan mendukung suatu kebijakan, hendaknya mengandung aturan-aturan pencegahan viktimisasi, penyalahgunaan, pemerasan, pemanfaatan anak dalam tindak kejahatan, penyalahgunaan dan peredaran obat bius dan ada ketentuan tentang kriteria-kriteria penempatan anak dalam penjara rumah hukuman, atau hukuman sekolahan (unsur terpenting dalam ketentuan ini, adalah upaya untuk tidak menempatkan napi anak sebagai korban dalam proses pembinaan dirinya di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA).

4. Erat kaitannya dengan penafsiran dan pengimplementasian ketentuan yang terdapat di dalam resolusi ini, adalah perlunya diadakan pelatihan-pelatihan terhadap aparat penegak hukum, sehingga aparat memahami betul dunia anak dan remaja, di samping itu dibentuk pula lembaga *ombudsman* yang independen, untuk mengawasi pengimplementasian ketentuan yang tertuang dalam resolusi ini (ketentuan ini difokuskan kepada pembinaan profesionalisme aparat LPA, dan dari ketentuan ini dapat diambil dasar, bahwa aparat LPA harus direkrut dari basik keilmuan yang multidisipliner).
- b. *The United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice.*

Pokok-pokok pikiran yang terdapat di dalam *The United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMR-H 1985)* atau yang sering juga disebut dengan "*Beijing Rules*", sehubungan dengan tujuan dan dasar pemikiran pengutamaan kesejahteraan anak (termasuk juga kesejahteraan napi anak), antara lain adalah :

- 1) Pokok pikiran tentang kesejahteraan anak

Sehubungan dengan pokok pikiran ini rule 5.1, *Aims of Juvenile Justice* merumuskan : "*The juvenile justice system emphasize the well being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstance of both the offender and the offence.*"<sup>93</sup>

<sup>93</sup> Lihat Muladi & Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal., 12.

Bertitik tolak dari rumusan dan penjelasan (*commentary*) Rule 5.1. tersebut Barda Nawawi Arif dan Muladi mengemukakan adanya dua tujuan pokok dari urgennya pengaturan kesejahteraan anak, ini yaitu :<sup>94</sup>

- a) Memajukan kesejahteraan anak (*the promotion of the well being of the juvenile*), dan ;
- b) Proporsionalitas (*the principle of proportionality*).

Dalam hubungannya dengan kinerja (*performance*) LPA, maka berdasarkan poin (a) di atas, kinerja dan kebijakan yang ditentukan maupun diterapkan oleh LPA tidaklah harus merupakan kebijakan untuk melaksanakan sifat pidana ataupun hukuman yang telah diputuskan oleh pengadilan (baca juga : hakim), tetapi haruslah berorientasi ataupun menunjang kepada upaya-upaya mewujudkan kesejahteraan nabi anak.

## 2) Pokok pikiran yang berorientasi kepada kebijakan

Terhadap poin ini Paulus Hadisuprpto mengemukakan beberapa orientasi kebijakan yang terdapat di dalam *Beijing Rules* (SMK-JJ) tersebut, yaitu:<sup>95</sup>

- a) Kebijakan sosial yang bersifat komprehensif dalam mewujudkan kesejahteraan anak. Tujuan dari hal ini, adalah :
  - (1) Mengulangi keterlibatan dan campur tangan (intervensi) SPP ;

<sup>94</sup> Ibid., hal. 112

<sup>95</sup> Lihat Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency : Pemahaman dan Penanggulangannya*, hal., 113.

- (2) Menumbuhkan sikap perhatian terhadap napi anak, dan ;
- (3) Perlindungan napi anak dari bias penghukuman yang diberikan
- b) Kebijakan yang diarahkan untuk mengklasifikasikan jenis dan atau bentuk kejahatan yang dilakukan napi anak dan pola pembinaan yang akan diberikan juga disesuaikan dengan klasifikasi jenis dan atau bentuk kejahatan yang dilakukan.
- c) Kebijakan yang integralistik bahwa pola pembinaan napi anak, merupakan satu kesatuan sistem dalam mewujudkan perlindungan terhadap napi anak.
- d) Melibatkan lembaga-lembaga di luar sub sistem peradilan pidana dalam merealisasikan kebijakan pembinaan, seperti : *parole*, *probation*, dan lembaga kesejahteraan anak lainnya, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Apa yang dikemukakan oleh poin ini, merupakan salah satu poin yang dibicarakan dalam *The Prevention and Treatment on Juvenile Delinquency Trough Community Participation* yang diadakan di Beijing (1988), yang pinters pokoknya, adalah :<sup>96</sup>
- (1) Sampai seberapa jauh masyarakat dilibatkan dalam pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh anak, dan ;

<sup>96</sup> Dalam seminar *The Prevention and Treatment on Juvenile Delinquency Trough Community Participation* tersebut, Indonesia diwakili oleh Adi Andoyo Sutjipto. Lihat Adi Andoyo Sutjipto, *Laporan Seminar Internasional on Prevention and Treatment of Juvenile Delinquency Trough Community Participation*, Beijing, 19-24 Oktober 1988, hal.,3.

(2) Peninjauan kembali terhadap *United Nations Standard Minimum Roles for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)*.

Mendasarkan kepada dua konvensi internasional di atas, maka wajar adanya bila sebelumnya, di dalam konvensi hak-hak anak dituangkan prinsip-prinsip dasar sehubungan dengan *legal protection for the child*, yang harus diikuti oleh negara-negara yang menganggap perlindungan terhadap anak merupakan hal yang penting.

Prinsip-prinsip dasar yang terdapat di dalam konvensi hak-hak anak tersebut harus diwujudkan atau dituangkan ke dalam produk-produk kebijakan yang akan diambil dan ditetapkan. Diantara prinsip-prinsip dasar dimaksud, sebagaimana diuraikan berikut ini.<sup>97</sup>

a. Article 2

2.1

*States parties shall respect and ensure the rights set forth in the present convention to each child within their jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective of the child's or his or her parent's or legal guardians race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national ethnic, or social origin, property, disability, birth or other status.* (Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini, terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal-usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat kelahiran, atau status lain dari anak atau walinya yang sah menurut hukum).

2.2

*States parties shall all appropriate measures to ensue that the child is protected against all forms of discrimination or punishment on the basis of*

<sup>97</sup> Convention on the rights of the Child, United Nations Children's Fund, hal., 7.

*the status, activities, expressed opinions, or belief of the child's parents, legal guardians, or family members. (Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikukuhkan atau kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya).*

b. Article 3

3. 1

*In all action concerning children, whether under taken by public or private social welfare institutions courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interest of the child shall be a primary consideration. (Dalam semua tindakan yang menyangkut anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislative, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama.*

3. 2

*States parties undertake to ensure the child such protection and care as is necessary for his or her well being, taking into account the rights and duties of his or her parents, legal guardians, or other individuals legally responsible for him or her, and, to this end, shall take all appropriate legislative and administrative measure. (Negara-negara peserta berupaya untuk menjamin adanya perlindungan dan perawatan sedemikian rupa yang diperlukan untuk kesejahteraan anak, dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua anak, walinya yang sah, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak yang bersangkutan, dan untuk maksud ini, akan mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang layak.*

3.3

*States parties shall ensure that the institutions, services and facilities responsible for the care or protection of children shall conform with the standards established by competent authorities, particularly in the areas of safety, health, in the number and suitability of their staff, as well as competent supervision". (Negara-negara peserta akan menjamin bahwa lembaga-lembaga, instansi-instansi dan fasilitas-fasilitas yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perlindungan anak, akan menyesuaikan diri dengan norma-norma yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, terutama dalam bidang keselamatan, kesehatan, baik dalam jumlah maupun petugas yang sesuai, jumlah dan keserasian petugas mereka, begitu pula pengawasan yang berwenang).*



## c. Article 6

## 6.1

*States parties recognize that every child has the inherent right to life.* (Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang merupakan kodrat hidup).

## 6.2

*States parties shall ensure to the maximum extent possible the survival and development of the child.* (Negara-negara peserta semaksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan anak).

## d. Article 7

## 7.1

*The child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the rights to acquire a nationality and as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents.* (Anak akan didaftarkan segera setelah kelahiran dan sejak lahir berhak atas sebuah nama, berhak memperoleh kewarganegaraan, dan sejauh memungkinkan berhak mengetahui dan dipelihara oleh orang tuanya).

## e. Article 11

## 11.1

*State parties shall take measure to combat the illicit transfer and non-return of children abroad.* (Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah untuk memberantas penyerahan anak ke luar negeri yang dilakukan secara gelap dan yang tidak dapat kembali).

## f. Article 12

## 12.1

*States parties shall assure to the child who is capable of forming his or her own views the right to express these views freely in all matters affecting the child, the views of the child being given due weight in accordance with the age and maturity of the child.* (Negara-negara peserta akan menjamin anak-anak yang mampu membentuk pandangannya sendiri, bahwa mereka mempunyai hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas).

dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan anak dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan anak).

## 12.2

*For the purpose, the child shall in particularly be provided the opportunity to be heard in any judicial and administrative proceedings affecting the child, either directly or through a representative or an appropriate body, in a manner consistent with the procedural rules of national law.* (Untuk tujuan ini, anak secara khusus akan diberi kesempatan untuk didengar dalam setiap proses peradilan dan administrative yang mempengaruhi anak, baik secara langsung, atau melalui suatu perwakilan atau badan yang tepat, dengan cara yang sesuai dengan hukum acara nasional).

### g. Article 14

## 14.1

*States parties shall respect the right of the child to freedom of thought, conference and religion.* (Negara-negara peserta akan menghormati hak anak atas kemerdekaan berpikir, hati nurani dan beragama).

### h. Article 15

## 15.1

*States parties recognize the rights of the child to freedom of association and to freedom of peaceful assembly.* (Negara-negara peserta mengakui hak anak atas kemerdekaan berserikat dan kemerdekaan berkumpul dengan damai).

### i. Article 23

## 23.1

*States parties recognize that a mentally or physically disabled child should enjoy a full and decent life, in conditions which ensure dignity, promise self-reliance and facilitate the child's active participation in the community.* (Negara-negara peserta mengakui bahwa anak yang cacat fisik dan mental hendaknya menikmati kehidupan penuh dan layak, dalam keadaan yang menjamin martabat, meningkatkan percaya diri dan mempermudah peran serta aktif anak dalam masyarakat).

## j. Article 24

## 24.1

*States parties recognize the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health and to facilities for the treatment of illness and rehabilitation of health states parties shall shive to ensure that no child is deprived of this or her right of access to such health care services.* (Negara-negara peserta mengakui hak-hak anak untuk menikmati norma kesehatan tertinggi yang bisa dicapai dan fasilitas perawatan sakit dan pemulihan kesehatan. Negara-negara peserta akan berusaha keras untuk menjamin bahwa tidak seorang anakpun yang akan dirampas haknya untuk memperoleh pelayanan perawatan kesehatan.

## k. Article 25

## 25.1

*States parties recognize the right of the child who has been placed by the competent authorities for the purposes of care, protection or treatment of his or her physical or mental health to a periodic review of the treatment provided to the child and all other circum stances relevant to his or her placement.* (Negara-negara peserta mengakui hak anak yang ditempatkan oleh penguasa yang berwenang untuk tujuan pemeliharaan, perlindungan atau perawatan kesehatan rohani dan jasmaninya yang ditinjau secara berkala, yang diberikan kepada anak yang bersangkutan dan semua keadaan lain yang terkait dengan penempatannya itu).

## l. Article 28

## 28.1

*States parties recognize the right of the child to education, and with a view to achieving this right progressively and on the basis of equal opportunity.* (Negara-negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan dengan tujuan mencapai hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama).

## m. Article 32

## 32.1

*States parties recognize the right of the child to be protected from economic exploitation and from performing any work that is likely to be hazardous or to interfere with be child's education or to be harmful to the child's health or physical, mental, moral, spiritual, moral, or social*

*development.* (Negara-negara peserta mengakui hak anak untuk dilindungi terhadap eksploitasi ekonomi dan terhadap pelaksanaan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan atau merugikan kesehatan anak atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, atau sosial anak).

n. Article 33

33.1

*States parties shall take all appropriate measures, including legislative, administrative, social, and educational measures to protect children from illicit use of narcotic drugs and psychotropic substances and defined in the relevant international treaties, and to prevent the use of children in the illicit production and trafficking of such substance.* (Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah yang layak, termasuk langkah-langkah legislative, administrative, sosial dan pendidikan guna melindungi anak dari pemakaian obat-obat narkotik secara gelap dan zat-zat psikotropis seperti yang ditetapkan dalam perjanjian-perjanjian internasional yang relevan dan guna mencegah penggunaan anak dalam pembuatan dan pengedaran secara gelap zat-zat seperti itu).

o. Article 34

34.1

*States parties undertake to protect the child from all forms of sexual exploitation and sexual abuse.* (Negara-negara peserta berusaha untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual).

p. Article 37

37.1

(a) *No child be subjected to torture or other cruel, in human or degrading treatment or punishment. Neither capital punishment nor life imprisonment without possibility of release shall be imposed for offences committed by person below eighteen years of age.* (Tak seorang anakpun boleh menjalani siksaan atau perlakuan yang kejam, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat. Hukuman mati dan hukuman seumur hidup tidak akan dijatuhkan tanpa kemungkinan pembebasan untuk kejahatan yang dilakukan oleh anak (Pasal 1 ayat 1)).

- (b) *No child shall be deprived of his or her liberty unlawful or arbitrakily. Th arrest, detention or imprisonment of a child shall be in conformity which the law and shall be used only as a measure of last resort and for the shortes appropriate periode of time.* (Tidak seorang anakpun akan dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau penghukuman seorang anak harus sesuai dengan hukum dan harus diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang paling pendek).
- (c) *Every child deprived of liberty shall be treated with humanity and respect of inherent dignity of the human person, and in a manner which takes into account the needs of persons of his or her age. In particular, every child deprived of liberty shall be separated forms adult unless it considered in the child's best interest not to do so and shall have the right to maintain contact with his or her family through correspondence and visits, save in exceptional circumstances".* (Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat kemanusiaannya dan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan orang seusianya. Khususnya setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisahkan dari orang-orang dewasa kecuali bila dianggap bahwa tidak melakukan hal ini merupakan kepentingan terbaik dari anak yang bersangkutan dan ia berhak untuk mengadakan hubungan dengan keluarganya melalui surat menyurat atau kunjungan-kunjungan, aman dalam keadaan-keadaan khusus).
- (d) *Every child deprived of his or her liberty shall have the right to prompt access to legal and other appropriate assistance, as well as the rights to challenge the legality of the deprivation of his or her liberty before a court or other competent, independent and impartial authority, and to prompt decision on any such action.* (Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak dan juga berhak untuk menggugat keabsahan perampasan kemerdekaan itu di depan pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, dan independen dan tidak memihak, dan berhak atas suatu keputusan yang cepat mengenai hal tersebut).

q. Article 40

40.1

*State parties recognize the right of every child alleged as, accused of, or recognized as having infringed the penal law to be treated in a manner consistent with the promotion of the child's sense of dignity and worth, which reinforces the child's respect for the human rights and fundamental freedoms of other and which take a into account the child's age and the*

*desirability or promoting the child's reintegration and the child's assuming a constructive role in society.* (Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara yang sesuai peningkatan martabat dan nilai anak, yang memperkuat penghargaan anak pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar dari orang lain dengan memperhatikan usia anak dan hasrat untuk meningkatkan penyatuan kembali/reintegrasi anak dan peningkatan peran yang konstruktif dari anak dalam masyarakat).

#### 40.2

To this card, and having regard to relevant provisions of international instrument, States Parties shall, in particular ensure that. (Untuk tujuan ini dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dari perangkat-perangkat internasional yang relevan, negara-negara peserta khususnya menjamin bahwa) :

- (a) *No child shall be alleged as, be accused of, or recognized as having infringed the penal law by reason of acts or omissions that were not prohibited by national or international law at the time they were committed.* (Tak seorang anakpun akan disangka sebagai, atau dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana karena tindakan-tindakan atau kelainan-kelainan yang tidak dilarang oleh hukum nasional atau hukum internasional pada saat tindakan itu dilakukan).
- (b) *Every child alleged as or accused of having infringed the penal law has at least the following guarantees* (Setiap anak yang disangka atau dituduh sebagai atau dituduh telah melanggar undang-undang hukum pidana setidaknya memiliki jaminan-jaminan sebagai berikut) :
  - (i) *To be presumed innocent until proven guilty according to law;* (Dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan bersalah menurut hukum).
  - (ii) *To be informed promptly and directly of the charges against him or her, and, if appropriate, through his or her parents or legal guardians, and to have legal or other appropriate defence ;* (Secepatnya dan secara langsung diberitahu tuduhan-tuduhan terhadapnya, dan jika layak, melalui orang tua anak atau walinya yang sah, dan untuk memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain dalam mempersiapkan dan pengajuan pembelaannya) ;
  - (iii) *To have the matter determined without delay by a competent, independent and impartial authority of judicial body in a fair*

*hearing according to law, in the presence of legal or other appropriate assistance and, unless it is considered not to be in the best interest of the child, in particular, taking into account his or her age or situation, his or her parents or legal guardians ;* (Memeriksa masalah tersebut tanpa penundaan oleh penguasa yang berwenang, independen, dan tidak memihak atau oleh badan pengadilan dalam suatu pemeriksaan yang adil sesuai dengan undang-undang, adanya bantuan hukum, atau bantuan lainnya yang layak, dan kecuali jika dianggap bukan kepentingan terbaik dari anak, khususnya dengan memperhatikan usia atau situasi anak, orang tua dan walinya yang sah).

- (iv) *Not to be compelled to give testimony or to confess guilt; to examine or have examined adverse witnesses on his or her behalf under conditions of equality;* (Tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian, untuk mengakui kesalahan, untuk memeriksa atau menyuruh memeriksa saksi-saksi yang merugikan dan untuk memperoleh peran serta dalam pemeriksaan saksi-saksi untuk kepentingan anak yang didasarkan pada ketentuan persamaan hak).
- (v) *If considered to have infringed the penal law. To have decision and any measure imposed in consequence thereof reviewed by higher competent, independent and impartial authority or judicial body according to law ;* (Jika dianggap telah melanggar undang-undang hukum pidana, keputusan dan setiap tindakan yang dikenakan sebagai akibat daripadanya dapat ditinjau kembali oleh penguasa yang lebih tinggi yang berwenang, independen dan tidak memihak atau oleh badan peradilan sesuai undang-undang);
- (vi) *To have the free assistance of an interpreter if the child can not understand or speak the language used;* (memperoleh bantuan cuma-cuma dari juru bahasa jika anak tidak dapat memahami atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan);
- (vii) *To have his or her privacy fully respected at all states of the proceedings.* (Menghormati sepenuhnya kepribadian anak dalam semua tingkatan proses peradilan).

#### 40.3

*States parties shall seek to promote the establishment of law, procedures, authorities and institutions specifically applicable to children alleged as, accused of or recognized as having infringed the penal law, and in particular* (Negara-negara peserta akan meningkatkan pembuatan undang-undang, proses peradilan, kekuasaan dan lembaga-lembaga yang secara

khusus berlaku untuk anak-anak, yang diduga akan dituduh, atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana, dan khususnya);

- (a) *The establishment of a minimum age below which children shall be presumed not to have capacity to infringe the penal law* (penetapan usia minimum dimana usia di bawahnya dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar undang-undang hukum pidana);
- (b) *Whenever appropriate and desirable, measures for dealing with such without resorting to judicial proceedings, providing that human rights and legal safeguards are fully respected* (Bilamana layak dan diinginkan, langkah-langkah untuk menangani anak-anak seperti itu tanpa harus menempuh tuntutan hukum, asal saja hak-hak asasi manusia dan pengamanan dari segi hukum sepenuhnya dihormati).

#### 40.4

*A variety dispositions, such as care, guidance and supervision orders; counseling ; probation ; foster care ; education and vocational training programs and other alternatives to institutional care shall be available to ensure that children are dealt with in a manner appropriate to their well being and proportionate both to their circumstances and the offence* (Berbagai pengaturan, seperti pemeliharaan, bimbingan, dan pengaturan pengawasan, pemberian nasehat, masa percobaan, pemeliharaan anak angkat akan ditangani dengan cara yang layak bagi kehidupan mereka seimbang baik dengan keadaan mereka maupun pelanggaran yang dilakukan).

### C. Pola Pembinaan Napi Anak oleh LPA

Pola pembinaan narapidana dan anak didik ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada dalam pemasyarakatan/rutan (*Intramural treatment*) dan bimbingan klien ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para klien pemasyarakatan di luar tembok (*ekstra moral treatment*).

Proses pembinaan narapidana yang sering pula disebut "therapeutic process", maka jelas bahwa membina narapidana sama artinya dengan menyembuhkan seseorang yang sementara tersesat hidupnya karena adanya



kelemahan-kelemahan yang dimilikinya. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut maka dapat ditempuh dengan beberapa pendekatan, antara lain dengan membuat "kode perilaku" dalam lembaga secara umum pembinaan narapidana bertujuan agar dapat menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan :

- a. Memantapkan iman (ketahanan mental) mereka ;
- b. Membina mereka agar mampu integrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam lembaga pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

Sedangkan secara khusus pembinaan narapidana bertujuan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa pidananya :

- a. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya ;
- b. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal ketrampilan untuk bekal hidup sendiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional ;
- c. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilaku yang tertib disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial ;
- d. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

Bahwa pemasyarakatan artinya bukan saja karena ia merupakan sarana untuk membina narapidana dan tahanan sebagai manusia pembangunan guna

meningkatkan kemampuan hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat kelak, tetapi dengan diberikannya juga pendidikan kesadaran bernegara termasuk untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban, maka pemasyarakatan merupakan juga cara pendidikan dan pembangunan, dengan demikian lembaga pemasyarakatan juga merupakan lembaga pendidikan dan lembaga pembangunan. Dengan ciri-ciri tersebut maka lembaga pemasyarakatan bukan saja sudah harus berubah dalam pola pembinaannya yang dilakukan tapi juga sudah harus merubah orientasinya dari lembaga konsumsif menjadi lembaga produktif. Untuk mendukung kebutuhan orientasi baru ini, maka sudah pada tempatnya kalau semua jajaran pemasyarakatan mampu menangkap perubahan orientasi tersebut dan menjabarkannya dalam kegiatan pembinaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan dijelaskan bahwa ; di dalam melaksanakan pembinaan di lembaga pemasyarakatan, rutan terdapat faktor-faktor yang perlu mendapat perhatian karena dapat berfungsi sebagai faktor pendukung dan dapat pula menjadi faktor penghambat, sehingga harus dicari solusinya agar pembinaan dapat berjalan dengan baik.

Metode pembinaan meliputi :

- a. Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara yang dibina dengan yang dibina (warga binaan pemasyarakatan).
- b. Pembinaan bersifat persuasif edukatif yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantara sesama mereka sehingga mampu mencegah hatinya untuk melakukan hal-hal yang terpuji, menempatkan warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia yang

memiliki potensi dan memiliki harga diri dengan hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia lainnya.

- c. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis.
- d. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi.
- e. Pendekatan individual dan kelompok.
- f. Dalam rangka menumbuhkan rasa kesungguhan, keikhlasan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas serta menanamkan kesetiaan, ketaatan, dan keteladanan di dalam pengabdianya terhadap negara, hukum dan masyarakat, para petugas dalam jajaran pemasyarakatan perlu memiliki kode perilaku yang dirumuskan dalam "etos kerja".

Dalam pelaksanaan, bahwa pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan disesuaikan dengan azas-azas yang terkandung dalam Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Standar Minimum Rules (SMR) yang tercermin dalam 10 (sepuluh) prinsip. Pada dasarnya ruang lingkup pembinaan dan bimbingan yang dilakukan oleh petugas ialah memperbaiki tingkah laku warga binaan masyarakat agar tujuan pembinaan tercapai.

Berbicara mengenai sarana peraturan perundang-undangan khususnya yang menyangkut pembinaan narapidana anak, maka belum melihat secara maksimal pembedaan secara konseptual antara pembinaan narapidana anak dengan narapidana dewasa. Sebagai landasan hukum peraturan yang terbaru tentang hukum pidana anak adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, sedangkan mengenai pelaksanaan pemasyarakatan anak, dipakai sebagai

landasan hukumnya adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dan sampai sekarang peraturan pelaksana dari kedua Undang-undang tersebut ada. Dengan demikian di dalam pelaksanaannya masih dipakai surat-surat keputusan, dan surat-surat edaran yang sangat banyak jumlahnya.

Di dalam Undang-undang Pengadilan Anak, hanya ada lima pasal yang mengatur tentang lembaga pemasyarakatan anak, yaitu pasal 60, 61, 62, 63 dan 64, dan selanjutnya di dalam Undang-undang tersebut dikatakan bahwa pelaksanaan ketentuan pasal-pasal tersebut diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Sebagian besar substansi dari Undang-undang Pengadilan Anak ini mengatur tentang hukum acara pidana untuk anak dan juga Hukum Pidana Materiil untuk anak.

Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan khususnya mengenai perlakuan terhadap narapidana anak terdapat dalam pasal 18 sampai dengan 24. Selanjutnya Undang-undang ini mengatakan bahwa dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Akan tetapi untuk kedua peraturan perundang-undangan ini sampai saat ini belum ada peraturan pelaksanaannya.

Seperti kita ketahui bahwa sejak tahun 1960-an di kalangan kita sudah mulai timbul suatu pandangan baru mengenai perlakuan terhadap narapidana, yaitu dengan menempatkan mereka lebih manusiawi lagi, hal ini dibuktikan dengan timbulnya gagasan pemasyarakatan yang dipelopori oleh Sahardjo. Gagasan Sahardjo tentang pemasyarakatan sebagai tujuan dari pidana penjara,

yang kemudian dinyatakan sebagai sistem mengenai treatment of prisoners. Dengan demikian pemasyarakatan bukan lagi semata-mata sebagai tujuan dari pidana penjara tetapi juga merupakan sistem pembinaan terhadap pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan semua potensi dalam masyarakat dan petugas secara keseluruhan, sehingga tidak menjadikan narapidana sebagai objek semata-mata tapi diperlukan sebagai manusia yang dihargai hak-haknya. Akan tetapi dengan perubahan pandangan terhadap perlakuan kepada narapidana belum sepenuhnya didukung oleh landasan peraturan. Perwujudan terhadap perubahan pandangan ini tidak bisa langsung diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Sebagai jalan dikeluarkannya surat-surat edaran, surat-surat instruksi, dan sebagainya yang sifatnya temporer sesuai dengan kebutuhan yang berlaku saat itu, yang berkaitan dengan masalah pemasyarakatan khususnya pembinaan narapidana anak, dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat bangsa Indonesia serta dengan memperhatikan instrumen-instrumen internasional, yang memberi pedoman dan pengaturan tentang perlindungan hak-hak anak pada umumnya dan hak-hak narapidana anak pada khususnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari 60 responden, maka semua narapidana anak tersebut baru pertama kalinya melakukan tindak pidana, dengan demikian mereka adalah *first offender*.

Kita kembali melihat pasal 45 KUHP, walaupun dengan lahirnya Undang-undang Pengadilan Anak, pasal ini dinyatakan tidak berlaku lagi, akan tetapi sebagai gambaran akan tampak, bahwa pasal dalam KUHP

tersebut khususnya dalam bagian ini ternyata lebih memberikan perlindungan kepada anak.

Di dalam pasal ini dinyatakan "...serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan pelanggaran atau kejahatan tersebut di atas...." Dari pasal ini dapat ditafsirkan bahwa seorang anak dijatuhi pidana penjara yang harus mereka jalani di lembaga pemasyarakatan. Di dalam Undang-undang Pengadilan Anak tidak diatur mengenai hal ini.

Di dalam RKUHP Tahun 1997/1998, diatur lebih banyak mengenai jenis-jenis pidana pokok (pasal 114), yaitu ; pidana nominal, pidana dengan syarat, pidana denda dan pidana pembatasan kemerdekaan.

Sebaiknya bagi anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana (*first offender*) tidak langsung dijatuhi pidana pembatasan kebebasan, hakim dapat memberikan pidana yang lebih ringan sesuai dengan urutan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 114 RKHUP 1997/1998. Hal ini sesuai dengan konvensi hak-hak anak dalam artikel 37 (b), yang menyatakan ; *...detention or imprisonment of a child shall be conformity with the law and shall be used only as a measure of last resort and for the shortes appropriate periode of time.*

Undang-undang Pengadilan Anak pada pasal 60 dikatakan ; bahwa anak didik pemasyarakatan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak yang harus terpisah dari orang dewasa. Dan pada pasal 61 dikatakan bahwa anak pidana yang belum selesai menjalani pidananya dan telah mencapai umur 18

tahun harus segera dipindahkan. Apabila belum berumur 21 tahun maka ditempatkan di lembaga pemasyarakatan dewasa muda.

**RAGAN 2**  
**NARAPIDANA MENURUT KELOMPOK UMUR**  
**DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK**

NO	TANGGAPAN	ASAL LPA			%		
		TANGERANG (1)	KUTOARDJO (2)	PLANTANGAN (3)			
1	12 TAHUN KE BAWAH	0 ORANG	0 ORANG	0 ORANG	0	0	0
2	12 - 15 TAHUN	4 ORANG	3 ORANG	6 ORANG	3,3	3,7	8,1
3	15 - 18 TAHUN	84 ORANG	56 ORANG	36 ORANG	70,0	70,0	48,6
4.	18 TAHUN KE ATAS	32 ORANG	21 ORANG	32 ORANG	26,6	26,3	43,3
	Jumlah	120 ORANG	80 ORANG	64 ORANG	100%	100%	100%

Sumber : Diolah dari Data Primer 1999.

Dari data narapidana anak berdasarkan kelompok umur, yang berumur di bawah 12 tahun tidak dijumpai di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang, Kutoarjo, maupun Plantungan ; dan yang berumur 12 - 15 tahun dijumpai di Tangerang 3,3%, Kutoarjo 3,7% dan 8,1% di Plantungan. Sedangkan yang berumur 15 - 18 tahun 70% Tangerang, Kutoarjo 70% dan Plantungan 48,6%. Dan kelompok yang berumur di atas 18 tahun di Tangerang 26,6%, Kutoarjo 26,3% dan Plantungan 43,3%.

Faktor yang menyebabkan narapidana berumur 18 tahun lebih masih berada di lembaga pemasyarakatan anak adalah masalah prosedur penindaan narapidana yang harus ditempuh. Sebagaimana yang disebutkan dalam pola pembinaan narapidana dan anak tahun 1990, penindaan ini diperkenankan dengan alasan :

- a. Pembinaan ;
- b. Keamanan ;
- c. Proses peradilan lain-lain yang dianggap perlu.

Apabila penindaan atas permintaan sendiri, maka biaya ditanggung oleh keluarga pemohon, sedangkan sebagian besar orang tua narapidana anak berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Sedangkan dalam kasus ini, narapidana yang berumur 18 tahun lebih, pembiayaannya dibebankan kepada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang bersangkutan. Dan pembiayaannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan apabila pemindahannya dilakukan antar Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.

Sedangkan mengenai kewenangan pemberian ijin apabila pemindahan masih dalam satu wilayah hukum Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, diberikan oleh kepada kantor wilayah. Dan apabila pemindahan berada di wilayah hukum Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang lain, diberikan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Ijin diberikan secara tertulis dengan menyebutkan identitas narapidana secara lengkap. Akan tetapi pada pelaksanaannya prosedur ini kadang-kadang menyita waktu, sehingga setelah sekian lama ijin tersebut baru keluar. Atau bahkan lembaga pemasyarakatan pemuda pada waktu yang bersangkutan telah over kapasitas sehingga tidak bisa menerima narapidana lagi.



**RAGAN 3**  
**DATA NARAPIDANA ANAK BERDASARKAN**  
**PEKERJAAN ORANG TUA**

No	Pekerjaan Orang Tua	Asal LPA			%		
		Tangerang (1)	Kutoarjo (2)	Plantungan (3)	1	2	3
1.	Pegawai Negeri	4	3	1	6,6	5,0	1,6
2.	ABRI	3	-	1	5,0	-	1,6
3.	Pegawai Swasta	3	7	10	5,0	11,6	16,6
4.	Pengusaha	2	3	1	3,3	5,0	1,6
5.	Petani	20	19	20	33,3	31,6	33,3
6.	Pedagang	12	10	11	20,0	16,6	18,3
7.	Buruh	13	16	13	21,6	26,6	21,6
8.	Tidak bekerja	3	2	3	5,0	3,3	5,0
9.	Lain-lain	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	Jumlah	60	60	60	100%	100%	100%

Sumber : Diolah dari Data Primer 1999

Berdasarkan data menurut pekerjaan orang tua, maka sebagian besar narapidana dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Apabila kita lihat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, maka pembinaan narapidana anak juga harus. Melihat kondisi sosial ekonomi keluarganya. Akan tetapi pada pelaksanaannya penggolongan berdasarkan hal ini tidak dilaksanakan.

Selain itu juga tidak ada konsep yang jelas mengenai program pembinaan yang didasarkan pada kondisi ekonomi sosial dari keluarga narapidana anak itu sendiri. Seharusnya pembinaan narapidana anak tidak bersifat umum, melainkan memperhatikan kondisi sosial ekonomi dan budaya anak yang bersangkutan (individualisasi pembinaan. Akan tetapi pada pelaksanaannya pembinaan dilakukan dengan cara mengeneralisasinya. Individualisasi

pembinaan merupakan konsekuensi dianutnya peradilan anak sebagai bagian perwujudan kesejahteraan anak atas dasar azas proporsionalitas, yaitu mengingatkan agar tanggapan dan reaksi masyarakat yang proporsional terhadap pelaku tindak pidana anak, sehingga pelaksanaan hukumannya pun harus dilihat kasus perkasus, dan pembinaan dilakukan dengan memperhatikan juga keadaan keluarga. Hal ini sesuai dengan apa yang diilustrasikan dalam *Beijing Rules Rule S. 1. (The juvenile justice system shall emphasize the well-being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstance of both offender and offence).*

Bertitik tolak dari pengertian "resosialisasi" sebagaimana telah dikemukakan pada uraian-uraian terdahulu, yang secara umum mengandung makna "pengembalian kehidupan sosial narapidana anak ke tengah-tengah masyarakat, "seperti sediakala", sebagaimana pada waktu narapidana anak belum melakukan tindak pidana (kejahatan), maka untuk melihat apakah pola pembinaan narapidana anak yang dilakukan oleh LPA telah menyahuti upaya resosialisasi, terdapat beberapa ukuran yang dapat dijadikan pedoman untuk melihat keberhasilan tersebut, yakni :

1. Perawatan jasmani dan rohani narapidana anak;
2. Perolehan pelayanan kesehatan;
3. Kesempatan yang diberikan kepada narapidana anak, dan
4. Penempatan narapidana anak di LPA.

Bagaimana pelaksanaan ke empat point di atas, secara rinci diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Perawatan Jasmani dan Rohani Anak

Pemberian perawatan jasmani dan rohani narapidana anak dilakukan bertujuan untuk menjaga agar narapidana anak tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani narapidana anak. Terhadap persoalan ini dapat dilihat dari :

##### a. Makanan dan minuman napi anak

Walaupun Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) bukanlah merupakan wadah ataupun tempat untuk "mengemukakan" anak, dengan memberikan kebutuhan pokok yang menunjang pertumbuhannya (empat sehat lima sempurna). Karena kalau demikian adanya, maka tiap-tiap anak, bahkan kemungkinan orang tua akan menyuruh anaknya untuk melakukan kegiatan supaya akhirnya masuk LPA dan memperoleh kebutuhan "empat sehat lima sempurna". Akan tetapi LPA juga harus memperhatikan makanan dan minuman yang diberikan kepada napi anak, jangan pula memegang prinsip "apa adanya", yang penting makan dan minum. Karena bagaimanapun napi anak tetap merupakan tunas muda yang akan mewujudkan dan melanjutkan pembangunan masyarakat, bangsa dan negara.

Memperhatikan menu makanan dan minuman yang diberikan kepada napi anak oleh ketiga LPA (Tangerang, Plantungan dan Kutoardjo) yang dominan berasal dari hasil kebun yang dikerjakan

oleh napi anak di lingkungan LPA dan bantuan masyarakat dan juga negara, serta pengolahannya diberikan kepada napi anak berdasarkan giliran yang telah ditetapkan, selanjutnya penulis mengemukakan bahwa pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman napi anak, belum dapat dikatakan memenuhi persyaratan empat sehat lima sempurna. Sehingga dapat dikatakan belum memenuhi kebutuhan pertumbuhan jasmani dan rohani napi anak.

Kesimpulan di atas dikemukakan, di samping didasarkan kepada bahan makanan dan minuman yang ada, juga didasarkan kepada tanggapan napi anak, sebagaimana dikemukakan dalam ragaan berikut ini:

**RAGAN 4**  
**TANGGAPAN NAPI ANAK TERHADAP MENU MAKANAN**  
**DAN MINUMAN YANG DIBERIKAN DALAM LEMBAGA**  
**PEMASYARAKATAN ANAK**

NO	TANGGAPAN	ASAL LPA			%		
		TANGERANG	KUTOARDJO	PLANTANGAN			
1	BAIK	19	13	10	33,4	28,3	21,7
2	KURANG BAIK	21	20	15	35,0	41,7	40,0
3	TIDAK BAIK	19	15	12	31,6	30,0	38,3
	Jumlah	60	60	60	100%	100%	100%

Walaupun berdasarkan ragaan di atas terdapat napi anak yang mengemukakan, bahwa menu makanan dan minuman yang diberikan di LPA adalah "baik", dalam arti telah memenuhi menu makanan empat sehat lima sempurna, namun bila diperhatikan lebih jauh, diperoleh gambaran bahwa tanggapan tersebut diberikan oleh napi anak didasarkan kepada dua hal, yaitu :

- 1) Ketidaktahuan napi anak tentang persyaratan menu makanan dan minuman yang memenuhi unsur empat sehat lima sempurna, dan;
- 2) Keberadaan ekonomi napi anak yang pada dasarnya (sebelum masuk LPA) berada di bawah garis kemiskinan.

b. Aktivitas Napi Anak

Pertumbuhan jasmani dan rohani napi anak, disadari di samping ditentukan oleh kualitas makanan dan minuman yang diberikan kepada napi anak. Tetapi juga ditentukan oleh aktivitas yang diberikan kepada napi anak, terlebih lagi dalam hal pertumbuhan kepribadian dan pola pikir napi oleh karenanya aktivitas napi anak, disini penulis jadikan salah satu elemen untuk melihat perawatan jasmani dan rohani napi anak.

Dari segi waktu atau terjadwal tidaknya, maka aktivitas napi anak di LPA secara umum diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu:

**Pertama**, adalah aktivitas anak yang bersifat rutin dan terjadwal yang dilakukan secara rutin setiap hari, dengan waktu yang telah ditetapkan. Aktivitas seperti ini, meliputi : bangun pagi, sekolah, bermain, nonton TV dan istirahat. Memperhatikan aktivitas harian napi anak sebagaimana disebutkan itu, yang dominan dilakukan di lingkungan LPA dan cenderung monoton, menunjukkan bahwa aktivitas ini tidak banyak memberikan manfaat bagi program resosialisasi napi anak.

**Kedua**, adalah aktivitas napi anak yang bersifat temporer, tidak terjadwal, melainkan dilakukan dalam kondisi waktu tertentu, seperti menyambut hari kemerdekaan, natalan bersama masyarakat, dan puasa serta lebaran bersama masyarakat. Memperhatikan keberadaan aktivitas ini yang dominan tidak sedikit melibatkan anggota masyarakat, dapat dikatakan bahwa aktivitas temporer ini potensial mendukung program resosialisasi napi anak. Namun dikarenakan waktu pelaksanaannya yang bersifat sementara menyebabkan pengaruh potensial tersebut, minim sekali memberikan program terhadap pertumbuhan jasmani dan rohani napi anak.

Bagaimana tanggapan napi anak terhadap aktivitas napi anak digambarkan dalam ragaan di bawah ini:

**RAGAN 5**  
**PERSEPSI NAPI ANAK TERHADAP AKTIVITAS**  
**DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK**

NO	PERSEPSI	ASAL LPA			%		
		TANGERANG	KUTOARDJO	PLANTANGAN			
1	MENYENANGKAN	19	9	7	31,6	25,0	20,0
2	BIASA-BIASA	18	19	10	31,6	43,4	35,0
3	MEMBOSANKAN	22	20	19	36,8	31,6	45,0
	JUMLAH	19	48	37	100%	100%	100%

**Sumber : Diolah dari Data Primer 1999**

Khususnya terhadap aktivitas yang bersifat temporer, pengaruh positifnya minim sekali dirasakan oleh napi anak, sehingga tergambar kurang mendukung program resosialisasi, dikarenakan pada saat bentuk aktivitas ini dilaksanakan, tidak setiap napi anak dapat mengikutinya. Karena dimungkinkan pada saat untuk aktivitas temporer dilakukan, napi anak baru masuk atau telah ke luar dari LPA. Hal ini diketahui, bahwa dari persepsi yang menyenangkan 31,6% dari

Tangerang, 25% Kutoarjo dan 20%, Plantungan napi anak yang memberikan persepsi biasa-biasa 31,6% di Tangerang, 43,4 % Kutoarjo dan 35,0% Plantungan serta persepsi terhadap aktivitas anak yang membosankan terdapat di Tangerang : 36,8%, Kutoarjo : 31,6% dan Plantungan : 45,0% yang mengemukakan belum pernah mengikuti bentuk aktivitas yang bersifat temporer.

## 2. Pelayanan Kesehatan

Kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan LPA kepada napi anak, antara lain ditentukan oleh : persediaan perobatan dan jenis obat yang terdapat di LPA, tenaga medis yang disediakan ataupun yang terdapat di LPA, dan kesesuaian pelayanan medis dengan penyakit yang diderita napi anak.

Bertitik tolak dari ketiga komponen di atas, dan dengan menyesuaikannya dengan kondisi ataupun kenyataan yang terdapat di LPA, selanjutnya dikemukakan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada napi anak kurang memadai. Kondisi sedemikian ini terjadi dikarenakan :

- a. Obat-obatan yang tersedia di LPA dominan obat-obatan yang bersifat generic, yang mudah diperoleh di kios-kios obat biasa, yang hanya dapat dipergunakan untuk mengobati penyakit-penyakit ringan dan biasa ;

- b. Tenaga medis yang tersedia bukanlah merupakan dokter-dokter yang spesialis di bidang penyakit tertentu, melainkan bidan ataupun perawatan-perawatan kesehatan biasa, dan ;
- c. Kenyataan, bahwa tidak sedikit napi anak yang menderita sesuatu penyakit, tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan penyakit yang dideritanya.

Di samping kondisi di atas, lemahnya pelayanan kesehatan napi anak juga ditandai dengan tidak adanya jadwal rutin dan berkala dari LPA untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kesehatan napi anak.

Ragaan berikut menggambarkan bagaimana pandangan napi anak terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan :

**RAGAN 6**  
**PANDANGAN NAPI ANAK TERHADAP PELAYANAN**  
**KESEHATAN NAPI ANAK OLEH LEMBAGA**  
**PEMASYARAKATAN ANAK**

NO	PANDANGAN	ASAL LPA			%		
		TANGERANG	KUTOARDJO	PLANTANGAN	1	2	3
1	BAIK	17	15	12	28,3%	25,0%	20,0%
2	CUKUP BAIK	18	19	25	30,0%	31,6%	41,7%
3	TIDAK BAIK	25	26	23	41,7%	43,4%	38,3%
	JUMLAH	60	60	60			

Sumber : Diolah dari Data Primer 1999

### 3. Kesempatan Yang Diberikan Kepada Napi Anak

Kesempatan yang dimaksudkan di sini meliputi peluang-peluang bagi napi anak untuk mengembangkan daya kreasi yang dimiliki dan juga demokratisasi penyampaian keluhan yang dialami napi anak di dalam LPA.

Terhadap peluang-peluang untuk menumbuh kembangkan daya kreasi napi anak, bila dihubungkan dengan bentuk aktivitas napi anak



sebagaimana telah dikemukakan pada pon terdahulu, dan juga sarana dan pra-sarana yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Anak, maka dapat dikemukakan bahwa napi anak belum mendapatkan kesempatan ini, sehingga wajar bila dengan waktu pidana yang dijatuhkan dan dialami napi anak, setelah lainnya ke luar dari LPA serta kembali ke tengah-tengah kehidupan masyarakat, napi anak tersebut tidak memiliki ke tengah-tengah kehidupan masyarakat, napi anak tersebut tidak memiliki "nilai plus yang bersifat positif", baik di bidang keterampilan maupun kemampuan untuk bersosialisasi dengan masyarakat.

Sementara terhadap demokratisasi penyampaian keluhan, napi anak jug tidak maksimal memperolehnya, sehingga tidak jarang napi anak bersifat diam atau pasif, dan memendam segala bentuk persoalan yang dialaminya di LPA. Kondisi sedemikian ini bila tidak segera diantisipasi, maka napi anak bisa terjerumus ke dalam bentuk "penghukuman yang lain", yaitu mengalami "depresi" ataupun "tekanan batin".

Kesempatan dan atau peluang yang diperoleh napi anak di dalam LPA sangatlah terbatas, yang sering tergambar dan terwujud adalah kesempatan untuk menerima kunjungan keluarga. Hal inipun masih terbatas pada napi anak yang mempunyai keluarga tidak jauh dari lokasi LPA.

Beberapa hal yang berhubungan dengan kesempatan dan/atau peluang yang belum dirasakan oleh napi anak di LPA, yang erat kaitannya

dengan pemupukan pertumbuhan perkembangan napi anak untuk tujuan resosialisasi, diantaranya adalah :

a. Kesempatan untuk menerima informasi

Minimnya kesempatan napi anak untuk menerima informasi, khususnya yang berasal dari luar lingkungan LPA, dikarenakan media yang tersedia untuk mendukung hal ini "relatif terbatas", seperti hanya berkisar sarana informasi yang bersifat umum, yaitu : radio dan TV, dimana untuk mendengarkan informasi dari kedua media tersebut, waktu napi anakpun sangat sedikit.

b. Kesempatan untuk menyampaikan keluhan

Tidak terciptanya hal ini, di samping dikarenakan kondisi yang datangnya dari elemen-elemen LPA sendiri, juga dikarenakan napi anak sendiri juga belum ataupun tidak memahami hak-haknya sebagai napi anak. Terhadap poin ini, Kepala LPA Kutoarjo, mengemukakan:

Bahwa keterlambatan LPA untuk mengetahui keluhan yang dialami atau diderita para napi anak, dikarenakan napi anak tidak menyampaikannya kepada aparat LPA, dan kemungkinan yang membuat hal ini terjadi, adalah bahwa napi anak tidak menyadari bahwa menyampaikan keluhan adalah haknya.<sup>98</sup>

c. Kesempatan untuk beraktivitas di luar lembaga

Secara umum kesempatan ini jarang kita jumpai, kecuali pada saat napi anak bersekolah (di LPA Tangerang), maupun melaksanakan ibadah.

Sementara bila kita berangkat dari hakikat resosialisasi, maka

<sup>98</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala LPA Kutoarjo, 1999.

seharusnya napi anak memperoleh kesempatan yang cukup di dalam beraktivitas di luar LPA, walaupun pelaksanaannya tetap diawasi.

#### 4. Penempatan Napi Anak

Penempatan napi anak di dalam LPA saat ini, baru dilakukan dengan membedakan jenis kelamin, sehingga kita hanya mengenal adanya LPA wanita dan LPA pria. Terhadap hal inipun belum semua LPA melakukannya. Satu dari ketiga LPA, yang menempatkan napi anak wanita terpisah dari napi anak pria, adalah LPA Tangerang. Sedangkan pada LPA Kutoardjo dan LPA Plantungan, untuk napi anak wanita, keberadaannya disatukan dengan LP wanita dewasa. Namun hal ini bukan berarti LPA telah melakukan pola pembinaan napi anak yang bersifat utuh dan menyeluruh (komprehensif), karena di samping pembedaan ataupun pemisahan berdasarkan jenis kelamin, maka berdasarkan pasal 20 Undang-undang Pemasyarakatan, pemisahan napi anak juga harus dilakukan berdasarkan umur, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan yang dilakukan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pemisahan napi anak berdasarkan ke empat kriteria yang disebutkan terakhir di atas, belum sepenuhnya dilakukan oleh LPA yang ada.

Memperhatikan realitas ke empat ukuran yang dapat dijadikan ukuran ataupun dasar ataupun pedoman di dalam melihat apakah pola pembinaan napi anak yang diterapkan oleh LPA saat ini telah memenuhi dan atau menyahuti upaya resosialisasi napi anak, selanjutnya penulis mengemukakan bahwa pola

pembinaan tersebut belum sepenuhnya menyahuti atau masih sarat akan kekurangan-kekurangan. Realitas ini tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan terdapat faktor-faktor yang menyebabkan ianya terjadi.

Adapun faktor-faktor yang menempatkan pola pembinaan napi anak masih kurang menyahuti upaya resosialisasi napi anak, antara lain adalah :

1. Faktor Dana
2. Faktor Sumber Daya Aparat
3. Faktor Letak LPA
4. Faktor Kelengkapan Sarana dan Pra-Sarana

#### **D. Pola Interaksi LPA dalam Upaya Resosialisasi Napi Anak**

Judul sub bab ini memberikan makna, bahwa yang diuraikan berikut ini adalah merupakan "keharusan", yaitu keharusan yang harus dilakukan LPA di dalam pembinaan napi anak untuk tujuan resosialisasi. Oleh karenanya terdapat hal-hal pokok yang tidak boleh dilepaskan LPA di dalam merealisasikan keharusan yang diembannya, yaitu :

1. Hakikat dari karakteristik anak (khususnya napi anak) ;
2. Peran dan kedudukan anak dan juga napi anak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ;
3. Hakikat dari makna pembinaan, dan ;
4. Hakikat dari makna resosialisasi.

Di samping hal-hal pokok di atas yang harus dipahami dan dipedomani LPA tersebut (untuk ke empat dasar pokok di atas telah diuraikan dalam bab-

bab sebelumnya), terdapat prinsip-prinsip lain yang juga *urgent* untuk diperhatikan di dalam pembinaan napi anak untuk tujuan resosialisasi ini.

Sehubungan dengan hal di atas, sebelum lebih jauh penulis menguraikan bagaimana seharusnya pola interaksi yang diterapkan LPA di dalam melakukan pembinaan napi anak, berikut diuraikan beberapa prinsip dasar pola pembinaan napi anak.

Adapun prinsip-prinsip dasar yang dimaksudkan, adalah :

1. Perlindungan (*protection*)

Pola interaksi yang didasarkan kepada prinsip ini, hampir terdapat di dalam tiap-tiap produk perundang-undangan, baik nasional maupun internasional. Atas dasar prinsip ini maka pola interaksi yang selayaknya dibangun oleh LPA di dalam upaya resosialisasi napi, adalah bagaimana agar napi anak berada dalam situasi yang aman, tenteram, dan tidak merasa tertekan oleh konsep pembinaan yang dilakukan oleh LPA.

2. Tujuan (*goal*)

Resosialisasi ataupun pengembalian kehidupan sosial anak di tengah-tengah kehidupan masyarakat secara "normal" ataupun "wajar" merupakan tujuan akhir yang perlu diwujudkan dari pembinaan napi anak. Terdapat dua pokok persoalan yang seharusnya diperhatikan di dalam hakekat resosialisasi, agar tujuan dari resosialisasi, yaitu diterimanya napi anak dalam kehidupan sosial di tengah-tengah, yaitu : persoalan pertama, adalah persoalan penyerahan / atau pengembalian napi anak ke tengah-tengah masyarakat. Sementara persoalan kedua adalah kebalikan dari

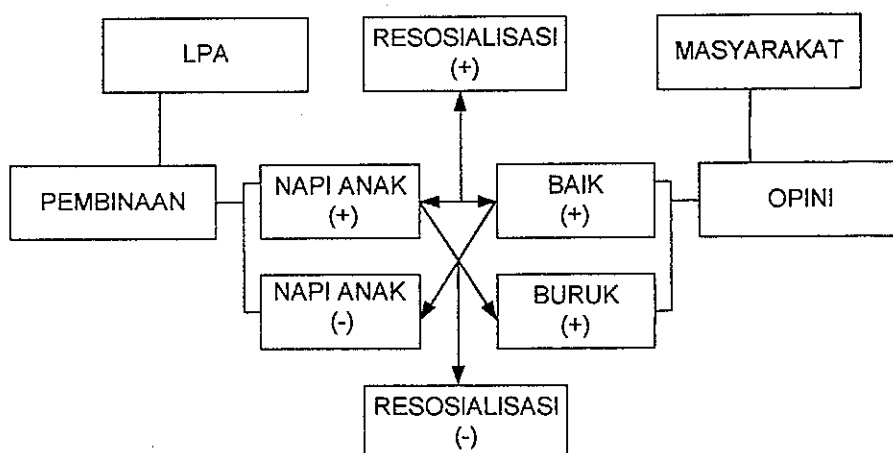
persoalan pertama, yaitu persoalan penerimaan masyarakat terhadap napi anak.

Pada pokok persoalan pertama, maka pada interaksi yang diterapkan oleh LPA berorientasi kepada pribadi napi anak, yaitu dengan memberikan "bekal" jasmaniah dan rohaniah kepada napi anak, sehingga napi anak mempunyai bekal lahir batin yang cukup untuk terjun ke tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sedangkan pada pokok persoalan kedua, maka pada interaksi yang diterapkan oleh LPA berorientasi ataupun ditujukan kepada masyarakat, yang bermaksud untuk memberikan opini masyarakat bahwa napi anak juga dapat berubah dan berbuat lebih baik.

Kedua pokok persoalan di atas hendaknya dijalankan secara bersamaan. Karena apabila tidak, maka upaya resosialisasi tidak akan terwujud melainkan sebaliknya kan bersifat bias. Seperti contoh, adalah : apabila keberhasilan hanya diperoleh pada persoalan pertama, namun pada persoalan yang kedua tidak, maka hal ini akan menyebabkan "Pembekalan" yang diberikan kepada napi anak akan sia-sia saja, karena masyarakat tidak menerima keberadaannya dalam lingkungan pergaulan masyarakat. Begitu juga sebaliknya. Dengan kata lain dapat disebutkan, bahwa kepentingan ataupun kesenjangan (*lag*) diantara persoalan pertama dan persoalan kedua, akan menyebabkan akan mengalami depresi, tertekan dan frustrasi. Dimana hal ini potensial untuk menempatkan atau menarik si anak ke dalam penyimpangan-penyimpangan yang lebih buruk dan berbahaya lagi.

Dalam ragaan yang sederhana, sinkronisasi dan/atau keseimbangan dari persoalan pengembalian dan penerimaan di atas digambarkan sebagai berikut :

**RAGAAN 7**  
**INTERAKSI ANTARA PENGEMBALIAN DAN PENERIMAAN**  
**NAPI ANAK TERHADAP MASYARAKAT**



Ragaan di atas, menunjukkan bahwa keberhasilan resosialisasi napi anak hanya akan terwujud dari satu kemungkinan dari empat kemungkinan yang ada, yaitu apabila terjadi keseimbangan, kesesuaian, dan atau keselarasan antara napi anak yang sudah dibina dengan opini masyarakat yang terbentuk, yaitu sama-sama bernilai positif (+).

### 3. Prinsip Proporsionalitas

Berdasarkan prinsip ini, maka pola pembinaan dan/atau pola interaksi yang diterapkan oleh LPA, tidak juga harus menghilangkan salah satu eksistensi dari keberadaan LPA dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yaitu sebagai wadah pelaksanaan hukuman yang telah ditetapkan melalui putusan hakim (pengadilan). Karena apabila prinsip ini hilang, maka napi anak akan merasakan "betah (dalam arti

negatif) di dalam LPA", dan enggan untuk keluar, serta dimungkinkan pada saat napi anak keluar, atau bebas, maka ia akan tetap mencari jalan untuk dapat kembali ke LPA. Jalan tersebut tidak lain adalah melakukan penyimpangan atau kejahatan kembali. Oleh karenanya berdasarkan prinsip ini, maka sifat-sifat pemidanaan tetap harus diterapkan, akan tetapi berorientasi kepada pembinaan sikap dan mental/moral napi anak.

Sehubungan dengan prinsip di atas, dalam penjelasan Rule 5.1 dari SMR-JJ (*Beijing Rules*), dirumuskan :

Terdapat dua sasaran yang penting ataupun esensial dalam pembinaan napi anak, yaitu :

1. Prinsip Proporsionalitas (*The Principle of Proportionality*) dan ;
2. Prinsip Kesejahteraan Anak (*The Promotion of the well king of the juvenile*).<sup>99</sup>

Rumusan lengkap dari Rule 5.1. SMR-JJ (*Beijing Rules*) tersebut, adalah : *The juvenile justice system emphasize the will being of the juvenile and shall enjure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstance of both the offender and the offence.*<sup>100</sup>

#### 4. Prinsip Kesejahteraan

Dari rumusan rule 5.1. di atas, kemudian lahir satu prinsip, yaitu prinsip kesejahteraan, yang bermakna dan berorientasi kepada pemenuhan hak-hak ataupun kebutuhan napi anak selama berada di dalam LPA.

Di samping prinsip-prinsip di atas, Beccaria dalam bukunya *Essay and*

<sup>99</sup> Lihat Muladi & Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992 hal., 112

<sup>100</sup> *Ibid*



*Crime*, sebagaimana dikutip oleh Vold mengemukakan satu prinsip yaitu **prinsip keadilan dan keseimbangan**, yang memuat komponen-komponen pendukung prinsip, yaitu : <sup>101</sup>

1. Untuk menghindari terjadinya konflik ataupun peperangan, maka pembentukan suatu "masyarakat (*society*)" hendaknya didasarkan kepada suatu kesepakatan yang dilahirkan melalui kontrak (*contractual society*). Oleh karenanya kebebasan dari tiap-tiap individu diserahkan kepada negara yang dikendalikan oleh kekuasaan yang sah (*legality power*). Kemudian untuk melindungi hak-hak dari tiap-tiap individu, maka kepada negara diberikan kewenangan yang didasarkan kepada hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, untuk menindak ataupun menghukum tiap-tiap individu yang melakukan pelanggaran.
2. Penerapan dan penegakan hukum didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum, jadi bukan hakim. Dengan demikian penentuan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan hanya dapat dilakukan berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian kekuasaan untuk membentuk Undang-undang (hukum) pidana hanya ada pada pembuat Undang-undang. Oleh karenanya, dengan alasan apapun hakim tidak diperkenankan untuk menjatuhkan hukuman yang tidak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, baik itu menghapus, memperingan

<sup>101</sup> Purniati & Kemal Dermawan, *Mazhab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal., 46-47

maupun memperberat hukuman dengan alasan yang tidak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

3. Dengan demikian kebenaran dari tugas hakim adalah membuktikan ataupun menentukan kesalahan atau tidaknya seseorang tersangka dan atau terdakwa, sementara persoalan hukum dan kualitas hukuman yang ada dijatuhkan merupakan kewenangan dari peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, hakim dilarang untuk melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan hukum pidana.
4. Hakim hanya bertugas untuk menentukan apakah perbuatan yang disangkakan sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum tertulis.
5. Penjatuhan hukuman merupakan kewenangan ataupun hak dari negara, yang didasarkan kepada alasan yang bersifat absolut (*absolute necessity*), yaitu untuk membela dan melindungi kepentingan/kebebasan masyarakat, sebagaimana yang telah dipercayakan ataupun diserahkan kepada negara.
6. Harus diadakan suatu skema kejahatan dan hukuman yang dibuat dengan diawali pada perbuatan-perbuatan (kejahatan) yang secara langsung dapat menghancurkan kehidupan masyarakat, dan diakhiri oleh skala kejahatan yang berpengaruh kecil terhadap kelangsungan hidup masyarakat, seperti kejahatan-kejahatan ketidakadilan yang menempatkan masyarakat sebagai korban.
7. Dalam penentuan hukum di dalam suatu produk peraturan perundang-undangan, negara haruslah mendasarkan kepada nilai-nilai penderitaan

ataupun kesengsaraan dan nilai-nilai kesenangan ataupun kesejahteraan yang merupakan dasar dari motif tiap-tiap orang di dalam melakukan sesuatu perbuatan.

8. Untuk menemukan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan, maka ukuran yang dipergunakan adalah perbuatan kejahatan yang dilakukan bukan kesalahan dari si pelaku.
9. Prinsip dasar dari hukum pidana terletak pada saksi-saksi yang bernilai positif.

Bertitik tolak dari prinsip-prinsip dan gambaran tentang pola interaksi yang seharusnya diterapkan LPA di dalam melakukan pembinaan untuk tujuan resosialisasi napi anak, dan didasarkan kepada kenyataan bahwa anak bukanlah hanya harapan sebuah keluarga, tetapi lebih dari itu merupakan harapan masyarakat dan juga harapan negara, maka muara dari pembinaan terhadap napi anak adalah "kepentingan napi anak" itu sendiri. Dari "kepentingan napi anak" disini bukanlah sebatas kepentingan napi anak menurut pemikiran pengambil keputusan (hakim), sebagaimana dikembalikan oleh Sudarto dalam Madhe Sadhi Astuti, bahwa :

"Makna dari kepentingan anak itu janganlah menjadi demi kepentingan anak menurut fikiran hakim saja, akan tetapi benar-benar demi kepentingan anak menurut fikiran hakim saja, akan tetapi benar-benar demi kepentingan pribadi anak itu sendiri dalam arti luas. artinya hendaknya dari anak itu sendiri diperhatikan dan diperhitungkan juga harapan dari masyarakat yang bersangkutan."<sup>102</sup>

Sehubungan dengan hal di atas, maka pola interaksi yang dimaksudkan

<sup>102</sup> Madhe Sadhi Astuti, *Pemidanaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana*, IKIP Malang, 1997, hal., 133.

dalam sub bab ini, hendaknya dilakukan oleh LPA, dengan berorientasi kepada :

- a. Persamaan hak dan derajat
- b. Diskriminatif yang positif
- c. Saling mencintai sesama
- d. Mengembangkan sikap tenggang rasa
- e. Tidak semena-mena terhadap orang lain
- f. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
- g. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan
- h. Berani membela keadilan dan kebenaran
- i. Saling hormat menghormati

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Menutup pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan yang sebelumnya telah ditetapkan pada Bab I, berikut dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran, yang pada dasarnya merupakan jawaban ringkas terhadap permasalahan tersebut, serta kemungkinan solusi terhadap bias yang muncul dari fenomena kinerja Lembaga Pemasyarakatan Anak yang ada.

Adapun kesimpulan dan saran yang dimaksudkan, diuraikan sebagai berikut :

#### **A. Kesimpulan**

1. Dari inventarisasi yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, beberapa hal yang dapat dikemukakan, adalah :
  - a. Bahwa Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) tidak kekurangan landasan yuridis di dalam melakukan pembinaan terhadap napi anak dalam mewujudkan tujuan resosialisasi napi anak. Hal ini ditunjukkan oleh tidak sedikitnya peraturan perundang-undangan yang sebenarnya dapat dijadikan dasar bagi pembinaan napi anak, baik peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional, maupun konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi ;
  - b. Bahwa peraturan perundang-undangan yang ada, secara substansial dapat dibedakan ke dalam :

- 1) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak anak, khususnya napi anak, dan ;
  - 2) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kinerja LPA.
- c. Bahwa ketentuan hukum yang menjadi landasan bagi kinerja LPA di dalam melakukan pembinaan terhadap napi anak, bersifat tersebar di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, untuk itu hubungan antara Undang-undang satu dengan yang lainnya sangat terkait.
2. Bahwa pola pembinaan terhadap napi anak yang dilakukan oleh LPA, pada umumnya tidak dapat dikatakan dengan sepenuhnya telah menyahuti upaya resosialisasi napi anak, atau sebaliknya. Kondisi ini dikarenakan aktivitas pembinaan, khususnya yang berhubungan langsung dengan aktivitas napi anak, tergambar masih bersifat monoton dan kaku, sehingga menimbulkan rasa bosan bagi napi anak. Bahkan sebagai akibat negatif daripadanya, terdapat napi anak yang tidak merasakan (menjiwai) bahwa aktivitas yang diberikan kepadanya di dalam LPA, bertujuan untuk memberikan dasar pada saat si anak kembali ke tengah-tengah kehidupan masyarakat.
  3. Di samping upaya yang sudah disebutkan dalam saran 1 dan 2 di bahwa ini, maka untuk mengefektifkan upaya pembinaan napi anak dalam kerangka resosialisasi, pola pembinaan yang sepantasnya dilakukan adalah pola pembinaan yang bersifat dialogis, komunikatif, adaptif, dan familier.

Hal ini dikarenakan pola pembinaan ini melibatkan ataupun mengikutsertakan napi anak secara langsung dalam kehidupan sosial.

## **B. Saran**

1. Didasarkan kepada kenyataan yang ada, bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis bagi kinerja LPA bersifat tersebar, dan juga bersifat bias, yaitu tidak sedikit peraturan perundang-undangan yang seharusnya dijadikan dasar bagi kinerja LPA, namun dalam prakteknya ditinggalkan, karena profesionalitas dan kualitas aparat LPA yang relatif rendah, maka diperlukan adanya satu kebijakan yang bersifat : "kompilasi", yang tujuannya adalah menyatukan ketentuan-ketentuan pembinaan napi anak yang terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, ke dalam satu peraturan perundang-undangan (Kompilasi Pembinaan Napi Anak).
2. Dalam rangka meningkatkan kinerja LPA di dalam melakukan resosialisasi napi anak, di samping diperlukan upaya pembaharuan terhadap manajemen LPA, sarana dan pra-sarana LPA, perlu juga dilakukan penyegaran terhadap aparat LPA. Dalam arti, untuk tujuan profesionalitas dan peningkatan kualitas pembinaan napi anak, maka recruitment aparat LPA tidak hanya dilakukan terhadap mereka-mereka yang bergelar Sarjana Hukum, tetapi juga dapat diambil dari Sarjana Pendidikan dan Sarjana Psikologi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim. G. Nusantara, *Prospek Perlindungan Anak dalam Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Achmad Somadipraja. R dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992.
- Agus Suyanto, *Psikologi Perkembangan*, Rineka Cipta, Surabaya, 1977.
- Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, 1993.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, 1993.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1985.
- Adi Andoyo Sutjipto, *Pembinaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak yang dicita-citakan*, Varia Peradilan, Nomor IX, Januari, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Laporan Internasional Seminar on Prevention and Treatment of Juvenile Delinquency Through Community Participation*, Beijing, 19 – 24 Oktober 1988.
- Bambang Purnomo, *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Vos dalam Bambang Purnomo mengemukakan adanya 3 (tiga) aliran dalam teori gabungan ini, yaitu :
- a. Aliran yang menitikberatkan kepada pembalasan, tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi kepentingan penegak hukum (zevenbergen) ;
  - b. Aliran yang menitikberatkan pada perlindungan ketertiban masyarakat (simon) ; dan
  - c. Aliran yang menekankan pada pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat (Depinto).
- Baharuddin Soeryobroto, *Naskah Sejarah Pemasyarakatan ; Bagian ke II, Bab III, Periode Kepingjaraan R.I. ketiga (1960-1963)*, Proyek Penyempurnaan Sistem Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Barda Nawawi Arief, *Ruang Lingkup Masalah Perlindungan Anak dalam Respektif Dokumen Internasional*, Makalah pada Seminar Peradilan Anak, Hotel Panghegar, Bandung, 1996.



- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, 1996.
- Benny K. Harman, *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta, Elsam, 1997.
- Convention on the right of the child, United Nations Children's Fund.
- David Beethem, *Birokrasi*, Terjemahan oleh Sahat Simamora, Jakarta, Bumi Aksara, 1990.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman, *Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara dan Pemuda serta Pembinaan Anak Didik*, 1986.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Cetakan ke 3, 1990.
- Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992.
- Encyclopedia Americana, 1974, Seri 16.
- George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (terjemahan Alimandan, Rajawali Press, Jakarta, 1992.
- Herbert L. Pacher, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968.
- Hasil Wawancara, dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak di Tangerang, 1999.
- \_\_\_\_\_, dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak di Kutoarjo, 1999.
- Ian Gaib, *Teori-teori Ilmu Sosial Modern dan Parson sampai Habermas*, (terjemahan), Rajawali-Press, Jakarta, 1986.
- I.S. Susanto, *Pemahaman Kritis terhadap Realitas Sosial*, dalam Majalah Masalah-masalah Hukum, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1992.
- Karni, *Ringkasan tentang Hukum Pidana*, Balai Pustaka, Indonesia.
- Lobby Loqman, *Perkembangan Kebijakan Legislatif tentang Peradilan Anak di Indonesia, Makalah Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi*, UNDIP, 1995.

Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984.

Mardjaman, *Dimensi Objektif Lembaga Pemasyarakatan Anak di Indonesia, Makalah pada Seminar Nasional Terpidana III*, UI – Masumoto Foundation Japan, 1995.

Madhe Sandhi Astuti, *Pemidanaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana*, IKIP Malang, 1997.

Mardjono Reksodiputro, *Masa Depan Lembaga Pemasyarakatan Anak dan Lembaga Pemasyarakatan Wanita, Makalah pada Seminar Terpidana III*, UI – Masumoto Foundation Japan, 1995.

\_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.

Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1993.

Muladi dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana ; Perspektif dan Abalisionsime*, Bina Cipta, Bandung, 1996.

Mathew B. Miles dan Michel Huberman, *Analisis Data Kualitatif (terjemahan)*, Tjetjep Rohandi Rohadi, UI – Press, Jakarta, 1992.

Barda Nawawi Arif, *Ruang Lingkup Masalah Perlindungan Anak dalam Perspektif Dokumen Internasional, Makalah pada Seminar Peradilan Anak*, Hotel Panghegar, Bandung, 1996.

Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency ; Pemahaman dan Penanggulangannya*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997.

\_\_\_\_\_, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak, Makalah Seminar Nasional Peradilan Anak*, Universitas Padjajaran, Hotel Panghegar, Bandung, 1996.

\_\_\_\_\_, *Makalah pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum*, UNDIP, 1995.

Reter M. Blaw dan Marshal W. Meyor, *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*, (terjemahan) Gary Rajawali Press, Jakarta, 1992.

Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

- Penjelasan terhadap arti masing-masing istilah, Lihat UU No. 8 Tahun 1981, tentang KUHAP.
- Purniati dan Kemal Darmawan, *Mazhab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994.
- Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Kepenjaraan dalam Suatu Bunga Rampai*, Anmica, Bandung, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Strategi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Krimonologi*, Manjar Maju, Bandung, 1995.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Junivetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Sanafiah Faisol, *Penelitian Kualitatif ; Dasar-dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang, 1990.
- R.M. Jackson dalam Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, C.V. Ananta, Semarang, 1994.
- Saroso, *Sistem Pemasyarakatan, Ceramah pada Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan*, BPHN, Bina Cipta, Bandung, 1975.
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tinjauan Singkat*, Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII – Press, Jakarta, 1986.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Rajawali – Press, Jakarta, 1992.
- Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, BPFE UGM, Yogyakarta, 1987.
- Sri Widayati Soekito, *Anak dan Wanita dan Hukum*, LP3S, Jakarta.

Utrecht, *Rangkaian Seri Kuliah ; Hukum Pidana I*, Leo Pelak menyatakan bahwa : Hukuman itu menjadi suatu pembalasan kesalahan (scholar gelding), justru karena penjahat bersalah (schulahebben), maka ia harus mengalami suatu penderitaan.

United Nation Children Funds, *Convention on the Rights of the Child*, Resolusi PBB 44/25, 1989.

Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1976 tentang Kesejahteraan Anak.

Lampiran I

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 4 TAHUN 1979**

**TENTANG**

**KESEJAHTERAAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang :**

- a. bahwa anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.
- b. bahwa agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial;
- c. bahwa di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi;
- d. bahwa pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilaksanakan oleh anak sendiri;
- e. bahwa kesempatan, pemeliharaan dan usaha menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh bilamana usaha kesejahteraan anak terjamin;
- f. bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu menyusun undang-undang yang mengatur kesejahteraan anak;

**Mengingat :**

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 31 dan 34 Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

**REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**UNDANG-UNDANG TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Yang dimaksud di dalam undang-undang ini dengan :

1. a. Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial;

UPT-PUSTAK-UNDIP

- b. Usaha Kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya Kesejahteraan Anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.
2. Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
  3. a. Orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung.  
b. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
  4. Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan atau ibu dan anak.
  5. Anak yang tidak mempunyai orang tua adalah anak yang tidak ada lagi ayah dan ibu kandungnya.
  6. Anak yang tidak mampu adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar.
  7. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
  8. Anak yang mengalami masalah kelakuan adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat.
  9. Anak cacat adalah anak yang mengalami hambatan rohani dan atau jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

## **BAB II**

### **HAK ANAK**

#### **Pasal 2**

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah melahirkan.
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

#### **Pasal 3**

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.

#### **Pasal 4**

- (1) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah



### **Pasal 5**

- (1) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 6**

- (1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- (2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

### **Pasal 7**

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

### **Pasal 8**

Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

**BAB III**  
**TANGGUNG JAWAB ORANG TUA**  
**TERHADAP KESEJAHTERAAN ANAK**

**Pasal 9**

Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

**Pasal 10**

- (1) Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya sebagai termaksud dalam Pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua atau badan sebagai wali.
- (2) Pencabutan kuasa asuh dalam ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya.
- (3) Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim.
- (4) Pelaksanaan ketentuan ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB IV**  
**USAHA KESEJAHTERAAN ANAK**

**Pasal 11**

- (1) Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi.

- (2) Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat.
- (3) Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar panti.
- (4) Pemerintah mengadakan pengarah, bimbingan, bantuan dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat.
- (5) Pelaksanaan usaha kesejahteraan anak sebagai termaktub dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 12**

- (1) Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
- (2) Kepentingan kesejahteraan anak yang termaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 13**

Kerjasama internasional di bidang kesejahteraan anak dilaksanakan oleh Pemerintah atau oleh badan lain dengan persetujuan Pemerintah.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

#### **Pasal 14**

Tatacara koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan anak ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

### **Pasal 15**

Segala Peraturan Perundang-undangan di bidang kesejahteraan anak tetap berlaku selama dan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

### **Pasal 16**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 23 Juli 1979

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 Juli 1979

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1979 NOMOR 3143

Lampiran II

**PERATURAN PEMERINTAH**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 2 TAHUN 1988**  
**TENTANG**  
**USAHA KESEJAHTERAAN ANAK**  
**BAGI ANAK YANG MEMPUNYAI MASALAH**  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang :**

- a. bahwa anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara ;
- b. bahwa sebagai insan yang belum dapat berdiri sendiri perlu diadakan usaha untuk mewujudkan kesejahteraan anak agar dapat tumbuh dan berkembang wajar baik secara rohani jasmani maupun sosial ;
- c. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan anak tersebut huruf *b* diperlukan perhatian yang lebih besar khususnya kepada anak yang mempunyai masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143) ;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tersebut dipandang perlu mengaturnya lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**Mengingat :**

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039) ;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG USAHA KESEJAHTERAAN ANAK BAGI ANAK YANG MEMPUNYAI MASALAH.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Anak yang mempunyai masalah adalah anak yang antara lain tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang mengalami masalah kelakuan dan cacat ;
2. Rehabilitasi adalah suatu proses refungsionalisasi dan pembangun agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial ;
3. Asuhan adalah berbagai upaya yang diberikan kepada anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, dan anak yang mengalami

masalah kelakuan, yang bersifat sementara sebagai pengganti orang tua atau keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial ;

4. Bantuan adalah bantuan yang bersifat tidak tetap dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada anak yang tidak mampu agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial ;
5. Pelayanan khusus adalah berbagai upaya yang dilaksanakan untuk memulihkan dan mengembangkan anak cacat agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial ;
6. Panti adalah Panti Sosial yaitu lembaga/kesatuan kerja yang merupakan prasarana dan sarana yang memberikan pelayanan sosial berdasarkan profesi pekerjaan sosial ;
7. Menteri adalah Menteri Sosial.

## **BAB II**

### **TANGGUNG JAWAB**

#### **Pasal 2**

- (1) Usaha kesejahteraan anak pertama-tama dan terutama menjadi tanggung jawab orang tua.
- (2) Pemerintah dan/atau masyarakat melaksanakan usaha kesejahteraan anak dengan tujuan membantu mewujudkan kesejahteraan anak.
- (3) Pemerintah mendorong, membina masyarakat untuk berperan serta melaksanakan usaha kesejahteraan anak.

### **Pasal 3**

Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) yang bersifat lintas sektoral, dilakukan secara terkoordinasi, terpadu dan dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab, tugas dan fungsi masing-masing.

## **BAB III**

### **JENIS USAHA KESEJAHTERAAN ANAK**

#### **Pasal 4**

- (1) Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi.
- (2) Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan Pemerintah dan/atau masyarakat ditujukan terutama kepada anak yang mempunyai masalah antara lain anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang mengalami masalah kelakuan dan anak cacat.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan syarat dan kriteria anak yang mempunyai masalah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

#### **Pasal 5**

- (1) Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dimaksud untuk memberikan pemeliharaan, perlindungan, asuhan, perawatan dan pemulihan kepada anak yang mempunyai masalah agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
- (2) Pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi dilaksanakan dalam bentuk asuhan, bantuan, dan pelayanan khusus.



## **Pasal 6**

(1) Asuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditujukan kepada anak yang mempunyai masalah antara lain :

- a. Anak tidak mempunyai orang tua dan terlantar ;
- b. Anak terlantar ;
- c. Anak yang mengalami masalah kelakuan.

(2) Asuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan antara lain berupa :

- a. penyuluhan, bimbingan, dan bentuk bantuan lainnya yang diperlukan ;
- b. penyantunan dan pengentasan anak ;
- c. pemberian/peningkatan derajat kesehatan ;
- d. pemberian/peningkatan kesempatan belajar ;
- e. pemberian/peningkatan keterampilan.

(3) Pelaksanaan asuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan baik di dalam Panti maupun di luar panti.

(4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan asuhan diatur oleh Menteri.

## **Pasal 7**

(1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditujukan kepada anak yang tidak mampu.

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa bantuan materi, bantuan jasa dan bantuan fasilitas.

## **Pasal 8**

(1) Bantuan materi diberikan terutama dalam rangka usaha pemenuhan kebutuhan pokok anak.

- (2) Bantuan jasa diberikan dalam rangka usaha pembinaan dan pengembangan untuk mengerahkan bakat dan keterampilan.
- (3) Bantuan fasilitas diberikan dalam rangka usaha mengatasi hambatan-hambatan sosial.

#### **Pasal 9**

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat diberikan langsung kepada anak melalui orang tua/wali.
- (2) Tata cara pemberian dan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diatur oleh Menteri.

#### **Pasal 10**

- (1) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditujukan kepada anak cacat.
- (2) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bimbingan, pemenuhan kebutuhan pokok, pemberian keterampilan, pendidikan, pemberian bantuan/fasilitas dan pembinaan lanjutan yang pelaksanaannya diatur oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan dari Menteri lain yang terkait.
- (3) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan baik di dalam Panti maupun di luar Panti.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pelayanan khusus diatur oleh Menteri.

#### **Pasal 11**

Syarat dan tata cara pendirian Panti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (3) diatur oleh Menteri.

## **BAB IV**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperanserta dalam melaksanakan usaha kesejahteraan anak.
- (2) Peranserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diselenggarakan oleh badan sosial atau perseorangan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan usaha kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah dapat memberikan bimbingan, konsultasi, dorongan dan bantuan.

#### **Pasal 13**

- (1) Pengawasan usaha kesejahteraan anak yang dilaksanakan oleh masyarakat dilakukan oleh Menteri.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat preventif dan represif.

#### **Pasal 14**

Pelaksanaan ketentuan mengenai peranserta masyarakat dan pengawasannya diatur oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri lain yang terkait.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 15**

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Kesejahteraan Anak yang sudah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 16**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 29 Februari 1988

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 29 Februari 1988

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1988 NOMOR 2

Lampiran III

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 36 TAHUN 1990**

**TENTANG**

**PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD**

**(KONVENSI TENTANG HAK-HAK ANAK)**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang :**

- a. bahwa anak merupakan potensi sumber daya insani bagi pembangunan nasional karena itu pembinaan dan pengembangannya dimulai sedini mungkin agar dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara ;
- b. bahwa pembinaan kesejahteraan anak termasuk pemberian kesempatan untuk mengembangkan haknya, pelaksanaannya tidak saja merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, bangsa, dan negara melainkan diperlukan pula kerjasama internasional ;
- c. bahwa di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 26 Januari 1990, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak) sebagai hasil Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diterima pada tanggal 20 November 1989) ;
- d. bahwa ketentuan-ketentuan dalam konvensi tersebut pada huruf c, sudah tercakup di dalam peraturan perundang-undangan nasional mengenai anak;

- e. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian dengan Negara lain, dipandang perlu mengesahkan konvensi tersebut dengan Keputusan Presiden ;

**Mengingat :**

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-undang Dasar 1945 ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD (KONVENSI TENTANG HAK-HAK ANAK).

**Pasal 1**

Mengesahkan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 26 Januari 1990, sebagai hasil Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diterima pada tanggal 20 November 1989 dengan pernyataan (declaration), yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

**Pasal 2**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 25 Agustus 1990

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 25 Agustus 1990

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1990 NOMOR 57

**PERNYATAAN  
(DECLARATION)**

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia guarantees the fundamental rights of the child irrespective of their sex, ethnic or race. The Constitution prescribes those rights to be implemented by national laws and regulations.

The ratification of the Convention on the Rights of the Child by the Republic of Indonesia does not imply the acceptance of obligations going beyond the Constitutional limits nor the acceptance of any obligation to introduce any right beyond those prescribed under the Constitution.

With reference to the provisions of Articles 1, 14, 16, 17, 21, 22 and 29 of this Convention, the Government of the Republic of Indonesia declares that it will apply these articles in conformity with its Constitution.

**BUTIR-BUTIR KONVENSI PBB  
TENTANG HAK-HAK ANAK**

Butir-butir ini merupakan sari daripada Konvensi PBB tentang Hak Anak dari Pasal 1 sampai dengan 54 yang perlu mendapat sorotan yaitu :

- Batasan umur adalah di bawah 18 tahun.
- Untuk kepentingan terbaik anak.

**A. HAK-HAK ANAK**

1. Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman.



2. Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan.
3. Tugas Negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua, keluarga.
4. Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.
5. Hak memperoleh kebangsaan, nama serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya.
6. Hak memelihara jati diri termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarga.
7. Hak anak untuk tinggal bersama orang tua.
8. Kebebasan menyatakan pendapat/pandangan.
9. Kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama.
10. Kebebasan untuk berhimpun, berkumpul dan berserikat.
11. Memperoleh informasi dan aneka ragam sumber yang diperlukan.
12. Orang tua bertanggungjawab untuk membesarkan dan membina anak, negara mengambil langkah membantu orang tua yang bekerja agar anak mendapat perawatan dan fasilitas.
13. Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual.
14. Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat atas serangan yang tidak sah).

15. Perlindungan anak yang tidak mempunyai orang tua menjadi kewajiban negara.
16. Perlindungan pada anak yang berstatus pengungsi.
17. Hak perawatan khusus bagi anak cacat.
18. Hak perawatan pelayanan kesehatan.
19. Hak memperoleh manfaat jaminan sosial (asuransi sosial).
20. Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental dan sosial.
21. Hak anak atas pendidikan.
22. Hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berkreasi dan seni budaya.
23. Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi.
24. Perlindungan dari penggunaan obat terlarang
25. Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual.
26. Perlindungan terhadap penculikan dan penjualan atau perdagangan anak.
27. Melindungi anak terhadap semua bentuk eksploitasi terhadap segala aspek kesejahteraan anak.
28. Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi.
29. Hukum acara peradilan anak.
30. Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam atau di luar pengadilan.

## **B. IMPLEMENTASI**

Dalam Pasal 42 konvensi PBB tentang hak anak serta adanya komitmen antar negara anggota PBB yang dicetuskan dalam deklarasi dunia mengenai

kelangsungan hidup, perlindungan dan pengembangan anak butir ke 8 yaitu bahwa semua negara berkewajiban menyebarluaskan konvensi dan mendorong pelaksanaan serta pemantauannya.

“Penyebarluasan konvensi baik untuk orang dewasa maupun anak-anak”.